

ALIM HARUN PAMUNGKAS
HANDRIVA FAUZI

CV PACE
2026

Kurikulum Pelatihan Literasi Media

Bagi Masyarakat Desa



KURIKULUM PELATIHAN LITERASI MEDIA BAGI MASYARAKAT DESA

Alim Harun Pamungkas
Handriva Fauzi

**CV PACE
2026**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KURIKULUM PELATIHAN LITERASI MEDIA BAGI MASYARAKAT DESA

Alim Harun Pamungkas
Handriva Fauzi

**CV PACE
2026**

Judul

Kurikulum Pelatihan Literasi Media Bagi Masyarakat Desa

Penulis

Alim Harun Pamungkas

Handriva Fauzi

Copyright@2026

Oleh PACE Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia

x + 188 halaman

15,5 x 23 cm

Oleh

PACE

Partnership for Action on Community Education

Padang-Sumatera Barat

Cetakan Pertama: Januari 2026

ISBN: 978-623-5254-74-6

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

ANGGOTA

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Kurikulum pelatihan literasi media bagi masyarakat desa / Alim Harun Pamungkas, Handriva Fauzi
EDISI	Cetakan pertama, Januari 2026
PUBLIKASI	Solok : CV. Pace, 2026
DESKRIPSI FISIK	x, 189 halaman ; ilustrasi ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-623-5254-74-6
SUBJEK	Media sosial - Studi dan pengajaran
KLASIFIKASI	302.231 071 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1338756

Kata Pengantar

Perkembangan teknologi digital telah membawa desa ke dalam lingkaran informasi global yang bergerak tanpa henti. Masyarakat desa kini berhadapan dengan arus pesan, gambar, video, dan opini yang mengalir melalui berbagai platform media sosial. Transformasi ini menghadirkan peluang besar bagi kemajuan ekonomi dan sosial, tetapi sekaligus membawa tantangan serius dalam bentuk misinformasi, penipuan daring, polarisasi sosial, serta berbagai ancaman digital lain yang memengaruhi ketahanan komunitas. Dalam konteks inilah literasi media hadir sebagai kebutuhan mendasar.

Buku *Kurikulum Pelatihan Literasi Media bagi Masyarakat Desa* disusun sebagai upaya memberikan panduan komprehensif bagi fasilitator pendidikan masyarakat, pegiat LSM, perangkat desa, sekolah komunitas, dan seluruh pihak yang ingin memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi realitas informasi digital. Kurikulum ini berangkat dari serangkaian analisis kebutuhan, kajian teoretis, dan pertimbangan pedagogis yang disusun secara sistematis. Pendekatan yang digunakan memadukan prinsip pendidikan nonformal, metode andragogi, gagasan pendidikan pembebasan Paulo Freire, serta teori pembelajaran transformatif Mezirow.

Buku ini diharapkan menjadi inspirasi bagi berkembangnya gerakan literasi media yang tumbuh dari masyarakat desa sendiri. Literasi media harus dipahami sebagai jalan kemandirian: kemampuan untuk membaca informasi dengan kritis, mengambil keputusan dengan sadar,

serta berpartisipasi aktif dalam membangun ruang digital yang lebih sehat dan beradab.

Kurikulum ini tentunya tidak bersifat final. Perkembangan ekosistem digital yang cepat menuntut adanya pembaruan berkelanjutan. Namun, kami percaya fondasi yang disusun dalam buku ini dapat menjadi titik awal yang kuat bagi upaya membangun ketahanan informasi berbasis komunitas, dan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat desa untuk menjadi masyarakat digital yang berdaya, kritis, dan visioner.

Padang & Yogyakarta,

Penulis

Oktober 2025

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii

Bagian 1

Pendahuluan.....	1
-------------------------	----------

Bagian 2

Literasi Media bagi Masyarakat Desa	7
2.1 Sejarah dan Perkembangan Literasi Media	9
2.2 Literasi Media di Era Digital	10
2.3 Model Literasi Media (UNESCO MIL, Potter, Hobbs, dan Lainnya).....	12
2.4 Literasi Digital 5.0	14
2.5 Literasi Media dalam Konteks Pedesaan	16
2.6 Landasan Filosofis: Pendidikan Pembebasan, Andragogi, dan <i>Transformative Learning</i>	18

Bagian 3

Karakteristik Masyarakat Desa.....	21
3.1 Demografi dan Struktur Kependudukan.....	21
3.2 Struktur Sosial, Modal Sosial, dan Kekuatan Relasi.....	23
3.3 Pola Komunikasi Masyarakat Desa	25
3.4 Akses Internet dan Infrastruktur Media	26
3.5 Pola Konsumsi Media (WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook)	27
3.6 Implikasi terhadap Pelatihan Literasi Media	29

Bagian 4

Permasalahan Literasi Media Masyarakat Desa	31
4.1 Hoaks dan Disinformasi.....	31
4.2 Penipuan <i>Online</i> dan Kejahatan Digital	35
4.3 Radikalisme Digital dan Polarisasi Sosial.....	39

4.4 Judi Online dan Ketergantungan Digital	44
4.5 Pornografi dan Dampaknya bagi Generasi Muda	48
4.6 Kurangnya Kemampuan Verifikasi Informasi	52
Bagian 5	
Analisis Kebutuhan Pelatihan	59
5.1 Metode Analisis Kebutuhan	59
5.2 Kompetensi yang Dibutuhkan Masyarakat Desa	61
5.3 Matriks Kebutuhan Pelatihan	63
5.4 Analisis Gap Keterampilan	64
5.5 Konteks Lokal dan Faktor Risiko	64
Bagian 6	
Landasan Kurikulum Pelatihan	67
6.1 Kerangka Pedagogis Pelatihan Literasi Media	67
6.2 Prinsip-Prinsip Pendidikan Nonformal	71
6.3 Prinsip Andragogi dalam Pelatihan Orang Dewasa	76
6.4 Motivasi Intrinsik dalam Pembelajaran	80
6.5 Transformative Learning Kerangka Perubahan Perilaku	81
Bagian 7	
Struktur Kurikulum Pelatihan Literasi Media	89
7.1 Desain Umum Kurikulum	89
7.2 Struktur Modul Pelatihan	90
7.3 Kompetensi Inti Kurikulum	92
7.4 Kompetensi Dasar Kurikulum	103
7.5 Peta Capaian Pembelajaran	103
7.6 Alur Pembelajaran Berbasis Model Spiral	104
Bagian 8	
Silabus Pelatihan Literasi Media	107
Modul 1	108
Modul 2	110
Modul 3	111
Modul 4	113
Modul 5	114
Modul 6	116
Modul 7	118
Modul 8	119

Modul 9.....	121
Modul 10.....	123
Bagian 9	
Peran Fasilitator Desa	125
9.1 Fasilitator sebagai Penggerak Pembelajaran	125
9.2 Keterampilan Fasilitator dalam Konteks Pelatihan	128
9.3 Fasilitator sebagai Mediator Sosial	130
9.4 Peran Fasilitator dalam Ruang Digital Desa.....	132
9.5 Etika Fasilitator dalam Pelatihan Literasi Media	134
Bagian 10	
Metodologi Pelatihan.....	139
10.1 Prinsip-Prinsip Dasar Metodologi Pelatihan.....	139
10.2 Pendekatan Andragogi dalam Pelatihan.....	141
10.3 Metode Dialogis dalam Perspektif Freire	144
10.4 Pembelajaran Transformatif dalam Literasi Media	147
10.5 Strategi dan Teknik Pembelajaran di Lapangan	149
10.6 Suasana Pembelajaran-Pengelolaan Dinamika Kelompok	152
Bagian 11	
Evaluasi dan Monitoring Pelatihan.....	155
11.1 Pentingnya Evaluasi dalam Pelatihan Literasi Media	156
11.2 Evaluasi Formatif dan Sumatif	157
11.3 Mengukur Perubahan Perilaku dan Kesadaran Kritis	159
11.4 Instrumen dan Teknik Evaluasi Pelatihan	162
11.5 Monitoring Pelaksanaan Pelatihan	164
11.6 Monitoring Dampak Jangka Panjang	167
11.7 Mengintegrasikan Hasil Evaluasi dalam Kurikulum.....	169
Bagian 12	
Penutup	173
Daftar Pustaka.....	177
Glosarium	179
Indeks	189
Profil Penulis	191



Bagian 1

Pendahuluan

Pelatihan literasi media bagi masyarakat desa menjadi kebutuhan yang semakin mendesak pada era ketika arus informasi digital berputar tanpa henti dan batas antara fakta serta manipulasi terus mengabur. Transformasi digital yang bergerak cepat telah menembus wilayah pedesaan melalui penetrasi *smartphone* murah, perluasan jaringan internet, serta hadirnya aplikasi media sosial yang menjadi ruang baru bagi masyarakat desa dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan membangun relasi sosial. Meskipun peluang yang ditawarkan cukup besar, kondisi ini sekaligus menimbulkan kerentanan baru karena kemampuan masyarakat desa dalam memaknai, memilah, dan mengkritisi informasi sering kali tidak sebanding dengan kecepatan arus media digital yang mereka hadapi. Berbagai penelitian nasional menunjukkan meningkatnya angka penyebaran hoaks, penipuan *online*, judi digital (judi *online*), radikalisasi, dan konsumsi konten pornografi di wilayah pedesaan, yang pada gilirannya memicu keresahan sosial, konflik internal, kerugian ekonomi, serta pengikisan kohesi sosial. Situasi inilah yang melandasi kebutuhan mendesak untuk menyediakan kurikulum

pelatihan literasi media yang terstruktur, kontekstual, dan berbasis kebutuhan masyarakat desa.

Perkembangan teknologi digital membawa kontradiksi yang mencolok di desa. Di satu sisi teknologi menjadi pintu bagi akses informasi, edukasi, dan peluang ekonomi, namun di sisi lain akses tersebut tidak otomatis diikuti dengan kemampuan memahami representasi media, struktur produksi informasi, serta teknik manipulasi yang bekerja di balik layar platform digital. Literasi media bukan hanya kemampuan membaca dan menonton konten, melainkan kompetensi multidimensi yang berkaitan dengan analisis kritis, produksi konten, pemahaman etika digital, keamanan daring, dan kemampuan verifikasi informasi. Konsep-konsep ini telah digagas dalam kerangka UNESCO Media and Information Literacy (MIL) yang menekankan pentingnya kemampuan mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan pesan media. Pemikiran Renee Hobbs, David Buckingham, dan James Potter turut menekankan bahwa literasi media merupakan kompetensi yang harus dipelajari secara berkelanjutan karena media digital selalu berubah. Dalam konteks pedesaan, tantangan literasi media menjadi lebih spesifik karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, pola komunikasi berbasis kelompok, dominasi media sosial tertentu seperti WhatsApp dan TikTok, keterbatasan referensi alternatif, serta tingginya kepercayaan pada hubungan interpersonal yang sering kali digunakan sebagai pintu masuk penyebaran disinformasi.

Selain kerangka teoretis terkait media dan informasi, pelatihan literasi media untuk masyarakat desa membutuhkan pijakan pedagogis yang kokoh. Pelatihan tidak dapat disamakan dengan pembelajaran sekolah. Ia harus mengikuti prinsip andragogi sebagaimana dipaparkan Malcolm Knowles, yang menekankan bahwa orang dewasa belajar melalui pengalaman, kebutuhan praktis, relevansi langsung, serta keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.

Pelatihan literasi media juga harus memberi ruang pada perspektif Paulo Freire mengenai pendidikan pembebasan, di mana masyarakat desa tidak diposisikan sebagai objek yang dipenuhi materi, tetapi sebagai subjek yang diajak membaca realitas sosialnya sendiri dan menemukan cara menghadapinya. Pendekatan "*problem-posing education*" memungkinkan peserta menganalisis persoalan literasi media dari pengalaman harian, seperti hoaks mengenai pupuk subsidi, kabar bohong terkait bansos, hingga modus penipuan digital yang menimpa tetangganya sendiri. Di sisi lain, pemikiran Jack Mezirow terkait *transformative learning* menekankan bahwa pelatihan harus memungkinkan terjadinya perubahan cara berpikir, bukan hanya peningkatan pengetahuan. Artinya, masyarakat desa diajak memeriksa ulang asumsi yang mereka pegang, bias yang tidak disadari, serta pola konsumsi media yang terbentuk bertahun-tahun.

Rumusan masalah dalam buku ini berangkat dari pertanyaan utama yaitu bagaimana merancang kurikulum pelatihan literasi media yang mampu menjawab kebutuhan, tantangan, dan konteks sosial masyarakat desa secara komprehensif? Dari pertanyaan kunci tersebut muncul beberapa sub-rumusan masalah di antaranya bagaimana karakteristik konsumsi media masyarakat desa; kompetensi literasi media apa yang mendesak untuk dikembangkan; nilai, prinsip, serta metode pedagogis apa yang paling sesuai untuk pelatihan orang dewasa di desa; serta bagaimana merancang modul, kegiatan belajar, evaluasi, dan panduan implementasi yang dapat digunakan fasilitator lapangan dari berbagai latar belakang. Seluruh permasalahan itu menjadi dasar penyusunan kurikulum yang bersifat aplikatif namun tetap kuat secara teoretis pada buku ini.

Tujuan penulisan buku ini adalah menyediakan panduan yang lengkap, praktis, dan sistematis bagi fasilitator pendidikan masyarakat, LSM, sekolah komunitas, perangkat desa, serta lembaga pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan pelatihan literasi media yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Buku ini tidak hanya memberikan teori dasar literasi media, tetapi juga menghadirkan analisis karakteristik masyarakat desa, perumusan kurikulum pelatihan, penyusunan modul pembelajaran, panduan fasilitasi, hingga perangkat evaluasi. Secara khusus, buku ini bertujuan membantu fasilitator memahami cara mengembangkan kompetensi masyarakat desa dalam mengakses informasi, menganalisis pesan media, mengenali disinformasi, menjaga keamanan digital, serta memproduksi konten yang bermanfaat bagi komunitasnya.

Manfaat buku ini bersifat praktis sekaligus strategis. Bagi fasilitator desa, buku ini memberikan langkah-langkah konkret dalam menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan literasi media. Bagi pemerintah daerah, buku ini dapat menjadi referensi kebijakan dalam merancang program literasi digital berbasis komunitas. Bagi LSM dan sekolah komunitas, kurikulum dalam buku ini dapat dijadikan alat untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan media digital. Selain itu, buku ini memberi kontribusi akademik dengan memperkaya khazanah literatur tentang literasi media di pedesaan yang selama ini masih terbatas.

Buku ini membatasi diri pada pendekatan literasi media yang relevan untuk pelatihan masyarakat desa dan menghindari pembahasan teknis tingkat lanjut seperti keamanan siber profesional, analisis *big data*, atau produksi konten multimedia tingkat tinggi. Fokus utama adalah kemampuan dasar, menengah, dan praktik nyata yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam konteks sehari-hari. Pembahasan juga membatasi dirinya pada konteks Indonesia, dengan memperhatikan karakteristik sosial, politik, dan budaya masyarakat desa di berbagai daerah.

Struktur buku ini disusun secara bertahap. Bagian pertama memberikan landasan konseptual dan teoretis. Bagian kedua menganalisis karakteristik serta kebutuhan masyarakat desa. Bagian ketiga membahas desain kurikulum dan struktur modul. Bagian keempat menyajikan modul-modul pelatihan secara lengkap. Bagian kelima berisi panduan implementasi pelatihan di lapangan, termasuk metode fasilitasi dan perangkat evaluasi. Bagian terakhir adalah lampiran yang berisi contoh modul harian, materi, instrumen evaluasi, dan *tools* verifikasi informasi.

Bab pendahuluan ini menegaskan dimensi mendesak literasi media dalam kehidupan masyarakat desa sekaligus meletakkan dasar filosofis, teoretis, dan pedagogis bagi keseluruhan isi buku. Dengan fondasi ini, pembaca diharapkan dapat memahami arah keseluruhan buku dan mempersiapkan diri untuk masuk ke pembahasan yang lebih mendalam pada bab-bab berikutnya.



Bagian 2

Literasi Media bagi Masyarakat Desa

Transformasi digital telah mengubah wajah pedesaan Indonesia dalam satu dekade terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penetrasi internet di desa naik signifikan, yang mana pada tahun 2018 hanya sekitar 39% rumah tangga desa yang memiliki akses internet, tetapi pada 2023 angkanya telah meningkat menjadi lebih dari 62%. Angka tersebut menunjukkan bahwa jurang digital antara desa dan kota memang masih ada, tetapi kian mengecil berkat terbentuknya sesuatu yang kini sering disebut sebagai desa digital atau *rural digital society*. Namun, peningkatan akses ini tidak otomatis berarti peningkatan kualitas penggunaan, justru kondisi ini membuka ruang bagi munculnya pola interaksi media yang baru, sekaligus kerentanan sosial yang belum sepenuhnya dipahami.

Studi literatur terkait di pedesaan menunjukkan bahwa kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan akses fisik (*availability*), tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi (*adoption*) serta kapasitas kritis

dalam menggunakannya (*digital capital*). Literatur dari Warschauer, Castells, hingga peneliti-peneliti Indonesia memperlihatkan bahwa desa memiliki karakteristik komunikasi berbasis kepercayaan yang sangat kuat. Ketika teknologi masuk, masyarakat desa mengadopsinya melalui pola sosial serupa di mana informasi yang beredar melalui grup WhatsApp keluarga, grup masjid, atau kelompok tani cenderung dipercayai tanpa evaluasi rasional. Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa hoaks dan disinformasi sering kali lebih cepat menyebar di pedesaan dibandingkan perkotaan.

Temuan empiris dari APJII (2022–2023) memperkuat gambaran ini. Menurut APJII, masyarakat desa adalah pengguna WhatsApp dan Facebook dengan kategori berat, dengan dominasi aktivitas konsumtif seperti menonton video pendek, *forwarding* pesan, atau mengikuti arus tren. Data KOMINFO (2020–2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% laporan hoaks yang berdampak sosial ditemukan menyebar di wilayah non-perkotaan, terutama melalui jaringan interpersonal. Sementara laporan UNESCO Indonesia mencatat bahwa rendahnya literasi informasi di pedesaan berkaitan erat dengan minimnya pelatihan formal dan kurangnya kanal informasi resmi di tingkat desa.

Potret sosiologis ini menunjukkan bahwa desa digital adalah realitas baru yang memerlukan pendekatan literasi media yang lebih serius, lebih kontekstual, dan lebih sensitif terhadap dinamika sosial budaya wilayah perdesaan. Bab ini akan menjadi fondasi teoritis bagi keseluruhan kurikulum pelatihan literasi media bagi masyarakat desa. Kerangka teoritis yang dibahas mencakup sejarah perkembangan literasi media, pendekatan kontemporer literasi media di era digital, model-model literasi media yang diakui secara internasional, konsep literasi digital, serta landasan filosofis dari perspektif pendidikan kritis, andragogi, dan *transformative learning*. Bab ini dirancang untuk memberikan

pemahaman menyeluruh kepada pembaca tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari praktik literasi media, sekaligus menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut diterjemahkan dalam konteks masyarakat desa Indonesia.

2.1 Sejarah dan Perkembangan Literasi Media

Gagasan literasi media tumbuh dari kebutuhan masyarakat untuk memahami pengaruh media massa pada perilaku, opini, dan budaya. Pada awal abad ke-20, ketika media cetak dan radio mulai dominan, perhatian terhadap literasi media muncul terutama dalam konteks perlindungan anak dari pengaruh negatif media. Pendekatan yang dikenal sebagai *inoculatory approach* berfokus pada perlunya memproteksi individu dari dampak buruk media. Pandangan ini kemudian berkembang seiring munculnya televisi pada pertengahan abad ke-20, yang memperluas jangkauan dan kekuatan media dalam membentuk persepsi seseorang tentang dunia.

Memasuki akhir abad ke-20, para pemikir seperti David Buckingham menggeser fokus literasi media dari sekadar proteksi menjadi pemahaman kritis. Literasi media dipandang sebagai kemampuan aktif untuk menganalisis dan menafsirkan pesan media, memahami bagaimana media diproduksi, serta melihat hubungan antara media, kekuasaan, dan ideologi. Perkembangan internet pada 1990-an dan media sosial pada 2000-an membawa perubahan fundamental dalam konsep literasi media. Pengguna tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten. Aliran informasi menjadi lebih cepat, lebih terfragmentasi, dan lebih dipersonalisasi melalui algoritma.

Pada era digital saat ini, literasi media tidak bisa dilepaskan dari konsep literasi informasi, literasi data, dan literasi digital. UNESCO kemudian menggabungkan berbagai bentuk literasi tersebut dalam satu kerangka besar yang

dikenal sebagai Media and Information Literacy (MIL). Kerangka ini menekankan pentingnya kemampuan mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan pesan media secara etis dan bertanggung jawab. Pendekatan MIL menandai era baru dalam literasi media yang tidak hanya menekankan pemahaman, tetapi juga partisipasi aktif dalam ekosistem digital.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan literasi media mengikuti dinamika global, namun dengan tantangan lokal yang lebih kompleks. Penetrasi internet yang meningkat di wilayah pedesaan membawa perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat, namun belum diikuti dengan peningkatan kemampuan mengkritisi informasi. Banyak masyarakat desa memiliki akses ke *smartphone* dan media sosial, tetapi pemahaman terhadap cara kerja algoritma, proses produksi berita, dan teknik manipulasi digital masih rendah. Kondisi ini membuat literasi media di pedesaan lebih rentan terhadap hoaks, penipuan, dan konten provokatif yang mudah menyebar melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook.

Perkembangan literasi media yang historis ini memberikan gambaran bahwa kemampuan kritis terhadap media merupakan kebutuhan yang terus tumbuh dan semakin mendesak, terutama bagi masyarakat desa yang kini menjadi bagian dari ekosistem informasi global.

2.2 Literasi Media di Era Digital

Era digital membawa perubahan mendalam dalam cara masyarakat menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Media sosial mempercepat distribusi informasi, menghilangkan batasan geografis, dan meruntuhkan hierarki otoritas informasi. Dalam konteks ini, literasi media bukan lagi hanya kemampuan memahami isi media, tetapi kemampuan memahami logika yang membentuk media digital, mulai dari algoritma hingga ekosistem platform.

Literasi media di era digital setidaknya mencakup empat dimensi utama: kognitif, emosional, sosial, dan etis. Secara kognitif, individu perlu memahami perbedaan antara fakta dan opini, bias media, teknik *framing*, serta bagaimana informasi dikonstruksi untuk tujuan tertentu. Secara emosional, individu harus mampu mengelola respons afektif yang dipicu oleh konten digital yang sering kali sengaja dirancang untuk memancing reaksi cepat. Secara sosial, literasi media berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dalam ruang digital yang beragam, memahami budaya partisipasi, dan terlibat dalam diskusi publik secara sehat. Secara etis, literasi media mencakup pemahaman tentang privasi, keamanan digital, dan tanggung jawab dalam berbagi informasi.

Dalam konteks pedesaan, tantangan literasi media di era digital bersifat unik. Akses yang lebih besar terhadap media digital tidak otomatis menghasilkan kemampuan yang lebih baik dalam memilah informasi. Banyak masyarakat desa menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama, terutama WhatsApp dan Facebook, karena sifatnya yang interpersonal dan mudah diakses. Namun, media sosial sering kali memprioritaskan konten yang memicu keterlibatan emosional, bukan kebenaran. Hal ini membuat masyarakat desa menjadi sasaran empuk disinformasi yang memanfaatkan jaringan sosial berbasis kedekatan.

Selain itu, kurangnya variasi sumber informasi memperkuat risiko terjadinya *confirmation bias* dan *groupthink*. Misalnya, kabar palsu tentang penghentian pupuk subsidi atau penculikan anak sering kali diterima begitu saja karena disampaikan oleh figur yang dipercaya dalam komunitas, seperti tokoh agama atau ketua RT. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa literasi media di era digital harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan pola komunikasi masyarakat desa.

Literasi media era digital juga menuntut kemampuan memahami peran algoritma dalam membentuk arus informasi. Algoritma bekerja berdasarkan pola interaksi pengguna, sehingga informasi yang muncul di layar seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang pernah ia klik, cari, atau bagikan. Tanpa pemahaman terhadap hal ini, masyarakat desa mudah terjebak dalam ruang gema (*echo chamber*) yang menguatkan pandangan tertentu dan menutup kemungkinan dialog kritis.

Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan pelatihan literasi media yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai dinamika media digital. Pelatihan harus mampu mengajak masyarakat desa untuk memahami bagaimana informasi beroperasi, bagaimana mereka dapat memverifikasi kebenaran informasi, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara sehat dalam ruang digital.

2.3 Model Literasi Media (UNESCO MIL, Potter, Hobbs, dan Lainnya)

Model literasi media menawarkan kerangka analitis untuk memahami dan mengembangkan kompetensi literasi media secara sistematis. Kerangka-kerangka ini sangat penting dalam penyusunan kurikulum pelatihan karena membantu fasilitator memetakan kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan, bagaimana urutan pembelajaran, serta bagaimana mengukur capaian peserta.

Salah satu kerangka paling komprehensif adalah UNESCO Media and Information Literacy (MIL) yang mengintegrasikan literasi media dan informasi menjadi satu kesatuan. Kerangka MIL menekankan beberapa kompetensi utama, yaitu kemampuan mengakses informasi, mengevaluasi informasi, menggunakan informasi, dan menciptakan konten. MIL juga menekankan pentingnya kesadaran kritis terhadap media, termasuk pemahaman

tentang tujuan media, kepemilikan media, dan fungsi media dalam masyarakat. Kompetensi ini sangat relevan bagi masyarakat desa yang sering kali mengonsumsi informasi tanpa memahami bagaimana informasi tersebut diproduksi dan untuk kepentingan siapa.

Renee Hobbs mengembangkan lima kompetensi literasi media yang dikenal sebagai *Access, Analyze, Create, Reflect, dan Act*. Dalam pendekatan ini, literasi media tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi juga mencakup penciptaan konten dan tindakan sosial. Pendekatan ini sangat sesuai dengan pelatihan berbasis komunitas karena mendorong peserta untuk tidak hanya memahami media, tetapi juga terlibat dalam produksi konten positif yang berkontribusi pada komunitasnya.

James Potter memandang literasi media sebagai kumpulan keterampilan yang berkembang secara bertahap melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Potter menekankan bahwa literasi media terdiri dari struktur pengetahuan dan kemampuan kognitif untuk memproses informasi. Struktur pengetahuan mencakup pemahaman tentang media, industri media, efek media, dan konteks sosial. Kemampuan kognitif mencakup analisis, evaluasi, *grouping*, induksi, deduksi, sintesis, dan abstraksi. Kerangka ini membantu menjelaskan bahwa literasi media tidak bisa dicapai dalam satu kali pelatihan, melainkan melalui proses yang terus berlanjut.

David Buckingham menekankan bahwa literasi media melibatkan pemahaman kritis terhadap representasi, bahasa media, produksi, dan audiens. Buckingham melihat literasi media sebagai kemampuan untuk memahami bahwa semua media adalah konstruksi, selalu melibatkan pilihan tertentu, dan dipengaruhi oleh konteks sosial serta ekonomi. Pendekatan Buckingham sangat membantu untuk menggali bagaimana media membentuk persepsi masyarakat desa

tentang isu-isu tertentu, seperti politik lokal atau program pemerintah.

Model-model ini memberikan landasan bagi penyusunan kurikulum yang holistik. Mereka membantu merumuskan kompetensi inti yang perlu dikembangkan pada peserta pelatihan, termasuk kemampuan teknis, analitis, dan reflektif. Dengan memahami kerangka-kerangka ini, pelatihan literasi media di desa dapat dirancang secara lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan konteks lokal.

2.4 Literasi Digital 5.0

Perkembangan ekonomi digital dan revolusi industri 5.0 membawa dimensi baru dalam pemahaman literasi digital. Jika pada tahap awal literasi digital lebih berfokus pada keterampilan teknis seperti mengoperasikan perangkat atau menggunakan aplikasi, maka Literasi Digital 5.0 menuntut kompetensi yang lebih kompleks, termasuk pemahaman terhadap data, algoritma, keamanan siber, etika digital, dan kemampuan kolaborasi dalam ruang virtual. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia menekankan bahwa literasi digital pada era 5.0 mencakup empat pilar utama: kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Keempat pilar ini berkelindan dengan kebutuhan masyarakat desa yang kini banyak berinteraksi melalui ruang digital tetapi belum memahami sepenuhnya konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik dari aktivitas daring mereka.

Kecakapan digital merujuk pada kemampuan seseorang menggunakan perangkat digital dan mengakses informasi melalui jaringan internet. Di desa, kecakapan ini sering kali tidak merata. Banyak masyarakat memang mampu menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, atau TikTok, tetapi belum memiliki keterampilan untuk mencari informasi yang kredibel, memanfaatkan platform edukasi, atau menggunakan layanan pemerintah berbasis digital. Kurangnya kecakapan digital sering menjadi penyebab

masyarakat mudah terjebak dalam penipuan *online* atau konten yang menyesatkan.

Budaya digital berhubungan dengan cara individu dan komunitas berperilaku dalam ruang digital. Literasi digital 4.0 menekankan pentingnya memahami norma interaksi digital, pola interaksi virtual, dan dinamika kelompok dalam ruang daring. Dalam konteks desa, budaya digital kerap mengikuti pola komunikasi *offline* yang mengandalkan kepercayaan interpersonal. Informasi yang disampaikan oleh seseorang yang dianggap tokoh masyarakat biasanya diterima begitu saja meskipun belum terverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya digital masyarakat desa masih sangat dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional, sehingga literasi digital harus memperhatikan dinamika tersebut.

Etika digital merupakan pilar yang sangat relevan karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat desa memproduksi dan membagikan informasi. Banyak kasus penyebaran hoaks di desa tidak muncul dari niat buruk, tetapi dari ketidaktahuan mengenai aturan berbagi informasi, kurangnya kesadaran tentang dampak sosialnya, serta minimnya refleksi terhadap konsekuensi hukum. Literasi digital 5.0 menekankan bahwa etika digital bukan sekadar kesopanan *online*, tetapi mencakup tanggung jawab sosial, kesadaran hak cipta, perlindungan data pribadi, serta penghargaan terhadap keragaman ide.

Keamanan digital menjadi aspek yang sering kali terlupakan. Banyak masyarakat desa menggunakan kata sandi yang lemah, menyimpan data pribadi secara sembarangan, atau mengunduh aplikasi tanpa memahami risikonya. Kerentanan ini dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan *online* yang menggunakan modus undian palsu, pinjaman *online* ilegal, hingga *phising* melalui tautan WhatsApp. Literasi digital 5.0 membantu masyarakat desa membangun

pemahaman mengenai ancaman digital dan strategi perlindungan diri yang sederhana tetapi efektif.

Keseluruhan pilar literasi digital 5.0 memberikan kerangka operasional yang penting bagi pelatihan literasi media. Pelatihan harus mampu memadukan keterampilan teknis, pemahaman kritis, dan kesadaran etis agar masyarakat desa dapat berpartisipasi secara bijak dalam ruang digital. Dengan memadukan literasi digital 5.0 ke dalam kurikulum pelatihan, fasilitator dapat memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konten media, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

2.5 Literasi Media dalam Konteks Pedesaan

Literasi media dalam konteks masyarakat desa tidak bisa disamakan dengan konteks urban karena perbedaan struktur sosial, pola komunikasi, akses informasi, tingkat pendidikan, dan dinamika ekonomi. Masyarakat desa memiliki pola interaksi yang lebih berbasis komunitas, tradisi lisan, dan ikatan sosial yang kuat. Struktur sosial seperti kedekatan keluarga, otoritas tokoh agama, peran kepala dusun, serta pola gotong-royong mempengaruhi cara masyarakat desa menerima dan memaknai informasi.

Dalam banyak kasus, informasi di desa beredar melalui saluran interpersonal. Grup WhatsApp keluarga, grup RT, dan grup komunitas menjadi media utama penyebaran kabar. Kepercayaan interpersonal membuat informasi yang dibagikan oleh anggota yang dianggap kredibel, misalnya informasi yang muncul dari tokoh agama, guru, atau perangkat desa lebih mudah diterima oleh masyarakat tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini menjadikan masyarakat desa rentan terhadap disinformasi yang memanfaatkan rasa percaya dan kedekatan sosial sebagai pintu masuk.

Selain itu, akses informasi yang terbatas membuat pilihan referensi masyarakat desa sangat sedikit. Banyak desa mengandalkan satu sumber informasi utama, yaitu media sosial. Ketiadaan variasi informasi menyebabkan masyarakat hanya terpapar pada narasi yang mendominasi platform tersebut, sehingga bias kognitif semakin menguat. Misalnya, saat hoaks mengenai vaksin menyebar melalui WhatsApp, banyak masyarakat yang menolak vaksinasi bukan karena alasan ideologis, tetapi karena minimnya informasi alternatif yang kredibel.

Tantangan lain adalah rendahnya budaya membaca dan diskusi kritis. Tradisi lisan yang kuat memang menjadi kekuatan dalam komunitas desa, tetapi dalam konteks media digital, hal ini dapat menghambat kemampuan memahami teks, berita, atau laporan yang membutuhkan literasi membaca tingkat tertentu. Kebenaran suatu informasi yang bersumber dari media digital bagi masyarakat desa cenderung hanya sebatas jumlah *likes* atau jumlah penonton. Dalam kata lain, keviralan suatu informasi sering kali dipandang sebagai indikator kebenaran informasi tersebut. Ketika suatu informasi sedang viral, maka dengan sendirinya masyarakat akan menganggap benar informasi tersebut dan secara sukarela tidak keberatan untuk menyebarkannya. Padahal, keviralan suatu informasi hari ini belum tentu disebabkan oleh kebenaran informasi tersebut, bisa jadi keviralan tersebut sengaja diorkestrasi sedemikian rupa agar menjadi viral. Pelatihan literasi media harus memperhatikan hal ini dengan memperbanyak pendekatan visual, contoh konkret, dan diskusi berbasis pengalaman.

Konteks ekonomi juga mempengaruhi literasi media di desa. Banyak masyarakat desa menggunakan internet terutama untuk hiburan, seperti menonton video lucu, mengikuti tren TikTok, atau bermain gim. Akibatnya, kesadaran akan risiko digital sering kali lebih rendah dibanding motivasi untuk hiburan. Pelatihan literasi media

harus menghubungkan isu media dengan kebutuhan hidup masyarakat desa, seperti keamanan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah homogenitas sosial. Di banyak desa, kelompok sosial cenderung seragam dalam hal usia, latar belakang pendidikan, dan budaya. Homogenitas ini membuat koreksi sosial terhadap hoaks lebih lambat karena tidak ada banyak pandangan alternatif yang dapat menantang informasi yang beredar. Oleh karena itu, literasi media di desa membutuhkan strategi khusus yang mampu menciptakan ruang dialog kritis, memfasilitasi keberagaman pandangan, dan mendorong analisis kolektif terhadap informasi.

Pada titik ini terlihat bahwa literasi media dalam konteks pedesaan bukan sekadar persoalan kemampuan teknis, tetapi berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya komunikasi, dan dinamika kekuasaan. Kurikulum pelatihan harus mampu merespons kompleksitas ini agar proses pembelajaran benar-benar relevan bagi masyarakat desa.

2.6 Landasan Filosofis: Pendidikan Pembebasan, Andragogi, dan *Transformative Learning*

Landasan filosofis merupakan bagian yang sangat penting dalam merancang kurikulum pelatihan literasi media. Pelatihan untuk masyarakat desa tidak dapat dilakukan dengan pendekatan instruksional yang menempatkan peserta sebagai objek pasif. Pelatihan harus memosisikan masyarakat desa sebagai subjek pembelajaran yang memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, dan kapasitas reflektif. Untuk itu, tiga pilar teoritis berikut digunakan sebagai fondasi utama yaitu pendidikan pembebasan Paulo Freire, pendekatan andragogi Malcolm Knowles, dan teori *transformative learning* dari Jack Mezirow.

Paulo Freire melihat pendidikan sebagai proses pembebasan yang membantu peserta didik membaca realitas sosial sekaligus mengubahnya. Dalam konteks literasi media, pendekatan ini membantu masyarakat desa memahami bahwa informasi bukanlah sesuatu yang netral. Informasi selalu diproduksi melalui kepentingan tertentu dan memiliki dampak pada kehidupan sosial. Freire menolak model pendidikan gaya bank, di mana peserta hanya menerima pengetahuan secara satu arah. Sebaliknya, ia menekankan pendidikan dialogis dan *problem-posing* yang mengajak peserta mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti hoaks pupuk subsidi, penipuan *online*, atau bias pemberitaan tentang desa. Melalui dialog, peserta dilibatkan sebagai pemikir aktif yang menganalisis struktur informasi dan menemukan solusi secara kolektif. Pendekatan ini sangat relevan dengan masyarakat desa yang memiliki tradisi musyawarah dan gotong-royong.

Malcolm Knowles memperluas landasan pendidikan orang dewasa melalui konsep andragogi. Knowles menekankan bahwa orang dewasa belajar berdasarkan kebutuhan aktual, pengalaman masa lalu, relevansi langsung, dan orientasi pada pemecahan masalah. Masyarakat desa sebagai peserta pelatihan memiliki pengalaman hidup yang kaya dan spesifik. Pengalaman tersebut dapat diangkat sebagai sumber belajar untuk memahami bagaimana media digital memengaruhi kehidupan mereka. Misalnya, pengalaman ditipu melalui pesan WhatsApp dapat digunakan sebagai titik awal pembelajaran tentang teknik verifikasi informasi. Andragogi membantu memfasilitasi pelatihan yang lebih fleksibel, partisipatif, dan menghargai suara peserta.

Teori *transformative learning* dari Jack Mezirow menekankan pentingnya refleksi kritis dalam mengubah kerangka berpikir seseorang. Pembelajaran yang transformatif terjadi ketika peserta menyadari bahwa asumsi atau kebiasaan

mereka dalam mengonsumsi informasi mungkin keliru atau tidak memadai. Misalnya, keyakinan bahwa “kalau yang kirim ustaz pasti benar” adalah asumsi yang perlu direfleksikan dalam pelatihan literasi media. Proses refleksi ini membuka kemungkinan bagi peserta untuk mengembangkan pola pikir baru yang lebih kritis dan adaptif dalam menghadapi arus informasi digital.

Ketiga landasan filosofis ini membangun dasar bagi kurikulum pelatihan literasi media yang bukan hanya informatif, tetapi juga transformatif. Pelatihan tidak sekadar mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kritis yang memungkinkan masyarakat desa mengenali relasi kuasa dalam media, memahami mekanisme manipulasi informasi, serta mengambil sikap sebagai masyarakat digital yang bertanggung jawab. Dengan menggabungkan pendidikan pembebasan, andragogi, dan *transformative learning*, kurikulum ini dirancang untuk menciptakan perubahan nyata dalam pola pikir dan perilaku peserta.

Bagian 3

Karakteristik Masyarakat Desa

Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat desa merupakan langkah krusial dalam merancang kurikulum pelatihan literasi media yang relevan dan efektif. Desa bukan sekadar entitas geografis, melainkan ruang sosial yang dibentuk oleh hubungan kekerabatan, struktur kekuasaan lokal, nilai budaya, serta pola komunikasi yang khas. Interaksi masyarakat, cara mereka mengakses informasi, serta proses pengambilan keputusan dalam komunitas sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya tersebut. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai demografi, struktur sosial, pola komunikasi, akses internet, dan pola konsumsi media masyarakat desa Indonesia sebagai dasar bagi perancangan pelatihan literasi media yang sensitif terhadap konteks lokal.

3.1 Demografi dan Struktur Kependudukan

Masyarakat desa Indonesia memiliki keragaman demografis yang luas, namun terdapat sejumlah karakteristik umum yang dapat ditemukan di banyak desa. Secara umum, desa dihuni oleh populasi yang relatif homogen dalam hal

etnis, agama, dan budaya, meskipun di beberapa wilayah tertentu terdapat komunitas multi-etnis yang hidup berdampingan. Komposisi penduduk desa umumnya terdiri dari kelompok usia produktif yang terlibat dalam sektor pertanian, perikanan, atau pekerjaan informal lainnya, serta kelompok usia lanjut yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai adat dan tradisi lokal. Struktur usia yang didominasi kelompok produktif memberikan potensi besar untuk intervensi literasi media, namun tingkat pendidikan yang beragam sering menjadi tantangan dalam menyampaikan materi yang bersifat abstrak atau teknis.

Dalam konteks pendidikan, tingkat pencapaian pendidikan formal di desa umumnya lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan. Banyak masyarakat desa hanya menamatkan pendidikan dasar atau menengah, bahkan sebagian tidak menyelesaikan pendidikan wajib. Perbedaan tingkat pendidikan ini berpengaruh besar terhadap kemampuan masyarakat dalam memahami dan menganalisis pesan media. Kemampuan membaca, menulis, serta literasi fungsional lainnya sangat menentukan bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi, terutama dalam konteks media digital yang membutuhkan keterampilan interpretasi teks dan visual yang kompleks.

Pertumbuhan populasi desa juga dipengaruhi oleh proses migrasi. Banyak desa mengalami arus keluar penduduk usia muda yang merantau ke kota untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Fenomena ini mengubah komposisi populasi, di mana banyak desa ditinggalkan oleh generasi muda yang lebih melek digital, sementara kelompok usia lanjut lebih mendominasi kehidupan sosial desa. Hal ini sering kali membuat desa lebih rentan terhadap hoaks atau penipuan digital karena kelompok usia lanjut cenderung lebih percaya pada otoritas tradisional dan belum familiar dengan praktik verifikasi informasi.

Di sisi lain, kiriman informasi dari para perantau dan interaksi lintas wilayah membawa dinamika baru dalam masyarakat desa. Masyarakat yang bekerja di kota atau luar negeri sering menjadi sumber informasi bagi keluarga di desa, namun informasi yang disampaikan tidak selalu akurat atau lengkap. Hal ini menciptakan rantai transmisi informasi yang tidak selalu dapat diverifikasi secara langsung, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya misinformasi.

Dengan memahami demografi desa yang unik dan kompleks, pelatihan literasi media dapat dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan usia, tingkat pendidikan, pengalaman hidup, serta dinamika migrasi. Pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan ini akan meningkatkan efektivitas pelatihan dan keterlibatan peserta.

3.2 Struktur Sosial, Modal Sosial, dan Kekuatan Relasi

Struktur sosial desa merupakan jaringan yang dibentuk oleh hubungan kekerabatan, kedekatan emosional, nilai adat, dan norma sosial. Struktur ini sangat mempengaruhi cara masyarakat menerima, menilai, dan menyebarkan informasi. Desa umumnya memiliki struktur sosial yang lebih komunal, di mana nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong-royong masih kuat. Ikatan keluarga besar dan hubungan antar rumah tangga membentuk jaringan informasi informal yang berjalan lebih cepat daripada informasi resmi dari pemerintah.

Dalam struktur sosial desa, peran tokoh masyarakat seperti kepala dusun, ketua RT, tokoh agama, guru, dan sesepuh adat sangat penting. Mereka sering menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan sosial maupun dalam menilai kebenaran informasi. Tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh-tokoh ini sangat tinggi, sehingga informasi yang mereka sampaikan sering diterima tanpa mempertanyakan validitasnya. Situasi ini menciptakan potensi besar bagi penyebaran disinformasi jika tokoh

masyarakat tidak memiliki kapasitas literasi media yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan literasi media tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga harus menasar tokoh masyarakat sebagai *gatekeeper* informasi lokal.

Modal sosial desa yang tinggi juga memiliki dua sisi. Di satu sisi, kepercayaan sosial dapat memperkuat kohesi komunitas dan memudahkan mobilisasi masyarakat untuk kegiatan positif, termasuk pelatihan literasi media. Namun, di sisi lain, modal sosial yang tinggi memudahkan penyebaran informasi salah. Pesan yang berasal dari seseorang yang dipercaya, meskipun tidak memiliki basis pengetahuan yang kuat, dapat menyebar dengan sangat cepat.

Relasi kekuasaan dalam desa juga berpengaruh terhadap aliran informasi. Kepala desa dan perangkat desa sering menjadi pusat rujukan informasi karena peran formal mereka dalam struktur pemerintahan. Namun, hubungan kekuasaan ini juga dapat menimbulkan risiko jika proses komunikasi tidak transparan atau jika perangkat desa tidak memiliki kecakapan literasi media untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Pelatihan literasi media perlu mempertimbangkan dinamika kekuasaan ini dalam penyusunan strategi implementasi di lapangan agar tidak menghambat partisipasi masyarakat.

Selain itu, struktur sosial desa sering kali dipengaruhi oleh organisasi keagamaan, kelompok tani, kelompok pemuda, dan kelompok perempuan yang memiliki peran penting dalam aktivitas sosial. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan pelatihan literasi media. Pemahaman terhadap peran mereka dalam jaringan informasi lokal dapat membantu fasilitator merancang pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual.

3.3 Pola Komunikasi Masyarakat Desa

Pola komunikasi masyarakat desa memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat urban. Komunikasi interpersonal, tatap muka, dan musyawarah menjadi cara utama dalam bertukar informasi. Kebiasaan berkumpul di warung kopi, pos ronda, atau kegiatan adat menjadi arena penting bagi aliran informasi. Dalam konteks digital, pola komunikasi ini berpindah ke platform seperti WhatsApp Group, yang menjadi perpanjangan ruang sosial desa.

Informasi di desa sering kali bergerak melalui sistem komunikasi berlapis: dari tokoh masyarakat ke keluarga inti, kemudian menyebar melalui grup keluarga atau grup RT. Kecepatan penyebaran informasi ini sangat tinggi karena komunikasi interpersonal masih menjadi basis utama, meskipun medium yang digunakan telah berubah dari lisan ke digital. Kondisi ini memudahkan penyebaran informasi bermanfaat, tetapi juga mempermudah peredaran hoaks yang bersifat sensasional dan emosional.

Pola komunikasi masyarakat desa juga dipengaruhi oleh tradisi lisan. Kemampuan verbal sering kali lebih dominan daripada kemampuan literasi tulisan. Hal ini berpengaruh pada cara masyarakat menafsirkan informasi dari media digital, yang banyak berisi teks panjang, grafik, atau infografis yang membutuhkan literasi visual untuk dipahami. Karena itu, pelatihan literasi media harus memperbanyak metode visual, praktik langsung, dan diskusi kelompok untuk menyesuaikan dengan pola komunikasi yang sudah akrab bagi masyarakat desa.

Selain itu, budaya menghormati orang yang lebih tua, guru, dan pemimpin membuat kritik terhadap informasi yang disampaikan oleh otoritas lokal sulit dilakukan. Norma kesopanan yang tinggi membuat masyarakat enggan mempertanyakan informasi, meskipun ada keraguan. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan literasi media untuk

mendorong keberanian bertanya dan sikap kritis dalam situasi sosial yang tetap menghormati norma budaya.

3.4 Akses Internet dan Infrastruktur Media

Akses internet di desa mengalami perkembangan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, terutama setelah perluasan jaringan 4G dan program digitalisasi nasional. Namun demikian, tingkat aksesibilitas dan kualitas jaringan masih sangat bergantung pada kondisi geografis, distribusi BTS, serta kebijakan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah. Banyak desa yang telah terhubung dengan internet, tetapi koneksi yang tersedia sering kali tidak stabil, memiliki kecepatan rendah, atau hanya tersedia di titik-titik tertentu seperti balai desa, rumah kepala dusun, atau area sekitar menara telekomunikasi. Kondisi ini memengaruhi intensitas penggunaan internet dan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi secara berkelanjutan.

Keterbatasan infrastruktur juga tercermin dalam penguasaan perangkat digital. Sebagian besar masyarakat desa menggunakan *smartphone* sebagai perangkat utama untuk mengakses internet, sementara kepemilikan laptop atau komputer masih sangat rendah. *Smartphone* menjadi gerbang utama informasi, namun juga menjadi kelemahan karena keterbatasan ukuran layar, kemampuan navigasi, dan fitur keamanan yang tidak selalu digunakan secara optimal. Banyak masyarakat desa menggunakan *smartphone* tanpa memperbarui perangkat lunak, tanpa pengaturan verifikasi dua langkah, dan dengan aplikasi yang diunduh dari sumber tidak resmi, sehingga meningkatkan risiko serangan *malware* dan penipuan digital.

Akses internet yang tidak merata juga menciptakan kesenjangan digital internal antar masyarakat desa. Generasi muda cenderung lebih fasih menggunakan internet dan media sosial dibandingkan generasi tua. Perbedaan ini mempengaruhi dinamika informasi, di mana generasi muda

sering menjadi "penerjemah digital" bagi orang tua mereka. Namun, karena mereka sendiri belum memiliki literasi media yang kuat, proses penerjemahan informasi ini tidak selalu membantu mengurangi penyebaran hoaks atau konten negatif.

Di beberapa desa, program desa digital telah mulai berjalan, tetapi implementasinya masih terbatas pada administratif desa seperti layanan surat *online* atau penggunaan aplikasi pemerintah. Pemanfaatan internet untuk edukasi, verifikasi informasi, atau partisipasi publik belum berkembang dengan optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan literasi media yang tidak hanya membekali masyarakat desa dengan pengetahuan, tetapi juga memberi motivasi dan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan akses internet secara produktif.

Akses internet yang terbatas sekaligus membuka ruang bagi metode pelatihan yang kreatif. Fasilitator perlu memperhitungkan kondisi jaringan, memilih media pembelajaran yang tidak membutuhkan *bandwidth* besar, serta menyediakan materi pelatihan yang dapat diakses secara *offline*. Unduhan video edukatif, modul cetak, dan latihan praktis berbasis simulasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi keterbatasan akses internet. Dengan memahami kondisi infrastruktur ini, kurikulum pelatihan dapat dirancang lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas desa.

3.5 Pola Konsumsi Media (WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook)

Pola konsumsi media masyarakat desa menunjukkan ketergantungan tinggi pada platform yang berbasis video pendek, pesan instan, dan konten viral. WhatsApp menjadi platform dominan dalam komunikasi harian. Grup WhatsApp keluarga, grup RT, grup arisan, dan grup komunitas menjadi saluran utama penyebaran informasi. Pola ini menciptakan

sistem komunikasi cepat yang bersifat interpersonal dan emosional, di mana pesan sering diteruskan tanpa diverifikasi. Konten yang mengandung unsur ketakutan, kecemasan, atau harapan biasanya lebih cepat menyebar. Hal ini menjadikan WhatsApp sebagai medium paling rentan terhadap penyebaran hoaks dan misinformasi.

TikTok berkembang pesat sebagai sumber hiburan utama. Banyak masyarakat desa menghabiskan waktu berjam-jam menonton video pendek yang bersifat ringan, lucu, atau bersifat sensasional. TikTok juga menjadi pintu masuk bagi konten edukatif, tetapi mayoritas pengguna lebih banyak menonton konten hiburan daripada konten informatif. Algoritma TikTok yang sangat personal membuat pengguna terjebak dalam pola konsumsi satu arah tanpa banyak variasi perspektif. Tantangan literasi media di TikTok adalah mengembangkan kemampuan kritis terhadap konten yang cepat dan emosional, serta memahami bahwa popularitas tidak selalu berkorelasi dengan kredibilitas.

YouTube tetap menjadi platform yang sangat populer, terutama untuk menonton ceramah agama, tutorial praktis, berita alternatif, dan konten hiburan keluarga. Namun, YouTube juga menjadi sumber penyebaran narasi ekstrem, teori konspirasi, serta konten pseudo-ilmiah yang mudah dipercaya karena disajikan dalam format video yang meyakinkan. Banyak masyarakat desa tidak membedakan antara kanal resmi dan kanal pribadi, sehingga konten dari sumber yang tidak kredibel dianggap sama validnya dengan konten dari media arus utama.

Facebook tetap menjadi ruang interaksi sosial dan sumber konten viral, terutama bagi generasi tua. Grup Facebook desa sering menjadi tempat berbagi informasi lokal seperti kegiatan masyarakat, peringatan keamanan, atau kabar kehilangan. Namun, seperti WhatsApp, Facebook juga penuh dengan konten emosional dan sensasional yang tidak

selalu melalui proses verifikasi. Pola konsumsi ini memperlihatkan bahwa masyarakat desa cenderung mempercayai konten yang muncul berulang-ulang atau dibagikan oleh orang dekat daripada konten dari sumber resmi.

Pola konsumsi media ini menunjukkan perlunya pelatihan literasi media yang berpijak pada kenyataan sehari-hari masyarakat. Pelatihan tidak bisa hanya mengandalkan teori abstrak, tetapi harus menghadirkan contoh konkret dari platform yang paling sering mereka gunakan. Simulasi verifikasi informasi dari WhatsApp, analisis konten TikTok, dan latihan identifikasi misinformasi dari YouTube dapat menjadi strategi efektif untuk membangun keterampilan kritis.

3.6 Implikasi terhadap Pelatihan Literasi Media

Karakteristik masyarakat desa, akses internet, dan pola konsumsi media yang telah dibahas sebelumnya memiliki implikasi langsung terhadap perancangan pelatihan literasi media. Pertama, pelatihan harus dirancang dengan pendekatan partisipatif yang menghargai pengalaman lokal. Penggunaan pendekatan andragogi sangat penting karena peserta pelatihan adalah orang dewasa dengan pengalaman hidup yang beragam. Pelatihan berbasis ceramah satu arah tidak akan efektif; peserta harus dilibatkan melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi kritis terhadap pengalaman mereka sendiri sebagai konsumen media digital.

Kedua, pelatihan harus menggunakan contoh-contoh nyata yang berasal dari lingkungan masyarakat desa. Hoaks tentang bantuan sosial, informasi palsu mengenai pertanian, atau penipuan digital dengan modus undian hadiah adalah fenomena yang dapat dijadikan bahan latihan. Dengan mengangkat contoh yang dekat dengan kehidupan peserta, pelatihan akan terasa relevan dan lebih mudah dipahami.

Ketiga, pelatihan harus memperhatikan keterbatasan teknis. Infrastruktur internet yang tidak stabil mengharuskan fasilitator menyiapkan materi pelatihan dalam format yang dapat diakses secara offline. Modul cetak, video pendek yang bisa diunduh, dan latihan praktis berbasis gambar dapat menjadi pilihan yang efektif. Selain itu, durasi pelatihan harus menyesuaikan dengan ritme kehidupan desa, seperti jadwal kerja, musim panen, dan kegiatan adat.

Keempat, pelatihan literasi media harus melibatkan tokoh masyarakat sebagai bagian dari strategi penyebaran informasi. Karena tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam aliran informasi lokal, meningkatkan kapasitas mereka dalam literasi media dapat memberikan dampak lebih luas bagi komunitas. Tokoh masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang membantu mengedukasi masyarakat lain dan mencegah penyebaran informasi keliru.

Kelima, pelatihan harus memperhatikan dinamika sosial desa. Norma kesopanan, relasi kekuasaan, dan struktur sosial perlu dipahami agar pelatihan dapat dilaksanakan dengan efektif tanpa menciptakan resistensi atau jarak sosial antara fasilitator dan peserta. Pendekatan yang inklusif, dialogis, dan sensitif budaya menjadi faktor kunci keberhasilan pelatihan.

Akhirnya, pelatihan literasi media harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kompetensi kritis yang berkelanjutan. Pelatihan harus memungkinkan peserta mengembangkan kebiasaan baru dalam memeriksa informasi, berdiskusi secara sehat, dan mengambil peran aktif sebagai masyarakat digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pelatihan literasi media dapat memberikan dampak transformatif yang nyata bagi masyarakat desa.

Bagian 4

Permasalahan Literasi Media Masyarakat Desa

Permasalahan literasi media yang dihadapi masyarakat desa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang membentuk cara masyarakat mengakses, memahami, dan menanggapi informasi. Meskipun akses internet di desa telah meningkat pesat, perkembangan kemampuan kritis masyarakat dalam mengolah informasi tidak berjalan seimbang dengan arus informasi digital yang masuk. Akibatnya, masyarakat desa sering kali menjadi sasaran empuk berbagai bentuk disinformasi, penipuan, konten merugikan, serta pengaruh media digital yang tidak sehat. Bab ini menguraikan beberapa permasalahan utama literasi media yang muncul secara konsisten dalam berbagai studi empiris, observasi lapangan, dan laporan nasional.

4.1 Hoaks dan Disinformasi

Hoaks dan disinformasi merupakan dua fenomena yang semakin sering muncul dalam kehidupan masyarakat digital, termasuk di kawasan pedesaan yang sebelumnya

relatif terlindungi dari arus informasi global. Dalam konteks pelatihan literasi media, memahami karakter, definisi, dan anatomi keduanya menjadi langkah wajib sebelum peserta diajak membahas teknik verifikasi dan mitigasi. Hoaks dan disinformasi bukan sekadar “berita palsu”, tetapi ekspresi dari struktur informasi yang dipengaruhi motif ekonomi, politik, psikologis, dan sosial budaya. Subbagian ini menguraikan definisi akademik, kriteria teknis, serta pola penyebaran kedua fenomena ini dalam masyarakat desa.

Secara terminologis, hoaks merujuk pada informasi palsu yang dikemas seolah-olah benar, namun sebenarnya tidak memiliki dasar fakta, tidak diverifikasi, dan sering kali disertai unsur sensasional yang mampu memicu respons emosional. Hoaks biasanya lahir dari kombinasi kesalahan persepsi, kurangnya literasi informasi, dan dorongan emosional pembuatnya untuk menyebarkan cerita dramatis yang menarik perhatian. Banyak hoaks di Indonesia tidak muncul dari niat jahat, tetapi dari ketidaktahuan dan kecenderungan manusia untuk membagikan informasi yang dianggap “penting” tanpa mengecek kebenarannya.

Berbeda dari hoaks, disinformasi adalah informasi salah yang dibuat atau disebarkan secara sengaja untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Pada disinformasi terdapat unsur intensionalitas, yaitu niat untuk menyesatkan. Disinformasi sering digunakan dalam konteks politik, ekonomi, dan konflik sosial, di mana pihak tertentu memperoleh keuntungan dari terciptanya kekacauan informasi. Sebagai contoh, aktor-aktor tertentu dapat memproduksi narasi palsu mengenai situasi keamanan, harga komoditas, atau kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat.

Dua istilah lain yang perlu dipahami adalah misinformasi dan malinformasi. Misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa niat jahat, misalnya

karena ketidaktahuan atau salah tafsir. Misinformasi sering menjadi jalan masuk bagi hoaks untuk menyebar karena orang-orang cenderung menyampaikan informasi tanpa verifikasi ketika mereka merasa informasi itu urgen atau relevan. Sementara itu, malinformasi adalah informasi benar yang dibocorkan atau dipakai dalam konteks yang merugikan orang lain, misalnya penyebaran data pribadi atau percakapan privat.

Untuk memahami bagaimana hoaks bekerja, penting melihat kriteria umum yang membuat sebuah pesan dapat dikategorikan sebagai hoaks. Ciri pertama adalah ketiadaan sumber yang jelas. Pesan tanpa nama penulis, tanpa tautan ke situs kredibel, atau hanya mencantumkan “katanya”, “dari grup sebelah”, dan “ini info A1” biasanya merupakan indikasi kuat hoaks. Ciri kedua adalah ketidaksesuaian tanggal, baik berupa informasi lama yang dikemas ulang seolah-olah baru, atau informasi yang dikaitkan dengan peristiwa yang sebenarnya tidak relevan. Ciri ketiga adalah bahasa persuasif dan emosional yang mengarah pada kepanikan, kemarahan, atau rasa takut. Pencipta hoaks memahami bahwa emosi adalah pintu terbesar untuk mempengaruhi seseorang. Ciri keempat adalah ajakan untuk segera menyebarkan. Hoaks hampir selalu menggunakan frase seperti “sebarlah agar semua tahu” atau “jangan disimpan sendiri”, yang bertujuan mempercepat diseminasi tanpa memberi ruang verifikasi.

Hoaks dan disinformasi juga memiliki anatomi tertentu. Pesan dimulai dari sebuah narasi inti yang mengandung unsur dramatis atau ancaman. Narasi ini dilengkapi klaim-klaim palsu yang mudah dipercaya, lalu diperkuat oleh “otoritas palsu”, misalnya mencatut nama dokter, aparat desa, atau instansi pemerintah. Setelah itu, pesan dikemas dalam struktur yang simpel, mudah diingat, dan sering kali menampilkan gambar pendukung yang terlihat meyakinkan namun sebenarnya berasal dari konteks lain. Penyebaran terjadi melalui kanal yang paling dekat

dengan masyarakat, khususnya WhatsApp, karena keintiman komunikasi keluarga dan grup desa membuat hoaks lebih mudah dipercaya.

Dalam konteks pedesaan, penyebaran hoaks dan disinformasi memiliki karakter sosial yang unik. Desa merupakan komunitas yang erat dan berbasis kepercayaan interpersonal. Informasi yang dikirim oleh tokoh lokal—baik itu ketua RT, pemuka agama, atau perangkat desa—lebih mudah diterima tanpa pertanyaan. Ketika hoaks mampir ke dalam jaringan interpersonal seperti ini, ia tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga memanfaatkan struktur sosial desa. Kehadiran hierarki sosial informal menyebabkan verifikasi dianggap tidak sopan atau tidak perlu, apalagi jika informasi tersebut dibagikan oleh figur yang dihormati. Dalam kasus inilah hoaks menjadi lebih berbahaya karena mereplikasi dirinya melalui jaringan kepercayaan daripada sekadar jaringan digital.

Dari perspektif psikologi sosial, masyarakat desa (dan sebenarnya seluruh manusia) mudah percaya hoaks karena beberapa sebab. Pertama adalah heuristik keakraban, yaitu kecenderungan mempercayai informasi yang sudah sering terlihat, terlepas dari kebenarannya. Kedua adalah bias konfirmasi, keinginan untuk memperkuat keyakinan yang sudah dimiliki. Jika seseorang meyakini bahwa pupuk subsidi sering bermasalah, maka hoaks tentang penghentian pupuk subsidi akan terasa masuk akal. Ketiga adalah dorongan untuk melindungi diri dan keluarga. Banyak hoaks memanfaatkan rasa takut, misalnya hoaks penculikan anak atau hoaks bencana, sehingga orang lebih memilih “berbagi dulu, cek belakangan” demi berjaga-jaga.

Hoaks juga memperoleh kekuatannya dari lingkungan digital yang mempercepat pergerakan informasi. WhatsApp misalnya, memungkinkan pesan menyebar dengan mudah melalui fitur penerusan (*forwarding*). Algoritma media sosial

lain seperti Facebook atau TikTok memperkuat konten emosional yang cepat menarik interaksi. Akibatnya, informasi yang menyesatkan sering menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi, yang biasanya datang terlambat, tidak menarik, atau tidak disampaikan melalui kanal yang digunakan masyarakat.

Sementara disinformasi memiliki motif yang lebih terstruktur dan berbahaya. Pelakunya bisa berupa individu yang mencari keuntungan finansial, kelompok yang ingin mempengaruhi opini publik, atau aktor yang hendak memperkeruh situasi sosial. Dalam konteks desa, disinformasi sering muncul dalam isu politik lokal, perebutan jabatan, polemik bantuan sosial, atau konflik tanah. Disinformasi sengaja dimainkan untuk menciptakan kekacauan atau mengalihkan perhatian dari isu sebenarnya.

Dengan demikian, memahami hoaks dan disinformasi bukan hanya soal membedakan benar atau salah. Ia mencakup pemahaman tentang struktur bahasa, psikologi manusia, pola penyebaran, motif sosial-politik, dan dinamika kepercayaan dalam komunitas. Bagi masyarakat desa, kemampuan mengenali hoaks dan disinformasi berarti kemampuan melindungi diri, keluarga, dan komunitas dari ancaman informasi yang dapat merusak tatanan sosial. Literasi media hadir untuk mengembalikan kontrol kepada masyarakat, bukan sekadar mengajarkan teknik memeriksa informasi, tetapi juga membantu mereka membangun kesadaran kritis terhadap cara kerja dunia digital yang semakin kompleks.

4.2 Penipuan *Online* dan Kejahatan Digital

Perkembangan teknologi digital membawa peluang besar bagi masyarakat desa untuk terhubung dengan dunia luar, namun pada saat yang sama membuka ruang baru bagi berbagai bentuk penipuan *online* dan kejahatan digital yang semakin canggih. Kejahatan digital tidak lagi terbatas pada peretasan tingkat tinggi atau manipulasi sistem keuangan

berskala besar. Di tingkat akar rumput, ancaman yang paling nyata justru hadir dalam bentuk pesan-pesan sederhana di WhatsApp, tautan palsu, aplikasi ilegal, hingga teknik manipulasi psikologis yang memanfaatkan emosi dan kepercayaan masyarakat. Subbagian ini menguraikan definisi, karakter, mekanisme, dan anatomi kejahatan digital yang paling sering menjebak masyarakat desa, serta pola kerentanannya.

Penipuan *online* pada dasarnya merupakan tindakan memperoleh keuntungan melalui tipu daya berbasis teknologi. Pelakunya memanfaatkan keterbatasan pengetahuan digital masyarakat, celah keamanan perangkat, atau kecenderungan psikologis manusia untuk percaya pada informasi yang memberikan harapan atau menimbulkan rasa takut. Salah satu ciri utama penipuan *online* adalah penggunaan teknik *social engineering*, yaitu cara memanipulasi korban agar memberikan data, uang, atau akses tanpa menyadarinya. Kejahatan digital masa kini bekerja bukan dengan meretas sistem, melainkan dengan “meretas manusia,” yaitu memanfaatkan kelemahan perilaku manusia dalam memahami informasi.

Dalam konteks masyarakat desa, penipuan *online* sering muncul dalam bentuk pesan WhatsApp atau SMS yang menawarkan hadiah, mencatut nama instansi resmi, atau memanfaatkan identitas palsu untuk membuat korban merasa percaya. Kasus “hadiah undian” palsu adalah salah satu modus yang paling sering ditemui. Pelaku menyampaikan bahwa korban memenangkan hadiah besar dan diminta mengirimkan kode OTP, nomor rekening, atau biaya administrasi. Begitu korban memberikan OTP, akun WhatsApp-nya dibajak, lalu digunakan untuk menipu kontak-kontak lain. Inilah bentuk penipuan berantai yang menyebar cepat di desa karena jaringan keluarga dan sosial yang saling terhubung erat.

Jenis penipuan lain yang kian merebak adalah penipuan pinjaman *online*. Banyak masyarakat desa terjebak karena iklan pinjaman muncul di Facebook atau TikTok dengan syarat yang terlihat mudah. Tanpa disadari, mereka diarahkan kepada aplikasi ilegal yang tidak terdaftar dan meminta akses penuh ke foto, daftar kontak, serta dokumen pribadi. Ketika korban telat membayar, pelaku mulai mengirimkan ancaman, menyebarkan foto pribadi, atau menghubungi semua kontak korban untuk mempermalukan mereka. Kejahatan digital semacam ini bekerja dengan mengandalkan rasa malu dan ketakutan, membuat korban enggan melapor kepada keluarga atau aparat desa.

Selain itu, penipuan berbasis *phishing* juga menjadi ancaman besar. *Phishing* adalah upaya mencuri data melalui tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Dalam banyak kasus di desa, tautan ini disertai narasi seperti “validasi bantuan sosial” atau “pendaftaran BLT tahap baru”. Masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan atau takut kehilangan haknya cenderung menekan tautan tersebut tanpa memeriksa. Begitu data dimasukkan, pelaku dapat mengakses akun media sosial, aplikasi perbankan, atau data sensitif lainnya. Kasus *phishing* semakin marak karena pelaku mengeksploitasi rasa cemas atau urgensi korban.

Tidak hanya itu, kejahatan digital juga semakin berkembang melalui WhatsApp Business palsu yang menawarkan investasi bodong. Masyarakat desa menjadi sasaran empuk karena tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat sangat menggoda di tengah kebutuhan ekonomi yang tinggi. Pelaku memanfaatkan citra keberhasilan palsu melalui *screenshot* transfer, testimoni, atau video pendek yang tampak meyakinkan. Setelah korban menyetor uang, akun pelaku menghilang dan komunikasi terputus. Pola serupa terjadi dalam penipuan toko *online* palsu yang memanfaatkan *marketplace* informal atau promosi lewat grup Facebook desa.

Kejahatan digital di desa juga sering terkait penyalahgunaan identitas. Pelaku membuat akun Facebook atau WhatsApp yang mencatut foto dan nama perangkat desa, guru, atau tokoh agama, lalu meminta dana dengan alasan mendesak. Masyarakat desa yang sangat menghormati figur otoritatif cenderung percaya dan tidak memverifikasi lebih jauh. Ini menunjukkan bagaimana kejahatan digital tidak hanya memanfaatkan celah teknologi, tetapi juga memanfaatkan struktur kepercayaan budaya.

Dalam konteks yang lebih serius, terdapat bentuk kejahatan digital yang mengarah kepada eksploitasi seksual daring, terutama pada anak-anak dan remaja. Pelaku menggunakan akun palsu untuk mengajak anak bertukar foto pribadi, mengancam, atau bahkan melakukan pemerasan. Kasus seperti ini sangat sensitif di desa karena korban sering merasa malu atau takut membuka diri, sementara orang tua tidak memiliki perangkat pemahaman untuk membedakan interaksi digital yang sehat dan yang berbahaya. Kerentanan ini semakin diperparah oleh minimnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai, terutama setelah ponsel pintar menjadi lebih terjangkau.

Kejahatan digital di desa juga dapat berbentuk penipuan pertanian, seperti penjualan pupuk palsu, bibit abal-abal, atau obat tanaman yang tidak sesuai klaim. Pelaku memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau petani dan menjanjikan hasil panen yang lebih tinggi. Ketika barang diterima, kualitasnya tidak sesuai, dan pelaku sudah tidak dapat dihubungi. Penipuan jenis ini memberikan dampak ekonomi langsung kepada petani dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan digital yang seharusnya membawa kemajuan.

Jika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar penipuan *online* di desa tidak muncul tiba-tiba. Ia berkembang dalam ekosistem digital yang memperkuat pesan-pesan promotif,

sensasional, dan emosional, yang sering kali ditampilkan oleh algoritma karena menarik perhatian. Ketika masyarakat desa berulang kali melihat iklan investasi, postingan hadiah, atau pesan promosi yang serupa, persepsi mereka terhadap peluang digital menjadi bias. Repetisi ini menormalisasi janji-janji yang tidak realistis dan mengurangi sensitivitas mereka terhadap risiko penipuan.

Secara psikologis, masyarakat desa sering rentan terhadap penipuan digital karena faktor kepercayaan interpersonal yang tinggi. Di desa, hubungan sosial dibangun atas dasar rasa saling percaya, dan nilai itu terbawa ke ruang digital. Ketika seseorang mengirim pesan yang mencatut nama tokoh lokal, masyarakat cenderung menganggap pesan itu benar. Selain itu, tekanan ekonomi membuat masyarakat lebih mudah percaya pada tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat, sementara literasi digital yang rendah menghambat mereka membedakan tawaran yang realistis dan yang berbahaya.

Dengan melihat berbagai bentuk kejahatan digital ini, dapat disimpulkan bahwa penipuan *online* bukan sekadar masalah teknis, tetapi masalah struktural yang melibatkan dinamika sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi. Pelatihan literasi media bagi masyarakat desa harus mempersiapkan peserta memahami pola umum penipuan digital, mengenali taktik manipulatif, dan membangun kecakapan kritis dalam menghadapi tawaran, ancaman, atau tekanan emosional yang datang melalui ponsel mereka. Kesadaran kritis menjadi benteng utama masyarakat untuk melindungi diri, keluarga, dan komunitas dari ancaman digital di era konektivitas yang semakin intens.

4.3 Radikalisme Digital dan Polarisasi Sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang digital di Indonesia telah menjadi arena baru bagi penyebaran paham radikal dan munculnya polarisasi sosial. Radikalisme digital

merujuk pada proses penyebaran ideologi ekstrem melalui media daring yang bertujuan menggoyahkan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan kohesi sosial masyarakat. Jika pada masa lalu proses radikalisasi dilakukan secara tatap muka dan terorganisasi, kini ia berlangsung secara lebih halus, terfragmentasi, dan masif melalui media sosial, kanal pesan instan, dan situs-situs propaganda yang mudah diakses oleh siapa pun, termasuk masyarakat desa.

Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari karakteristik media digital itu sendiri yang bersifat terbuka, cepat, dan sangat bergantung pada algoritma. Masyarakat desa yang sebelumnya mengandalkan komunikasi lisan dan media konvensional kini dihadapkan pada arus informasi yang tak terbendung. Di tengah keterbatasan literasi digital dan minimnya kemampuan verifikasi, ruang digital sering kali menjadi tempat subur bagi tumbuhnya sikap intoleran, prasangka sosial, dan bahkan kekerasan simbolik. Dalam konteks ini, radikalisme digital tidak selalu hadir dalam bentuk ajakan eksplisit untuk berperang atau melakukan kekerasan, tetapi bisa berupa konten yang perlahan menanamkan benih kebencian, mempersempit makna agama, atau menegaskan perbedaan pandangan.

Secara konseptual, radikalisme digital dapat dipahami sebagai proses ideologisasi yang berlangsung melalui mekanisme komunikasi daring, di mana individu secara bertahap menerima, meyakini, dan kemudian menyebarluaskan pandangan ekstrem melalui media digital. Proses ini sering kali dimulai dari interaksi ringan—misalnya menonton video ceramah, membaca unggahan keagamaan, atau bergabung dengan grup diskusi daring—yang secara bertahap mengarahkan individu pada jaringan tertutup dengan narasi tunggal. Konten yang disebarluaskan kerap menggunakan gaya bahasa yang emosional, visual yang kuat, serta simbol-simbol agama atau nasionalisme yang

dimanipulasi untuk menggugah rasa identitas dan solidaritas kelompok.

Bagi masyarakat desa, daya tarik radikalisme digital sering kali berakar pada dua hal: rasa keterasingan sosial dan pencarian makna hidup. Dalam situasi ekonomi yang sulit, ketimpangan informasi yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai, ruang digital menjadi tempat mencari jawaban atas berbagai kegelisahan. Ketika informasi yang diperoleh cenderung hitam-putih dan penuh janji kepastian moral, masyarakat mudah tertarik pada narasi yang menawarkan penjelasan sederhana atas persoalan kompleks. Dalam kondisi seperti inilah, radikalisme menemukan momentumnya.

Selain memunculkan sikap ekstrem, radikalisme digital juga berkelindan erat dengan fenomena polarisasi sosial. Polarisasi sosial dalam konteks digital dapat diartikan sebagai keterbelahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling menolak dan berkonflik secara ideologis, politik, maupun identitas. Polarisasi tidak hanya tercermin dalam perdebatan di dunia maya, tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan sosial di desa. Perpecahan antar masyarakat, saling curiga antara kelompok keagamaan, serta menguatnya stereotip terhadap “orang luar” menjadi gejala yang kini sering ditemui di banyak desa di Indonesia.

Media sosial memainkan peran sentral dalam memperkuat polarisasi ini. Melalui algoritma yang mengutamakan keterlibatan pengguna, media sosial cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan pandangan atau emosi pengguna. Akibatnya, masyarakat hanya terekspos pada pandangan yang memperkuat keyakinannya sendiri, sementara pandangan yang berbeda dianggap salah atau bahkan berbahaya. Fenomena ini disebut sebagai filter *bubble* atau *echo chamber*, yaitu kondisi ketika seseorang hidup dalam ruang gema informasi yang tertutup

dan hanya mendengar suara-suara yang sama. Dalam masyarakat desa yang hubungan sosialnya relatif homogen, kondisi ini diperparah oleh kuatnya jaringan sosial berbasis kekeluargaan atau keagamaan. Akibatnya, informasi yang salah atau bernuansa kebencian dengan cepat menyebar dan diterima tanpa banyak pertanyaan.

Dalam konteks tertentu, polarisasi sosial di ruang digital bahkan telah memecah hubungan sosial yang sebelumnya harmonis. Kasus perpecahan kelompok tani karena perbedaan pandangan politik, konflik antar masyarakat karena isu agama di grup WhatsApp, hingga penolakan terhadap program pemerintah akibat hoaks yang disebarkan lewat media sosial adalah contoh nyata bagaimana radikalisme dan polarisasi digital merusak struktur sosial desa. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya melemahkan kepercayaan sosial (*social trust*), tetapi juga menggerus nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat pedesaan.

Penting untuk disadari bahwa radikalisme digital tidak berdiri sendiri. Ia beroperasi melalui mekanisme yang lebih luas, yaitu ekosistem informasi digital yang diatur oleh logika ekonomi perhatian (*attention economy*). Platform media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin dengan menampilkan konten yang memancing emosi kuat, terutama kemarahan, kebencian, dan ketakutan. Dalam logika ini, konten ekstrem justru memiliki peluang besar untuk viral dan mendapatkan ruang lebih luas dibandingkan konten edukatif atau informatif. Maka dari itu, melawan radikalisme digital tidak cukup hanya dengan memberikan informasi tandingan, tetapi juga dengan memahami bagaimana sistem digital itu sendiri bekerja.

Upaya peningkatan literasi media di desa perlu diarahkan tidak hanya pada kemampuan teknis menggunakan gawai, tetapi juga pada kemampuan kritis

untuk memahami bagaimana pesan digital dikonstruksi dan bagaimana emosi dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Pendidikan literasi media harus mengajarkan masyarakat desa untuk bertanya: siapa yang membuat pesan ini, apa motif di baliknya, bagaimana cara pesan ini membuat saya merasa marah atau takut, dan apa dampaknya bagi hubungan sosial di sekitar saya? Dengan cara itu, masyarakat tidak lagi menjadi konsumen pasif dari arus informasi, melainkan subjek yang sadar dan reflektif.

Selain pendidikan kritis, pendekatan komunitas juga penting dalam mengatasi radikalisme digital. Fasilitator pelatihan literasi media dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta lembaga adat untuk memperkuat nilai-nilai lokal yang menekankan kebersamaan dan toleransi. Dialog lintas kelompok di desa perlu difasilitasi agar masyarakat memiliki ruang aman untuk bertukar pandangan dan membangun empati sosial. Pendekatan berbasis komunitas ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan represif seperti pemblokiran konten, karena menyentuh akar kesadaran dan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat.

Dengan demikian, radikalisme digital dan polarisasi sosial bukan semata ancaman teknologi, melainkan cermin dari kegagalan sistem pendidikan dan komunikasi publik dalam membangun kesadaran kritis masyarakat. Literasi media menjadi kunci untuk memutus rantai tersebut—sebuah proses pembelajaran yang tidak berhenti pada kemampuan mengenali hoaks, tetapi meluas pada kesadaran bahwa setiap pesan digital membawa nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Dalam konteks masyarakat desa, literasi media harus dihadirkan sebagai proses pemberdayaan: menguatkan nalar kritis, menumbuhkan empati, dan memulihkan ruang sosial yang terfragmentasi akibat pengaruh algoritma dan ideologi ekstrem.

4.4 Judi Online dan Ketergantungan Digital

Fenomena judi *online* telah menjadi salah satu problem sosial paling serius yang muncul seiring dengan penetrasi internet hingga ke wilayah pedesaan. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik judi berbasis digital berkembang pesat, menembus batas-batas usia, profesi, dan wilayah. Aktivitas ini tidak lagi eksklusif bagi kalangan tertentu di kota besar, melainkan telah menyusup hingga ke ruang-ruang pribadi masyarakat desa melalui telepon genggam yang terkoneksi dengan internet murah dan media sosial. Judi *online* kini menjadi bagian dari kehidupan digital sehari-hari yang sering kali disamakan sebagai hiburan, permainan, atau bahkan peluang ekonomi baru.

Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi upaya literasi media di tingkat masyarakat desa. Sebab, di balik layar permainan yang tampak ringan dan menghibur, judi *online* menyimpan struktur manipulatif yang sistematis. Banyak masyarakat desa, terutama laki-laki muda, terjerumus ke dalam lingkaran ketergantungan digital tanpa sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang dijebak oleh sistem algoritmik yang dirancang untuk menciptakan perilaku adiktif. Dalam konteks ini, literasi media tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengenali informasi palsu, tetapi juga sebagai alat untuk memahami bagaimana teknologi digital dapat mengendalikan perilaku manusia melalui mekanisme psikologis dan ekonomi yang halus.

Secara konseptual, judi *online* dapat dipahami sebagai bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat digital seperti telepon genggam, tablet, atau komputer. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk permainan—mulai dari taruhan bola, kasino daring, *slot games*, hingga permainan sederhana dengan sistem undian berbasis uang digital. Sementara itu, ketergantungan digital merujuk pada kondisi di mana individu kehilangan

kendali terhadap penggunaan perangkat digitalnya, baik dalam bentuk kecanduan terhadap media sosial, gim daring, maupun aktivitas digital lain yang menguras waktu, perhatian, dan emosi.

Kedua fenomena ini berkelindan dan saling memperkuat. Judi *online* menciptakan ruang adiksi yang melibatkan emosi intens seperti harapan, ketegangan, dan euforia sesaat, sementara ketergantungan digital menyediakan infrastruktur perilaku yang membuat seseorang terus-menerus terhubung dan sulit lepas dari layar. Kombinasi keduanya membentuk siklus psikologis yang disebut *compulsive digital loop*—suatu kondisi di mana pengguna terus mencari rangsangan digital baru untuk mendapatkan sensasi emosional yang sama, meskipun ia tahu bahwa hasilnya merugikan.

Dalam masyarakat desa, kerentanan terhadap judi *online* dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial dan ekonomi. Pertama, adanya kesenjangan literasi finansial dan digital, membuat banyak masyarakat tidak memahami bagaimana sistem taruhan daring beroperasi. Mereka mudah percaya bahwa kemenangan pertama adalah tanda “keberuntungan”, padahal secara sistematis algoritma permainan dirancang untuk memberikan *reward* kecil di awal guna memancing keterlibatan lebih lanjut. Kedua, situasi ekonomi yang tidak stabil sering kali mendorong masyarakat mencari penghasilan tambahan dengan cara instan. Judi *online*, yang menjanjikan keuntungan besar hanya dengan modal kecil, menawarkan ilusi harapan ekonomi di tengah keterbatasan lapangan kerja di desa. Ketiga, faktor sosial dan budaya seperti waktu luang yang panjang, lemahnya pengawasan sosial, dan munculnya komunitas daring sesama pemain turut memperkuat normalisasi praktik perjudian di ruang digital.

Dampak sosial ekonomi dari maraknya judi *online* di pedesaan sangat signifikan. Banyak kasus menunjukkan

bahwa aktivitas ini menyebabkan menurunnya produktivitas kerja, meningkatnya utang rumah tangga, bahkan keretakan relasi keluarga. Ketika seseorang telah mengalami ketergantungan, sebagian besar waktu dan energinya tersedot untuk memantau hasil taruhan, mencari pinjaman, atau mengejar kekalahan sebelumnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan bentuk kemiskinan baru—kemiskinan digital, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan teknologi yang digunakannya sendiri. Fenomena ini memperparah ketimpangan sosial di desa, karena individu yang terjerumus dalam judi *online* tidak hanya kehilangan sumber daya ekonomi, tetapi juga kehilangan kontrol atas waktu, perhatian, dan kepercayaannya terhadap orang lain.

Lebih jauh, ketergantungan digital yang lahir dari praktik judi *online* memperlemah kapasitas reflektif masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Ketika perangkat digital tidak lagi menjadi alat bantu, melainkan sumber kepuasan emosional, maka teknologi telah mengambil alih fungsi manusia dalam membuat keputusan. Individu yang kecanduan tidak lagi menggunakan media untuk tujuan produktif atau komunikatif, melainkan sebagai mekanisme pelarian dari kenyataan hidup yang sulit. Dalam konteks desa, hal ini menjadi sangat berbahaya karena dapat memutus relasi sosial yang selama ini menjadi penopang kehidupan kolektif, seperti gotong royong, kerja bersama, dan solidaritas ekonomi lokal.

Dari perspektif literasi media, judi *online* dan ketergantungan digital merupakan bentuk kolonialisme baru di ruang maya—di mana masyarakat pengguna tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi komoditas bagi industri digital global. Platform judi daring, yang sebagian besar berbasis di luar negeri, mendapatkan keuntungan besar dari perilaku pengguna di desa-desa yang tidak memiliki perlindungan hukum dan kesadaran digital yang cukup. Ini

menunjukkan bahwa literasi media di era digital harus melampaui sekadar kemampuan mengenali konten, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap ekonomi digital dan struktur kekuasaan yang bekerja di balik media.

Untuk menanggulangi masalah ini, pelatihan literasi media di desa perlu dirancang dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Fasilitator dapat memulai dengan menggali pengalaman masyarakat terkait penggunaan media digital, kemudian membimbing mereka untuk menganalisis motif ekonomi di balik permainan daring. Pendekatan Paulo Freire tentang pendidikan kritis dapat diterapkan dengan mengajak peserta membaca realitas sosialnya sendiri melalui media. Pertanyaan seperti “mengapa orang desa mudah percaya bahwa judi *online* bisa membuat kaya?”, “siapa yang sebenarnya diuntungkan dari aktivitas ini?”, dan “bagaimana dampaknya terhadap hubungan sosial di kampung kita?” dapat membuka ruang dialog reflektif yang memicu kesadaran kritis.

Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan masyarakat perlu memperkuat ekosistem digital *well-being* di pedesaan. Program pelatihan dapat mencakup pembahasan tentang manajemen waktu digital, pengenalan mekanisme psikologis kecanduan, serta simulasi bagaimana algoritma aplikasi bekerja dalam menciptakan rasa penasaran terus-menerus. Penguatan nilai-nilai lokal seperti kesederhanaan, kerja keras, dan solidaritas ekonomi dapat menjadi dasar moral untuk menolak gaya hidup instan yang ditawarkan oleh judi *online*.

Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam menghadapi judi *online* dan ketergantungan digital bukanlah soal teknologi, tetapi soal kesadaran. Masyarakat desa perlu menyadari bahwa setiap klik, setiap permainan, dan setiap menit yang dihabiskan di depan layar adalah bentuk investasi emosional dan waktu yang memiliki konsekuensi sosial.

Literasi media yang sejati bukan sekadar kemampuan mengenali bahaya di dunia maya, tetapi kemampuan untuk menempatkan diri secara etis di dalam dunia digital yang penuh jebakan algoritmik.

Dengan demikian, pelatihan literasi media yang mengangkat tema judi *online* dan ketergantungan digital harus diarahkan pada pembentukan kesadaran reflektif, penguatan kontrol diri, dan pemahaman kritis terhadap sistem ekonomi digital. Melalui pendekatan berbasis komunitas yang menggabungkan nilai lokal dan analisis struktural, masyarakat desa dapat menjadi lebih tangguh menghadapi godaan dunia maya, serta mampu menggunakan teknologi secara berdaya, bukan diperdaya.

4.5 Pornografi dan Dampaknya bagi Generasi Muda

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi media masyarakat, termasuk dalam hal akses terhadap konten pornografi. Jika pada masa lalu pornografi hanya dapat diakses melalui majalah, film, atau situs tertentu yang bersifat terbatas, kini ia hadir secara masif, mudah, dan nyaris tanpa batas di ruang digital. Melalui gawai pribadi dan jaringan internet, konten pornografi dapat ditemukan di mana saja—di media sosial, platform berbagi video, bahkan di aplikasi pesan instan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama bagi generasi muda di pedesaan yang semakin terhubung dengan dunia digital tetapi belum memiliki kemampuan literasi media yang memadai untuk memilah dan memahami jenis konten yang mereka konsumsi.

Dalam konteks masyarakat desa, isu pornografi sering kali dipandang sebagai masalah moral belaka, padahal dampaknya jauh lebih kompleks dan multidimensional. Ia bukan hanya menyangkut persoalan etika, tetapi juga persoalan psikologis, sosial, dan pendidikan. Generasi muda desa kini hidup dalam dua dunia yang berkelindan: dunia

nyata yang masih diatur oleh norma sosial tradisional dan dunia digital yang penuh kebebasan tanpa pengawasan. Ketegangan antara dua dunia ini menciptakan ruang abu-abu, di mana nilai-nilai lokal mulai kehilangan relevansinya sementara nilai-nilai baru yang datang dari luar belum sepenuhnya dipahami secara kritis. Dalam kondisi seperti itu, pornografi menjadi pintu masuk bagi proses destruktif terhadap kesadaran, imajinasi, dan cara pandang anak muda terhadap tubuh, relasi, serta makna keintiman.

Secara akademik, pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi visual atau verbal yang menonjolkan eksploitasi tubuh manusia untuk membangkitkan hasrat seksual, tanpa konteks emosional, moral, atau sosial yang sehat. Di ruang digital, bentuk-bentuk pornografi berkembang sangat variatif—mulai dari konten eksplisit seperti video dan gambar, hingga konten terselubung seperti *clickbait* sensual, tantangan viral, atau algoritma rekomendasi yang secara perlahan mengarahkan pengguna ke materi seksual. Fenomena ini diperparah oleh logika *attention economy* yang mendorong produksi konten berdasarkan daya tarik sensual untuk mendapatkan klik, tayangan, dan interaksi. Dengan demikian, pornografi digital tidak hanya menjadi masalah konsumsi pribadi, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi digital global yang memanfaatkan kelemahan psikologis manusia untuk memperoleh keuntungan finansial.

Bagi generasi muda di pedesaan, keterpaparan terhadap pornografi memiliki sejumlah dampak serius. Pertama, dari sisi psikologis, konsumsi pornografi dapat menimbulkan distorsi persepsi terhadap seksualitas dan hubungan manusia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa paparan pornografi berulang pada usia muda dapat menurunkan sensitivitas empati, meningkatkan perilaku impulsif, serta mengubah cara berpikir tentang tubuh dan keintiman. Anak muda yang sering menonton pornografi cenderung memandang hubungan seksual sebagai aktivitas

fisik semata, bukan sebagai ekspresi kasih sayang atau tanggung jawab sosial.

Kedua, dari sisi sosial dan moral, pornografi dapat merusak struktur nilai yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat desa. Di banyak komunitas pedesaan, nilai kesopanan, penghormatan terhadap tubuh, dan keterbukaan pembicaraan soal seksualitas masih dianggap tabu. Ketika generasi muda mengonsumsi konten pornografi secara diam-diam, muncul jurang komunikasi antara mereka dan orang dewasa. Hal ini menyebabkan anak muda tidak mendapatkan ruang untuk membicarakan isu-isu seksual secara sehat dan edukatif, sementara informasi yang mereka terima sebagian besar berasal dari sumber-sumber yang menyesatkan di dunia maya. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan generasi yang bingung antara rasa ingin tahu dan rasa bersalah, serta kehilangan kemampuan untuk membangun relasi yang bermakna dengan lawan jenisnya.

Ketiga, dari sisi pendidikan dan produktivitas, pornografi digital berpotensi menurunkan fokus belajar dan motivasi kerja. Dalam banyak kasus, ketergantungan terhadap pornografi membuat anak muda sulit mengatur waktu, mengalami gangguan konsentrasi, dan bahkan menarik diri dari interaksi sosial. Di desa-desa yang kini mulai terhubung dengan jaringan internet, fenomena ini semakin terlihat: pelajar yang menghabiskan waktu larut malam menonton video di ponsel, buruh muda yang mencuri waktu kerja untuk mengakses situs hiburan seksual, hingga meningkatnya peristiwa kekerasan seksual antar remaja akibat imitasi perilaku yang mereka lihat di media digital.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena sistem algoritmik media sosial dan platform digital secara diam-diam memperkuat keterpaparan terhadap konten seksual. Algoritma rekomendasi dirancang untuk memantau perilaku pengguna—apa yang mereka klik, tonton, atau

bagikan—dan kemudian menyajikan konten serupa agar pengguna tetap bertahan lebih lama di platform tersebut. Dalam logika ini, seorang remaja yang secara tidak sengaja membuka video sensual di media sosial akan lebih mungkin menerima rekomendasi serupa di masa depan, yang secara bertahap memperkuat ketergantungannya. Dengan demikian, pornografi digital bukan hanya masalah moral individu, melainkan juga hasil dari struktur ekonomi digital yang beroperasi di balik layar.

Dalam menghadapi fenomena ini, pendekatan pelatihan literasi media di masyarakat desa tidak dapat dilakukan dengan pola larangan atau moralistik semata. Melarang tanpa memberikan pemahaman hanya akan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih besar. Sebaliknya, pendidikan literasi media perlu diarahkan pada pendekatan reflektif dan dialogis, di mana generasi muda diajak memahami bagaimana konten pornografi dikonstruksi, apa tujuannya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan pribadi serta sosial. Pendekatan Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan dapat digunakan di sini: bukan dengan menghakimi, melainkan dengan membantu anak muda membaca realitas media secara kritis.

Fasilitator pelatihan dapat mengajak peserta untuk menganalisis contoh-contoh konten digital yang mengandung unsur seksual, lalu mendiskusikan makna dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Misalnya, bagaimana media menggambarkan tubuh perempuan, mengapa tubuh dijadikan komoditas untuk menarik perhatian, dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Melalui dialog kritis semacam ini, pelatihan literasi media tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran moral dan empatik.

Lebih jauh, pelatihan literasi media perlu menanamkan pemahaman bahwa seksualitas adalah bagian

alami dari kehidupan manusia yang harus dipahami dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks desa, nilai-nilai lokal seperti malu, sopan, dan hormat kepada orang tua dapat dijadikan pintu masuk untuk membangun etika digital yang relevan. Fasilitator dapat bekerja sama dengan tokoh adat, guru, dan pemuka agama untuk membentuk ruang belajar yang aman dan terbuka bagi remaja, agar mereka dapat mendiskusikan persoalan seksualitas tanpa stigma dan tanpa harus bergantung pada informasi menyesatkan dari internet.

Pada akhirnya, pornografi digital dan ketergantungan terhadapnya adalah bagian dari dinamika besar perubahan budaya di era digital. Ia tidak dapat dihapus dengan larangan semata, melainkan harus dihadapi dengan pengetahuan, kesadaran, dan empati. Pendidikan literasi media di masyarakat desa memiliki peran strategis untuk membantu generasi muda memahami bahwa tubuh bukan sekadar objek visual, melainkan ruang kehidupan yang harus dijaga dengan kesadaran kritis dan nilai kemanusiaan. Melalui pendidikan yang memadukan pemahaman digital dengan nilai-nilai lokal, desa dapat menjadi benteng moral sekaligus ruang pembelajaran bagi generasi yang tumbuh di tengah arus informasi tanpa batas.

4.6 Kurangnya Kemampuan Verifikasi Informasi

Salah satu tantangan paling mendasar dalam upaya membangun literasi media di masyarakat desa adalah rendahnya kemampuan verifikasi informasi. Di tengah derasnya arus informasi yang beredar di media sosial, grup pesan instan, dan kanal digital lainnya, masyarakat sering kali menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan proses pemeriksaan kebenaran. Fenomena ini menjadi akar dari banyak persoalan yang telah dibahas sebelumnya — mulai dari penyebaran hoaks, penipuan digital, radikalisme daring,

hingga polarisasi sosial dan ketergantungan terhadap media digital.

Verifikasi informasi secara sederhana berarti kemampuan seseorang untuk menilai validitas suatu informasi melalui proses pengecekan terhadap sumber, konteks, dan bukti yang mendukung. Dalam konteks pendidikan media, kemampuan ini termasuk dalam dimensi kompetensi kritis, yaitu kemampuan untuk tidak sekadar membaca pesan, tetapi juga memahami bagaimana pesan tersebut dikonstruksi, siapa pembuatnya, dan dengan tujuan apa ia disebarluaskan. Namun, di banyak wilayah pedesaan, kemampuan ini masih sangat terbatas karena kombinasi antara faktor pendidikan, budaya komunikasi, dan struktur sosial yang kuat.

Secara sosiologis, masyarakat desa memiliki karakteristik komunikasi yang berorientasi pada kepercayaan (*trust-based communication*). Informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, atau anggota keluarga yang dianggap berpengaruh cenderung diterima tanpa banyak pertanyaan. Pola komunikasi semacam ini yang di satu sisi memperkuat kohesi sosial, di sisi lain justru melemahkan kemampuan kritis masyarakat terhadap informasi baru. Ketika otoritas kepercayaan berpindah ke ruang digital—misalnya, kepada “ustaz viral” di YouTube, “influencer politik” di TikTok, atau “admin grup WhatsApp keluarga”—maka struktur sosial lama berubah menjadi sistem kepercayaan baru yang tidak lagi berlandaskan pada kedekatan personal, tetapi pada ilusi otoritas digital.

Di sisi lain, rendahnya kemampuan verifikasi informasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sumber informasi yang kredibel. Banyak masyarakat desa yang belum terbiasa menggunakan mesin pencari dengan efektif, memeriksa kredibilitas situs berita, atau membedakan antara konten jurnalistik dan opini pribadi. Situasi ini

diperparah oleh fenomena banjir informasi yang menyebabkan kelelahan kognitif dan membuat individu memilih untuk mempercayai informasi yang paling mudah diakses atau paling sering muncul di beranda mereka. Akibatnya, kebenaran tidak lagi diukur dari bukti, tetapi dari frekuensi paparan dan kesesuaian dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya (*confirmation bias*).

Dampak sosial dari rendahnya kemampuan verifikasi informasi sangat luas. Dalam konteks ekonomi, masyarakat mudah menjadi korban penipuan investasi bodong, undian palsu, atau pinjaman daring ilegal. Dalam konteks politik, mereka mudah diprovokasi oleh narasi sektarian menjelang pemilihan umum. Dalam konteks kesehatan, mereka menjadi sasaran empuk disinformasi seputar vaksin, obat tradisional, atau isu pangan. Bahkan dalam konteks sosial yang lebih kecil, seperti hubungan antar masyarakat desa, berita bohong yang disebarkan melalui grup percakapan dapat memicu konflik dan perpecahan yang merusak harmoni sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Pendidikan literasi media di pedesaan perlu merespons persoalan ini secara sistematis. Verifikasi informasi tidak bisa hanya diajarkan sebagai keterampilan teknis—misalnya dengan memperkenalkan situs *fact-checking* atau teknik mencari sumber asli—tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap dan kesadaran. Fasilitator pelatihan perlu menanamkan nilai skeptisisme konstruktif, yakni keberanian untuk mempertanyakan tanpa kehilangan rasa hormat, serta kemampuan untuk menunda penilaian sampai bukti yang memadai diperoleh. Pendekatan ini sangat relevan dengan prinsip pendidikan orang dewasa (*andragogi*), di mana pembelajaran bukan sekadar transfer informasi, tetapi proses dialog antara pengalaman dan pengetahuan baru.

Dalam pelatihan berbasis komunitas, kemampuan verifikasi informasi dapat ditumbuhkan melalui kegiatan

yang melibatkan pengalaman nyata masyarakat. Misalnya, peserta dapat diajak untuk menganalisis berita viral yang beredar di grup WhatsApp desa, memeriksa kebenaran foto atau video yang disebar, serta mendiskusikan dampak sosial dari penyebaran informasi tersebut. Pendekatan reflektif ini membuat peserta tidak hanya belajar “cara mengecek berita”, tetapi juga memahami mengapa berita palsu bisa menyebar dan apa yang dapat mereka lakukan untuk menghentikannya.

Lebih jauh, pelatihan juga perlu menumbuhkan kesadaran bahwa verifikasi informasi adalah bentuk tanggung jawab sosial. Di tengah dunia digital yang saling terhubung, setiap masyarakat desa memiliki peran sebagai produsen sekaligus konsumen informasi (*prosumer*). Dengan menyebarkan berita yang benar dan menahan diri dari berbagi kabar yang belum jelas, masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga integritas sosial komunitasnya. Nilai gotong royong yang menjadi ciri khas desa dapat dihidupkan kembali dalam konteks baru ini—yakni gotong royong dalam menjaga kebenaran di ruang digital.

Dengan demikian, kemampuan verifikasi informasi bukan hanya persoalan kognitif, tetapi juga persoalan etika, sosial, dan budaya. Literasi media yang mengajarkan keterampilan ini secara mendalam akan membantu masyarakat desa membangun ekosistem digital yang lebih sehat, di mana kepercayaan sosial tidak lagi menjadi alat manipulasi, tetapi fondasi untuk membangun komunikasi yang kritis dan berkeadilan.

Bab ini telah menggambarkan secara menyeluruh berbagai tantangan utama yang dihadapi masyarakat desa dalam era digital, terutama yang berkaitan dengan rendahnya literasi media dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

Dimulai dari paparan mengenai hoaks dan disinformasi, kita memahami bahwa akar persoalan bukan semata ketiadaan akses terhadap informasi, melainkan ketidakmampuan masyarakat untuk memahami, menafsirkan, dan memverifikasi pesan yang mereka terima.

Kemudian, pada pembahasan tentang penipuan online dan kejahatan digital, kita melihat bagaimana logika ekonomi digital telah menjadikan masyarakat desa sebagai sasaran empuk eksploitasi berbasis data dan emosi. Radikalisme digital dan polarisasi sosial memperlihatkan dimensi ideologis dari arus informasi yang tak terkendali, di mana media tidak hanya menginformasikan tetapi juga membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Fenomena judi online dan ketergantungan digital menyingkap sisi psikologis dari hubungan manusia dengan teknologi—bahwa perangkat digital bukan sekadar alat, melainkan juga ruang yang mampu menciptakan adiksi dan kehilangan kendali.

Sementara itu, paparan tentang pornografi digital menunjukkan dimensi kultural dan moral dari transformasi media, di mana generasi muda menghadapi dilema antara kebebasan digital dan krisis nilai. Semua persoalan tersebut berpuncak pada satu akar yang sama: kurangnya kemampuan verifikasi informasi sebagai bentuk kelemahan struktural dalam kesadaran kritis masyarakat.

Dengan demikian, Bab 4 bukan sekadar daftar masalah, melainkan potret kompleksitas kehidupan masyarakat desa dalam menghadapi realitas digital yang baru. Setiap fenomena yang dibahas di sini saling berkelindan dan membentuk ekosistem ketidaksadaran yang dapat melemahkan daya hidup komunitas jika tidak diintervensi melalui pendidikan. Dalam konteks inilah, literasi media harus ditempatkan sebagai proyek pemberdayaan sosial—sebuah upaya kolektif untuk mengembalikan kendali manusia

atas teknologi, serta menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan di tengah derasnya arus digitalisasi.

Oleh karena itu, bab berikutnya akan beralih fokus dari ranah analisis menuju ranah tindakan. Bab 5 akan membahas Model dan Strategi Pelatihan Literasi Media bagi Masyarakat Desa, dengan menekankan bagaimana desain pembelajaran, pendekatan partisipatif, dan integrasi nilai-nilai lokal dapat menjadi fondasi bagi proses transformasi sosial melalui pendidikan nonformal. Literasi media bukan lagi sekadar kemampuan membaca dan menulis pesan digital, tetapi jalan menuju kesadaran kritis dan kemandirian komunitas di era informasi.



Bagian 5

Analisis Kebutuhan Pelatihan

Analisis kebutuhan merupakan tahap fundamental dalam penyusunan kurikulum pelatihan literasi media. Tanpa pemahaman mendalam tentang kebutuhan peserta, pelatihan berisiko tidak relevan, sulit diterapkan, atau tidak mampu menjawab persoalan nyata di lapangan. Dalam konteks masyarakat desa, analisis kebutuhan harus dilakukan secara sensitif terhadap kondisi sosial, budaya, dan teknologi yang membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan media digital. Bab ini menguraikan metode analisis kebutuhan yang digunakan, kompetensi yang perlu dikembangkan, hasil identifikasi gap keterampilan, serta faktor lokal yang memengaruhi perancangan pelatihan literasi media bagi masyarakat desa.

5.1 Metode Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan pada masyarakat desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan berlapis yang menggabungkan metode kualitatif dan partisipatoris. Metode

utama yang digunakan meliputi Focus Group Discussion (FGD), wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan survei sederhana. Keempat metode ini memungkinkan fasilitator memperoleh gambaran menyeluruh tentang pengalaman, persepsi, dan tantangan masyarakat desa dalam menghadapi informasi digital.

FGD menjadi metode yang sangat efektif karena pola komunikasi masyarakat desa cenderung interpersonal dan berbasis musyawarah. Melalui FGD, peserta dapat berbagi pengalaman kolektif mengenai hoaks, penipuan *online*, konsumsi konten, serta perilaku digital sehari-hari. Diskusi ini sering kali membuka lapisan-lapisan masalah yang tidak muncul dalam survei formal, seperti situasi ketika masyarakat merasa tidak enak menolak permintaan untuk meneruskan pesan yang diterima, atau pengalaman pribadi menjadi korban penipuan namun tidak berani melapor.

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali perspektif individu yang memiliki peran strategis dalam komunitas desa, seperti kepala dusun, tokoh agama, ketua pemuda, guru, atau pelaku UMKM digital. Wawancara ini membantu menjelaskan bagaimana alur informasi bekerja di desa, siapa saja aktor yang memiliki pengaruh, serta bagaimana mereka memaknai risiko media digital.

Observasi lapangan dilakukan untuk memahami konteks penggunaan teknologi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Observasi ini mencakup pemantauan lokasi-lokasi interaksi sosial, penggunaan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas di warung internet, serta dinamika penggunaan media digital dalam kegiatan komunitas seperti arisan, gotong-royong, atau pertemuan desa.

Survei sederhana menggunakan kuesioner singkat digunakan untuk memetakan tingkat literasi digital dasar,

kebiasaan konsumsi media, kemampuan verifikasi informasi, dan pemahaman masyarakat terhadap risiko digital. Survei ini membantu mengidentifikasi pola umum serta variasi kemampuan antar masyarakat.

Pendekatan berlapis ini memastikan bahwa analisis kebutuhan mencakup dimensi kognitif, sosial, dan emosional dari pengalaman masyarakat desa dalam berinteraksi dengan media digital. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menyusun kurikulum pelatihan yang benar-benar sesuai kebutuhan peserta.

5.2 Kompetensi yang Dibutuhkan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat beberapa kompetensi inti yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan informasi yang semakin kompleks. Kompetensi-kompetensi ini mencakup kompetensi kritis, teknis, sosial, dan etis.

Pertama, kompetensi memahami informasi. Masyarakat desa perlu memiliki kemampuan dasar untuk membedakan antara fakta dan opini, mengenali konten yang mencurigakan, memahami struktur teks berita, serta menafsirkan data sederhana seperti grafik atau tabel. Kemampuan ini menjadi pondasi literasi media yang lebih tinggi.

Kedua, kompetensi verifikasi informasi. Banyak masyarakat desa belum mengenal teknik verifikasi sederhana seperti mencari sumber asli, memeriksa tanggal publikasi, membandingkan informasi dari dua sumber yang berbeda, atau menggunakan *tools* seperti Google Reverse Image Search. Pelatihan literasi media perlu mengajarkan keterampilan verifikasi yang praktis dan mudah diterapkan melalui *smartphone*.

Ketiga, kompetensi keamanan digital. Banyak masyarakat belum memahami konsep dasar keamanan digital, seperti kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, cara mengidentifikasi tautan palsu, dan cara melindungi data pribadi. Kompetensi ini sangat penting untuk mencegah penipuan *online*, pencurian identitas, serta akses ilegal ke akun pribadi.

Keempat, kompetensi etika digital. Masyarakat perlu memahami cara menggunakan media digital secara bertanggung jawab, termasuk dalam berbagi informasi, menghormati privasi orang lain, dan memahami konsekuensi hukum dari penyebaran konten palsu atau merugikan. Kompetensi etika digital sangat penting karena perilaku pengguna sering dipengaruhi oleh norma sosial, bukan oleh regulasi formal.

Kelima, kompetensi partisipasi digital. Masyarakat desa perlu mampu menggunakan media digital untuk tujuan produktif seperti pendidikan, ekonomi lokal, dan partisipasi dalam proses pemerintahan desa. Kompetensi ini mencakup kemampuan memanfaatkan platform desa digital, berinteraksi dengan layanan publik *online*, dan membuat konten positif yang bermanfaat bagi komunitas.

Keenam, kompetensi refleksi kritis. Pelatihan literasi media tidak cukup hanya memberikan teknik, tetapi juga harus membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap struktur kekuasaan dalam media digital, peran algoritma, serta cara media mempengaruhi opini publik. Kompetensi refleksi kritis sangat relevan dengan pendekatan pendidikan pembebasan, yang memosisikan peserta sebagai subjek yang mampu membaca dan mengubah realitas sosialnya.

5.3 Matriks Kebutuhan Pelatihan

Matriks kebutuhan pelatihan disusun berdasarkan hasil analisis gap antara kompetensi ideal dan kemampuan aktual masyarakat desa. Matriks ini membagi kebutuhan pelatihan ke dalam empat kategori: (1) urgensi tinggi dan kemampuan rendah, (2) urgensi tinggi dan kemampuan sedang, (3) urgensi sedang dan kemampuan rendah, serta (4) urgensi sedang dan kemampuan sedang.

Kompetensi verifikasi informasi termasuk dalam kategori urgensi tinggi dan kemampuan rendah. Hampir semua desa menunjukkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi palsu dan benar. Oleh karena itu, pelatihan tentang teknik verifikasi harus menjadi materi inti dalam kurikulum.

Kompetensi keamanan digital juga termasuk dalam kategori urgensi tinggi dan kemampuan rendah. Banyak masyarakat tidak mengetahui cara melindungi akun pribadi, sementara ancaman penipuan *online* terus meningkat. Pelatihan harus memberikan langkah-langkah sederhana yang dapat langsung dipraktikkan.

Kompetensi memahami informasi berada pada kategori urgensi sedang namun tetap penting untuk penguatan literasi media secara berkelanjutan. Pelatihan dapat dirancang untuk membangun kemampuan interpretasi teks dan visual yang lebih kuat.

Kompetensi etika digital biasanya berada pada kategori kemampuan sedang tetapi urgensi tinggi. Banyak masyarakat desa belum memahami konsekuensi hukum dari penyebaran hoaks, namun mereka cepat belajar jika materi disampaikan dengan konteks yang relevan.

Kompetensi partisipasi digital berada pada kategori urgensi sedang dan kemampuan rendah. Pelatihan dapat memasukkan sesi tentang penggunaan layanan digital pemerintah desa, platform UMKM digital, atau media sosial positif.

Dengan memahami matriks kebutuhan ini, kurikulum dapat disusun secara prioritas, dimulai dari kompetensi yang paling mendesak dan paling minim dimiliki masyarakat desa.

5.4 Analisis Gap Keterampilan

Analisis gap keterampilan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa memiliki pengetahuan dasar dalam menggunakan teknologi, tetapi belum memiliki kemampuan kritis untuk memanfaatkan teknologi secara aman dan produktif. Gap terbesar ditemukan pada kemampuan verifikasi informasi, keamanan digital, dan analisis kritis terhadap media sosial. Keterampilan teknis seperti menggunakan aplikasi pesan instan atau menonton video di YouTube sudah dimiliki hampir semua masyarakat desa, tetapi keterampilan tersebut tidak cukup untuk menghadapi risiko digital yang semakin kompleks.

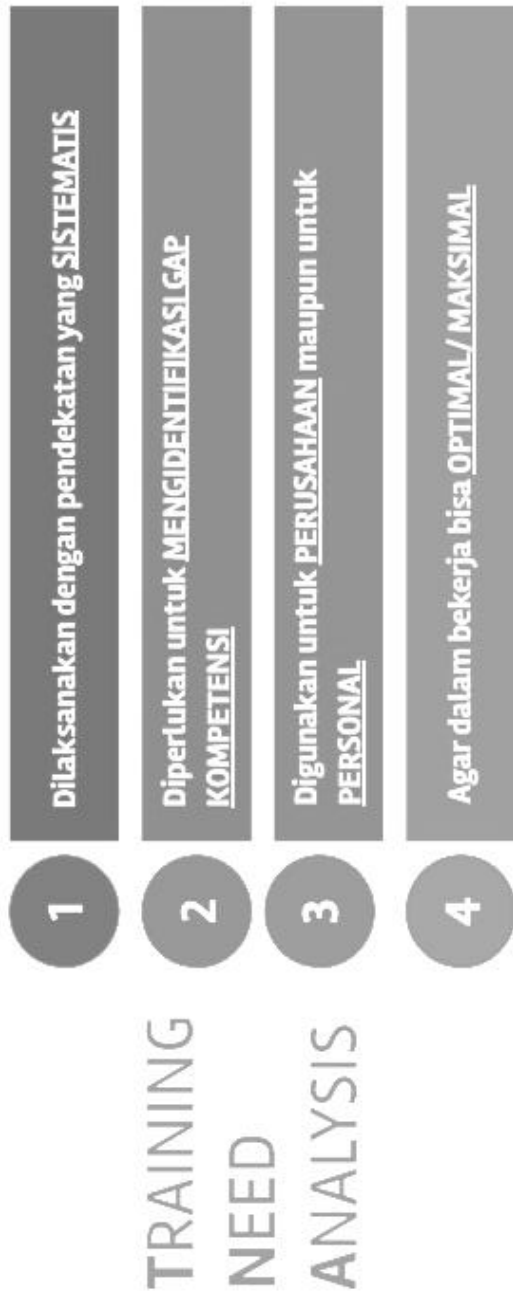
Gap keterampilan juga tampak dalam hal perbedaan generasional. Kelompok usia muda memiliki kemampuan teknis lebih tinggi tetapi keterampilan kritis rendah, sementara kelompok usia tua memiliki keterampilan teknis rendah dan ketergantungan tinggi pada otoritas lokal. Pelatihan harus mampu menjembatani gap ini melalui metode pembelajaran yang inklusif.

5.5 Konteks Lokal dan Faktor Risiko

Setiap desa memiliki konteks lokal yang mempengaruhi kebutuhan literasi media. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses internet, kondisi ekonomi,

struktur sosial, dan nilai budaya menentukan bagaimana pelatihan harus dijalankan. Misalnya, desa yang mengalami banyak kasus penipuan digital membutuhkan materi keamanan digital lebih intensif, sedangkan desa yang sering menjadi sasaran hoaks pertanian memerlukan pelatihan verifikasi informasi berbasis isu sektor pertanian.

Selain itu, dinamika politik lokal, keberadaan tokoh masyarakat yang kuat, dan pola konsumsi media tertentu juga menjadi faktor risiko yang harus dipertimbangkan. Pelatihan harus dirancang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan konteks masing-masing desa, tanpa kehilangan esensi kurikulum inti.



Bagian 6

Landasan Kurikulum Pelatihan

Kurikulum pelatihan literasi media bagi masyarakat desa tidak dapat disusun secara sembarangan. Ia harus berakar pada landasan konseptual yang kuat, baik dari perspektif pendidikan orang dewasa, teori literasi media, maupun dinamika sosial yang membentuk kehidupan masyarakat desa. Landasan kurikulum ini mencakup prinsip pedagogis, pendekatan andragogi, prinsip pendidikan nonformal, relevansi pendidikan pembebasan Paulo Freire, dan kerangka *transformative learning*. Bab ini menjabarkan fondasi filosofis dan metodologis yang akan menjadi panduan dalam penyusunan modul pembelajaran, metode pelatihan, hingga strategi implementasi di lapangan.

6.1 Kerangka Pedagogis Pelatihan Literasi Media

Kerangka pedagogis dalam kurikulum pelatihan literasi media ini berangkat dari pemahaman mendasar bahwa literasi media bukan sekadar seperangkat keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi sebuah proses

pendidikan yang menyentuh dimensi kognitif, emosional, sosial, dan etis dari kehidupan manusia. Dalam era ketika informasi telah menjadi komoditas dan media menjadi ruang dominan pembentuk kesadaran, literasi media harus dilihat sebagai proses humanisasi—yakni upaya untuk mengembalikan manusia sebagai subjek yang berpikir, merasa, dan bertindak secara sadar di tengah arus informasi yang serba cepat.

Model literasi media yang digunakan dalam kurikulum ini merujuk pada kerangka Media and Information Literacy (MIL) yang dikembangkan oleh UNESCO. Model tersebut menempatkan empat kompetensi utama sebagai fondasi pembelajaran, yaitu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara kritis. Kerangka ini menegaskan bahwa literasi media bukan hanya soal “melek teknologi”, melainkan juga kemampuan reflektif untuk memahami bagaimana media membentuk cara kita melihat dunia, membangun opini, dan mengarahkan tindakan sosial.

Lebih jauh, kerangka UNESCO tersebut diperkuat oleh pendekatan literasi kritis yang dikembangkan oleh para pemikir seperti David Buckingham dan Renee Hobbs. Bagi Buckingham (2003), literasi media adalah proses aktif di mana individu belajar memahami bagaimana pesan media dikonstruksi melalui pilihan bahasa, citra, dan konteks produksi tertentu. Ia menekankan pentingnya kesadaran bahwa media bukan cermin realitas, tetapi hasil konstruksi yang sarat ideologi dan kepentingan. Sementara itu, Hobbs (2011) menambahkan dimensi etika dan tanggung jawab sosial dalam literasi media dengan menekankan pentingnya *empowerment through communication*—yakni bagaimana kemampuan memahami media harus diikuti oleh kemampuan untuk berpartisipasi dan menyuarakan gagasan secara etis di ruang publik.

Dalam konteks pelatihan literasi media bagi masyarakat desa, kerangka pedagogis ini harus diterjemahkan secara kontekstual dan manusiawi. Peserta pelatihan umumnya adalah orang dewasa dengan pengalaman hidup yang kaya, tetapi dengan tingkat kemampuan konseptual yang beragam. Banyak di antara mereka yang telah terlibat dalam praktik komunikasi tradisional seperti musyawarah, pengumuman lewat pengeras suara, atau penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Pola-pola komunikasi ini sebenarnya dapat menjadi titik berangkat yang sangat kuat untuk membangun kesadaran literasi media, asalkan pendekatan pembelajarannya tidak memaksakan pola *top-down* atau terlalu akademis.

Oleh karena itu, pendekatan pedagogis yang dipilih dalam kurikulum ini adalah pendekatan dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Pendekatan ini berakar pada pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan, yang menolak praktik pendidikan gaya “bank”—di mana peserta dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi pengetahuan—dan menggantinya dengan model *problem-posing education* yang berlandaskan dialog, kesetaraan, dan refleksi kritis. Dalam kerangka ini, fasilitator pelatihan tidak berperan sebagai “guru” yang menyampaikan kebenaran, tetapi sebagai pemantik kesadaran yang membantu peserta membaca realitas mereka sendiri melalui pengalaman konkret.

Proses pelatihan harus memulai dari dunia keseharian peserta. Misalnya, dari pengalaman mereka menerima pesan berantai di WhatsApp, menyaksikan hoaks tentang bantuan pemerintah, atau melihat perubahan perilaku remaja akibat media sosial. Dari pengalaman tersebut, fasilitator mengajak peserta berdialog: mengapa informasi itu dipercaya, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana cara memverifikasinya? Dengan demikian, pengetahuan tidak datang dari luar, tetapi dibangun dari dalam pengalaman hidup peserta itu sendiri.

Prinsip ini sejalan dengan teori andragogi dari Malcolm Knowles, yang menekankan bahwa orang dewasa belajar paling efektif ketika pembelajaran berakar pada pengalaman nyata dan kebutuhan hidup mereka.

Kerangka pedagogis ini juga menempatkan keterlibatan aktif peserta sebagai inti proses pembelajaran. Pelatihan literasi media tidak boleh berhenti pada ceramah atau presentasi, melainkan harus menjadi ruang praktik sosial. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti simulasi verifikasi berita, analisis konten hoaks lokal, pemetaan sumber informasi di desa, atau pembuatan konten positif berbasis kearifan lokal dirancang untuk menstimulasi partisipasi aktif dan membangun *sense of agency*—perasaan bahwa mereka mampu mengendalikan media, bukan dikendalikan olehnya.

Melalui kegiatan semacam ini, pelatihan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. Peserta tidak hanya belajar mengenali manipulasi media, tetapi juga belajar memaknai kembali relasi mereka dengan informasi, teknologi, dan komunitas. Dalam suasana belajar yang terbuka dan dialogis, muncul kesadaran bahwa literasi media bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan bagian dari perjuangan kolektif untuk membangun masyarakat yang sadar, adil, dan berdaya.

Selain dimensi kognitif, kerangka pedagogis ini juga menekankan aspek emosional dan etis. Literasi media yang sejati harus membangun kepekaan moral terhadap dampak sosial dari setiap tindakan digital. Peserta diajak menyadari bahwa berbagi informasi bukan hanya urusan benar atau salah, tetapi juga urusan tanggung jawab terhadap orang lain. Dalam hal ini, nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan malu jika membohongi orang lain dapat dijadikan fondasi moral yang mengakar kuat untuk menanamkan etika bermedia.

Dengan menggabungkan unsur kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran dan empati), serta konatif (tindakan sosial), kerangka pedagogis pelatihan literasi media di masyarakat desa ini bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang utuh—sebuah proses yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menumbuhkan hati dan membentuk perilaku. Literasi media diposisikan sebagai praktik pendidikan yang membebaskan, yang memungkinkan masyarakat desa memahami posisi mereka di dalam struktur komunikasi global, sekaligus meneguhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang menjadi identitas mereka.

Dengan demikian, kerangka pedagogis ini menegaskan bahwa pelatihan literasi media bukanlah kegiatan instruksional semata, melainkan proses pembentukan kesadaran kritis dan transformasi sosial. Ketika masyarakat desa mulai mampu membaca dan menafsirkan pesan media secara kritis, mereka sesungguhnya sedang membangun fondasi baru bagi kedaulatan informasi dan partisipasi sosial yang lebih adil. Dalam semangat itulah, seluruh modul pelatihan berikutnya dirancang—bukan untuk “mengajarkan” media, tetapi untuk menyadarkan manusia di dalam media.

6.2 Prinsip-Prinsip Pendidikan Nonformal

Pelatihan literasi media bagi masyarakat desa secara konseptual berada dalam ranah pendidikan nonformal, karena penyelenggaraannya berlangsung di luar sistem persekolahan, bersifat sukarela, fleksibel, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Pendidikan nonformal tidak dibatasi oleh standar akademik yang kaku, melainkan dirancang untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari dan memperkuat kapasitas individu serta komunitas dalam menghadapi perubahan sosial. Dalam konteks masyarakat desa yang kini berada di tengah arus digitalisasi,

pendekatan pendidikan nonformal menjadi sangat relevan karena mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan modern dan kearifan lokal, antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai proses pembelajaran yang bersifat sosial dan kontekstual, pendidikan nonformal memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyusunan kurikulum pelatihan literasi media ini. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa pelatihan tidak sekadar mentransfer keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat desa.

6.2.1 Berpusat pada Kebutuhan Peserta

Prinsip pertama dan paling mendasar dari pendidikan nonformal adalah bahwa seluruh proses pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan peserta. Pendidikan nonformal menolak model *top-down* yang memaksakan kurikulum universal. Sebaliknya, ia tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat yang menjadi peserta belajar. Dalam konteks literasi media di desa, ini berarti materi pelatihan harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan (*needs assessment*) yang mendalam terhadap pengalaman, minat, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sebagai contoh, masyarakat di desa pertanian mungkin lebih membutuhkan pelatihan tentang cara mengenali hoaks seputar pupuk, bibit, atau program bantuan pemerintah, sementara masyarakat pesisir bisa lebih relevan dengan isu penipuan digital melalui *e-commerce* atau berita palsu tentang cuaca dan hasil tangkapan laut. Dengan demikian, kurikulum tidak bersifat seragam, tetapi adaptif terhadap konteks lokal. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire tentang pendidikan yang “berangkat dari realitas peserta,” di mana proses belajar menjadi alat

untuk membaca dan menafsirkan dunia sendiri, bukan dunia yang dipaksakan oleh pihak luar.

6.2.2 Fleksibilitas dalam Metode dan Pendekatan

Prinsip kedua adalah fleksibilitas, baik dalam metode, pendekatan, maupun waktu pelaksanaan. Pendidikan nonformal memungkinkan fasilitator menyesuaikan proses belajar dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kultural peserta. Di desa, fleksibilitas berarti menghormati ritme kehidupan masyarakat: pelatihan tidak dapat diselenggarakan saat musim panen atau acara adat besar, dan perlu memperhitungkan waktu produktif masyarakat.

Selain fleksibilitas waktu, metode pembelajaran juga harus variatif dan kontekstual. Diskusi kelompok, permainan peran, simulasi verifikasi berita, pemutaran video pendek, hingga kunjungan lapangan dapat dipadukan untuk menjaga keterlibatan peserta. Pendekatan yang kreatif ini membantu peserta belajar melalui pengalaman langsung (*experiential learning*), bukan hanya melalui penjelasan verbal. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih hidup, bermakna, dan sesuai dengan gaya belajar orang dewasa yang menghargai pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan.

Fleksibilitas juga berarti keterbukaan terhadap inovasi. Misalnya, di desa yang memiliki jaringan internet memadai, pelatihan dapat menggunakan platform digital sederhana seperti WhatsApp Group atau Google Form untuk praktik verifikasi informasi. Sebaliknya, di desa yang akses internetnya terbatas, pelatihan bisa dilakukan dengan alat bantu konvensional seperti papan informasi, radio komunitas, atau simulasi naratif berbasis cerita lokal.

6.2.3 Kebermaknaan Pembelajaran

Prinsip ketiga adalah kebermaknaan pembelajaran (*meaningful learning*). Dalam pendidikan nonformal, setiap aktivitas harus memiliki manfaat langsung yang dapat dirasakan peserta dalam kehidupan mereka. Pembelajaran yang bermakna tidak hanya mengisi pengetahuan baru, tetapi membantu peserta memecahkan persoalan nyata yang dihadapi sehari-hari.

Dalam pelatihan literasi media, kebermaknaan bisa dicapai dengan menunjukkan hubungan antara kemampuan memverifikasi informasi dengan kualitas hidup mereka. Misalnya, peserta diajak menyadari bagaimana hoaks harga pupuk atau berita palsu tentang vaksin dapat memengaruhi keputusan ekonomi dan kesehatan keluarga. Ketika peserta merasakan manfaat konkret dari pelatihan, motivasi mereka untuk belajar dan menerapkan pengetahuan tersebut akan meningkat. Prinsip ini menegaskan bahwa pembelajaran yang tidak relevan dengan realitas sosial peserta hanya akan berakhir sebagai kegiatan seremonial tanpa dampak.

6.2.4 Partisipasi Aktif Peserta

Prinsip keempat menekankan pentingnya partisipasi aktif peserta dalam seluruh proses pembelajaran. Pendidikan nonformal berpijak pada keyakinan bahwa setiap individu membawa pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan yang berharga. Dalam pelatihan literasi media, partisipasi aktif berarti memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman mereka dalam berhadapan dengan hoaks, penipuan digital, atau konflik akibat media sosial.

Fasilitator berperan sebagai pengarah diskusi yang membuka ruang dialog, bukan sebagai sumber pengetahuan tunggal. Model ini menumbuhkan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap proses belajar, sehingga hasil pelatihan

tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial di tingkat komunitas. Ketika peserta merasa bahwa pengalaman mereka dihargai, mereka lebih mudah menerima konsep baru dan bahkan berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Partisipasi aktif juga menciptakan solidaritas dan rasa percaya antar masyarakat. Dalam konteks desa, hal ini sangat penting karena pembelajaran yang bersifat kolektif cenderung lebih efektif dibandingkan pembelajaran individual. Melalui kerja kelompok, diskusi terbuka, dan refleksi bersama, pelatihan menjadi proses sosial yang memperkuat jalinan komunitas sekaligus memperluas kesadaran kritis.

6.2.5 Konteks Sosial-Budaya sebagai Kekuatan Pembelajaran

Prinsip terakhir adalah penghormatan terhadap konteks sosial dan budaya lokal sebagai kekuatan pembelajaran. Pendidikan nonformal tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial tempat ia berlangsung. Nilai-nilai, tradisi, dan norma yang hidup di masyarakat desa bukan hambatan, melainkan sumber daya pendidikan yang luar biasa.

Dalam pelatihan literasi media, konteks sosial-budaya dapat dijadikan pintu masuk yang efektif untuk memperkenalkan konsep-konsep abstrak seperti etika digital, kesadaran kritis, atau tanggung jawab bermedia. Misalnya, nilai gotong royong dapat dijadikan metafora untuk “gotong royong menjaga kebenaran di media sosial.” Tradisi musyawarah dapat diadaptasi menjadi metode dialog reflektif untuk mendiskusikan perbedaan pendapat di ruang digital. Bahkan pepatah lokal dan cerita rakyat dapat digunakan sebagai media untuk menggali makna moral tentang bijak bermedia.

Menghormati konteks budaya juga berarti peka terhadap relasi kekuasaan di dalam komunitas. Fasilitator harus memahami struktur sosial desa, seperti peran tokoh agama, adat, dan pemuda, agar pelatihan tidak menimbulkan resistensi atau dianggap mengganggu tatanan nilai yang ada. Justru dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal sebagai mitra, pelatihan akan memiliki legitimasi sosial yang kuat dan peluang keberlanjutan yang lebih tinggi.

Dengan mengintegrasikan kelima prinsip di atas, kurikulum pelatihan literasi media ini berupaya menjadi pendidikan yang adaptif, relevan, dan transformatif. Pendidikan nonformal tidak lagi dipandang sebagai jalur alternatif, melainkan sebagai ruang pembelajaran yang autentik, di mana masyarakat desa dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri dan mengembangkan kapasitas untuk menghadapi tantangan digital secara mandiri.

Prinsip-prinsip inilah yang menjadikan pelatihan literasi media bukan sekadar proses peningkatan keterampilan, melainkan gerakan sosial menuju masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan berdaya di era informasi.

6.3 Prinsip Andragogi dalam Pelatihan Orang Dewasa

Pelatihan literasi media bagi masyarakat desa berfokus pada peserta yang sebagian besar merupakan orang dewasa — petani, pedagang, ibu rumah tangga, perangkat desa, tokoh adat, atau pemuda yang sudah bekerja. Karakteristik kelompok ini berbeda secara mendasar dari peserta didik anak atau remaja. Mereka datang ke ruang belajar bukan untuk mencari nilai atau sertifikat, melainkan untuk memecahkan persoalan yang nyata mereka hadapi. Oleh karena itu, pendekatan andragogi, sebagaimana dikembangkan oleh Malcolm S. Knowles, menjadi dasar konseptual yang paling relevan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pelatihan ini.

Knowles (1980) mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Ia berangkat dari keyakinan bahwa proses belajar orang dewasa bersifat otonom, berbasis pengalaman, dan berorientasi pada kebutuhan praktis. Berbeda dengan pedagogi yang menempatkan peserta didik sebagai penerima pengetahuan pasif, andragogi menekankan peran aktif pembelajar dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi proses belajarnya sendiri. Dalam kerangka ini, fasilitator bukanlah guru yang mengajar, melainkan pendamping yang membantu peserta menemukan makna dari pengalaman hidupnya.

Pendekatan andragogi sangat penting dalam konteks pelatihan literasi media bagi masyarakat desa karena orang dewasa telah memiliki kerangka pengetahuan dan sistem nilai sendiri. Mereka tidak memulai dari nol. Mereka telah memiliki pengalaman berinteraksi dengan media, meskipun sering kali tanpa kesadaran kritis. Tugas pelatihan bukan meniadakan pengalaman itu, tetapi menatanya kembali dalam konteks pemahaman baru.

Ada beberapa prinsip dasar andragogi yang diintegrasikan ke dalam kurikulum ini dan menjadi pemandu bagi fasilitator dalam menjalankan proses pembelajaran.

6.3.1 Orientasi Belajar pada Pemecahan Masalah

Orang dewasa tidak tertarik belajar sesuatu yang abstrak atau jauh dari realitas hidupnya. Mereka belajar ketika melihat hubungan langsung antara materi pelatihan dengan persoalan yang mereka alami sehari-hari. Karena itu, pelatihan literasi media harus berangkat dari masalah konkret yang dihadapi masyarakat desa.

Fasilitator dapat memulai sesi dengan mengajukan pertanyaan pemantik seperti:

“Apakah Bapak/Ibu pernah menerima pesan berantai yang ternyata tidak benar?”

“Bagaimana dampaknya ketika berita palsu itu menyebar di lingkungan desa?”

Dari situ, peserta diajak mengidentifikasi persoalan nyata seperti hoaks pertanian, penipuan *online*, fitnah politik menjelang pemilu, atau peretasan akun pribadi. Pendekatan ini menjadikan proses belajar bersifat *problem-based learning*, di mana pembelajaran bukan sekadar menerima informasi baru, tetapi menganalisis, merefleksikan, dan mencari solusi bersama.

Dalam pendekatan ini, setiap sesi pelatihan tidak berorientasi pada “materi” semata, melainkan pada pemecahan masalah sosial dan digital yang kontekstual. Misalnya, daripada memberi kuliah panjang tentang “etika media sosial”, fasilitator bisa mengajak peserta menganalisis kasus ujaran kebencian di grup WhatsApp desa dan mendiskusikan bagaimana seharusnya masyarakat bersikap. Melalui cara ini, pembelajaran menjadi bermakna karena peserta belajar sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka.

6.3.2 Pengalaman sebagai Sumber Belajar

Dalam kerangka andragogi, pengalaman peserta bukan sekadar latar belakang, tetapi sumber utama pembelajaran. Orang dewasa telah mengumpulkan beragam pengalaman hidup yang membentuk cara mereka memahami dunia — termasuk cara mereka memaknai informasi. Pelatihan literasi media yang baik justru memanfaatkan pengalaman itu sebagai bahan refleksi kritis.

Fasilitator berperan untuk menggali dan menstrukturkan pengalaman peserta agar menjadi sumber pengetahuan bersama. Misalnya, peserta diminta

menceritakan pengalaman mereka ketika tertipu oleh berita palsu atau penipuan digital. Cerita-cerita semacam ini membuka ruang dialog yang autentik dan membangun kesadaran bahwa setiap orang memiliki kerentanan yang sama di dunia digital.

Dari pengalaman individu, pelatihan kemudian bergerak menuju pemahaman kolektif, di mana peserta belajar untuk mengenali pola umum — mengapa banyak masyarakat mudah percaya hoaks, bagaimana algoritma bekerja, dan apa strategi untuk melindungi diri. Dengan demikian, pengalaman hidup masyarakat bukan hanya dikenang, tetapi diolah menjadi refleksi sosial dan kesadaran kritis.

Pendekatan ini juga memberi nilai psikologis yang penting: peserta merasa dihargai karena pengalaman mereka diakui sebagai bagian dari proses belajar, bukan dianggap sebagai “kekurangan pengetahuan”. Inilah bentuk penghormatan terhadap martabat pembelajar dewasa yang menjadi inti filosofi andragogi.

6.3.3 Kesiapan Belajar yang Terkait dengan Peran Sosial

Orang dewasa biasanya termotivasi untuk belajar ketika pembelajaran membantu mereka menjalankan peran sosialnya dengan lebih baik. Seorang petani ingin belajar karena ia ingin melindungi hasil taninya dari informasi palsu tentang pupuk. Seorang ibu rumah tangga ingin belajar agar bisa melindungi anaknya dari konten berbahaya di internet. Seorang perangkat desa ingin belajar agar bisa menyebarkan informasi publik dengan benar.

Kurikulum pelatihan literasi media harus menyadari keragaman peran sosial ini dan menghubungkan materi dengan tanggung jawab yang melekat pada peran tersebut. Pelatihan yang relevan dengan identitas sosial peserta akan lebih mudah diterima dan diterapkan.

Sebagai contoh, dalam sesi tentang keamanan digital, fasilitator dapat memfokuskan pembelajaran pada bagaimana petani dapat melindungi data pribadi saat menggunakan aplikasi bantuan pemerintah, atau bagaimana ibu rumah tangga dapat mengenali konten manipulatif yang menyasar anak-anak. Ketika peserta merasa bahwa apa yang mereka pelajari berdampak langsung pada peran dan kehidupan mereka, mereka akan menunjukkan keterlibatan yang jauh lebih tinggi.

Prinsip ini menjadikan pelatihan bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan alat penguatan peran sosial masyarakat desa. Setiap pengetahuan baru yang diperoleh diarahkan untuk memperkuat kapasitas individu sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar.

6.4 Motivasi Intrinsik dalam Pembelajaran

Prinsip keempat adalah bahwa motivasi belajar orang dewasa terutama bersifat intrinsik. Berbeda dari anak-anak yang sering termotivasi oleh penghargaan eksternal seperti nilai, hadiah, atau pengakuan guru, orang dewasa terdorong oleh keinginan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Mereka belajar karena ingin menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih mandiri, atau lebih dihormati di lingkungannya.

Dalam konteks pelatihan literasi media, motivasi intrinsik ini perlu dirangsang melalui kesadaran kritis. Fasilitator perlu membantu peserta memahami bahwa kemampuan bermedia bukan hanya keterampilan digital, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Ketika peserta menyadari bahwa menyebarkan informasi palsu bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain, atau bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan dalam komunitasnya, motivasi untuk belajar akan muncul secara alami.

Pelatihan yang terlalu berorientasi pada insentif eksternal — seperti sertifikat atau hadiah — cenderung hanya menghasilkan partisipasi sesaat. Sebaliknya, pelatihan yang membangkitkan kesadaran intrinsik akan menghasilkan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, fasilitator perlu mengedepankan pendekatan yang inspiratif, bukan instruktif; dialogis, bukan dogmatis; dan empatik, bukan evaluatif.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip andragogi ini, pelatihan literasi media bagi masyarakat desa akan menjadi proses belajar yang efektif, bermakna, dan berkelanjutan. Pelatihan tidak lagi dipahami sebagai ruang pengajaran satu arah, tetapi sebagai ruang pemberdayaan, di mana setiap peserta diajak untuk membaca ulang pengalamannya, menemukan makna baru, dan meneguhkan peran sosialnya di tengah arus informasi digital yang kompleks.

Lebih dari sekadar meningkatkan keterampilan bermedia, pendekatan andragogi menumbuhkan rasa percaya diri dan otonomi belajar pada masyarakat desa. Mereka tidak hanya belajar “menggunakan media dengan benar”, tetapi juga belajar “memahami dunia melalui media” dan mengambil tindakan yang lebih bijak di dalamnya. Dengan demikian, kurikulum pelatihan literasi media ini tidak hanya mengadopsi teori andragogi sebagai metode, melainkan menghayatinya sebagai filosofi — sebuah keyakinan bahwa setiap orang dewasa memiliki kapasitas untuk tumbuh, berubah, dan berkontribusi bagi kehidupan sosialnya melalui proses pendidikan yang manusiawi, partisipatif, dan reflektif.

6.5 Transformative Learning sebagai Kerangka Perubahan Perilaku

Dalam pendidikan orang dewasa, tujuan pembelajaran sejati bukan hanya menambah pengetahuan atau keterampilan baru, melainkan mengubah cara seseorang

melihat, memahami, dan bertindak terhadap dunia. Inilah inti dari teori Transformative Learning yang dikembangkan oleh Jack Mezirow (1991). Menurut Mezirow, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika individu mengalami pergeseran kerangka berpikir (*perspective transformation*)—yakni perubahan mendasar dalam cara mereka memandang diri, orang lain, dan realitas sosial di sekitarnya.

Dalam konteks pelatihan literasi media bagi masyarakat desa, teori ini menjadi sangat relevan. Sebab, tantangan utama yang dihadapi masyarakat bukan semata kekurangan informasi, melainkan cara mereka memahami dan menafsirkan informasi. Banyak masyarakat desa memiliki *frame of reference* atau asumsi dasar yang terbentuk dari pengalaman sosial dan budaya mereka. Misalnya, keyakinan bahwa “jika dikirim ustaz berarti benar,” “kalau sudah viral pasti betul,” atau “berita di grup keluarga tidak mungkin palsu.” Asumsi-asumsi ini bukan muncul tanpa alasan, melainkan hasil dari struktur kepercayaan yang lama hidup dalam budaya komunikasi berbasis keakraban dan otoritas moral.

Namun, di era digital, asumsi-asumsi semacam ini menjadi rentan terhadap manipulasi. Media sosial dan algoritma informasi bekerja dengan logika yang berbeda dari komunikasi tatap muka di dunia nyata. Seseorang dapat tampak meyakinkan tanpa benar-benar memiliki kredibilitas, dan sebuah informasi dapat viral bukan karena benar, tetapi karena emosional dan mudah dibagikan. Oleh karena itu, pelatihan literasi media tidak cukup hanya mengajarkan apa itu hoaks atau bagaimana cara memverifikasi berita, tetapi harus membantu peserta menyadari kembali cara berpikir mereka sendiri—sebuah proses reflektif yang membuka ruang bagi perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Menurut Mezirow, *transformative learning* terjadi melalui tiga komponen utama yang saling berhubungan: refleksi kritis, dialog rasional, dan tindakan transformatif. Ketiganya menjadi landasan konseptual dan metodologis bagi pelatihan literasi media yang ingin melahirkan perubahan kesadaran di tingkat individu maupun komunitas.

6.5.1 Refleksi Kritis: Menantang Asumsi yang Telah Mapan

Proses transformasi dimulai dari refleksi kritis (*critical reflection*), yaitu kemampuan untuk meninjau kembali keyakinan dan kebiasaan berpikir yang selama ini diterima begitu saja. Dalam pelatihan literasi media, refleksi kritis dapat dilakukan dengan mengajak peserta menelusuri sumber keyakinan mereka tentang kebenaran informasi. Misalnya, mengapa mereka percaya pada pesan tertentu, atau mengapa mereka merasa harus segera menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya.

Fasilitator dapat memancing refleksi ini melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti:

“Dari mana kita tahu bahwa pesan ini benar?”

“Apakah kita pernah salah mempercayai informasi?
Apa dampaknya?”

“Bagaimana jika ternyata orang yang mengirim pesan itu juga tertipu?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong peserta melihat bahwa banyak kebiasaan mereka dalam bermedia sebenarnya dibangun di atas kepercayaan yang tidak diuji. Melalui proses refleksi semacam ini, peserta mulai menyadari bahwa pola konsumsi media yang dianggap wajar ternyata menyimpan risiko sosial yang besar. Mereka juga belajar bahwa menjadi masyarakat digital yang kritis berarti berani

mempertanyakan sumber otoritas yang semula dianggap tak terbantahkan.

Refleksi kritis bukan proses yang mudah. Ia sering kali menimbulkan ketidaknyamanan karena mengguncang fondasi keyakinan yang telah lama dipegang. Namun, dalam konteks pendidikan orang dewasa, ketidaknyamanan ini justru menjadi titik awal transformasi. Dari sinilah kesadaran baru dapat tumbuh—kesadaran bahwa dunia digital membutuhkan cara berpikir baru yang lebih reflektif dan rasional.

6.5.2 Dialog Rasional: Membangun Pemahaman Melalui Pertukaran Pengalaman

Setelah refleksi kritis, proses belajar transformatif dilanjutkan dengan dialog rasional (*rational discourse*). Mezirow menekankan bahwa transformasi perspektif tidak dapat terjadi dalam kesunyian individu; ia membutuhkan ruang dialog yang terbuka, di mana peserta dapat berbagi pengalaman, membandingkan pandangan, dan menantang asumsi satu sama lain secara konstruktif.

Dalam pelatihan literasi media di desa, dialog ini dapat difasilitasi melalui diskusi kelompok kecil atau forum musyawarah komunitas. Peserta diajak berbicara tentang pengalaman mereka menghadapi hoaks, penipuan, atau konten radikal, kemudian bersama-sama menganalisis faktor-faktor yang membuat mereka terpengaruh. Ketika satu peserta mengaku pernah tertipu oleh berita viral, dan peserta lain menceritakan bagaimana ia belajar memeriksa sumber berita, maka proses belajar kolektif pun terjadi.

Dialog rasional mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan mendengarkan dengan empati. Dalam suasana dialog yang aman, masyarakat desa dapat belajar bahwa kebenaran bukanlah milik satu pihak, melainkan hasil

pencarian bersama. Melalui pertukaran pengalaman ini, peserta mulai membangun *intersubjective understanding*—pemahaman bersama yang lahir dari perjumpaan antar pengalaman.

Bagi masyarakat desa yang terbiasa dengan budaya lisan dan musyawarah, pendekatan dialogis ini sangat efektif. Ia bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghidupkan kembali tradisi lokal sebagai alat pembelajaran kritis. Dialog menjadi jembatan antara kebijaksanaan lokal dan pengetahuan digital modern, antara nilai gotong royong dan kesadaran kritis.

6.5.3 Tindakan Transformatif: Dari Kesadaran Menuju Perubahan Nyata

Komponen ketiga dari pembelajaran transformatif adalah tindakan transformatif (*transformative action*)—yakni penerapan kesadaran baru dalam kehidupan nyata. Mezirow menegaskan bahwa refleksi tanpa tindakan hanyalah wacana; pembelajaran sejati harus diwujudkan dalam perilaku baru yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

Dalam konteks literasi media, tindakan transformatif dapat mengambil berbagai bentuk sederhana namun signifikan. Misalnya, peserta mulai menahan diri untuk tidak langsung meneruskan pesan yang belum terbukti, memeriksa keaslian sumber informasi sebelum membagikannya, mengaktifkan keamanan dua langkah di akun digitalnya, atau mengedukasi anggota keluarga tentang bahaya hoaks dan penipuan *online*.

Tindakan-tindakan kecil ini, ketika dilakukan secara kolektif, dapat menciptakan perubahan sosial yang nyata di tingkat komunitas. Desa yang sebelumnya rawan disinformasi bisa menjadi komunitas yang lebih waspada dan saling menjaga dalam berbagi informasi. Dalam jangka panjang,

iniilah bentuk *community empowerment* yang menjadi tujuan utama pendidikan nonformal—yakni memungkinkan masyarakat untuk mengendalikan kehidupannya sendiri di tengah sistem media yang kompleks.

6.5.4 *Transformative Learning* sebagai Landasan Etis dan Sosial

Teori Mezirow tidak hanya menawarkan strategi pedagogis, tetapi juga kerangka etis bagi pendidikan literasi media. Ia menegaskan bahwa perubahan perilaku harus berakar pada kesadaran moral tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Ketika masyarakat desa mulai berhenti menyebarkan berita palsu, itu bukan hanya karena mereka tahu cara memverifikasi, tetapi karena mereka merasakan tanggung jawab sosial untuk tidak merugikan orang lain.

Dengan demikian, *transformative learning* membantu membangun budaya digital yang beretika, di mana teknologi tidak lagi menjadi sumber keterasingan, melainkan sarana untuk memperkuat kemanusiaan. Pelatihan literasi media berbasis teori Mezirow mengajak peserta untuk tidak hanya menjadi pengguna media yang cerdas, tetapi juga menjadi masyarakat yang bijak—yang mampu berpikir kritis, berempati, dan bertindak etis.

Melalui penerapan teori *transformative learning*, pelatihan literasi media bagi masyarakat desa tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi bergerak menuju perubahan *mindset* dan perilaku sosial. Ketika kesadaran kritis bertemu dengan refleksi dan tindakan nyata, maka literasi media menjadi jalan menuju pembebasan dan pemberdayaan—membantu masyarakat desa bukan hanya memahami dunia digital, tetapi juga menata ulang posisinya sebagai subjek yang sadar, otonom, dan berdaya dalam menghadapi perubahan zaman.

Jack Mezirow mengembangkan teori *transformative learning* yang menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa harus menghasilkan perubahan perspektif, bukan hanya penambahan pengetahuan. Dalam konteks literasi media, perubahan perspektif sangat penting karena banyak masyarakat desa memiliki asumsi-asumsi dasar yang perlu direfleksikan ulang, seperti keyakinan bahwa “jika dikirim ustaz berarti benar” atau “kalau viral pasti betul”.

Transformative learning terjadi melalui tiga komponen utama:

1. **Refleksi kritis.** Peserta diajak memeriksa keyakinan yang mereka miliki mengenai informasi digital. Refleksi ini membantu mereka melihat bahwa pola konsumsi media yang mereka anggap normal sebenarnya rentan.
2. **Dialog rasional.** Dialog digunakan untuk membandingkan pengalaman dan perspektif antar peserta. Proses ini memperluas wawasan mereka dan menantang asumsi yang tidak akurat.
3. **Tindakan transformatif.** Pembelajaran tidak berhenti pada refleksi; peserta didorong untuk mengubah perilaku digitalnya. Misalnya, berhenti meneruskan pesan tanpa membaca, mengaktifkan keamanan dua langkah, atau memeriksa sumber sebelum membagikan informasi.

Teori Mezirow memberi arah bagi pelatihan literasi media yang tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi juga membangun kebiasaan kritis yang tahan lama.



Bagian 7

Struktur Kurikulum Pelatihan Literasi Media

Struktur kurikulum merupakan kerangka utama yang menentukan arah pelatihan, isi modul, serta capaian peserta. Kurikulum pelatihan literasi media bagi masyarakat desa harus dirancang secara komprehensif, terukur, dan relevan dengan kebutuhan peserta yang beragam. Bab ini menyajikan struktur kurikulum yang mencakup desain umum, kompetensi inti, kompetensi dasar, peta capaian pembelajaran, dan alur pembelajaran berbasis pendekatan spiral. Struktur ini menjadi fondasi untuk penyusunan silabus lengkap di Bab 8 dan pengembangan modul pembelajaran pada Bab 9.

7.1 Desain Umum Kurikulum

Desain umum kurikulum pelatihan literasi media bagi masyarakat desa dibuat berdasarkan empat pertimbangan utama: (1) kebutuhan peserta, (2) kondisi sosial-budaya, (3) karakteristik media digital yang mereka gunakan, dan (4) landasan pedagogis yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

Kurikulum ini menggabungkan pendekatan *problem-posing*, andragogi, dan *transformative learning* agar pelatihan mampu menghasilkan pengalaman belajar yang mendalam, kontekstual, dan berorientasi perubahan perilaku.

Struktur kurikulum dibangun dalam bentuk sepuluh modul pelatihan, masing-masing dengan fokus kompetensi spesifik, namun tetap saling terhubung satu sama lain. Urutan modul mengikuti prinsip *spiral learning*, yaitu peserta diperkenalkan dari konsep sederhana menuju konsep lebih kompleks. Konsep-konsep dasar seperti mengenali informasi dan memahami struktur media ditempatkan di awal kurikulum, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan verifikasi, etika digital, keamanan *online*, dan produksi konten berbasis komunitas. Pendekatan spiral ini memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis secara bertahap.

Desain umum kurikulum juga mempertimbangkan fleksibilitas pelaksanaan. Pelatihan dapat diselenggarakan dalam format intensif 2–3 hari, format mingguan selama 4–6 pertemuan, atau format berbasis komunitas yang berlangsung secara bertahap sesuai kegiatan desa. Setiap modul dilengkapi dengan aktivitas praktis, studi kasus lokal, dan materi reflektif yang memungkinkan peserta menganalisis pengalaman mereka sendiri dalam menghadapi hoaks, penipuan digital, dan konten digital lainnya.

7.2 Struktur Modul Pelatihan

Setiap modul dalam kurikulum ini memiliki struktur tetap agar memudahkan fasilitator dalam pelaksanaan. Struktur modul meliputi:

Deskripsi Modul	Penjelasan mengenai ruang lingkup materi, konteks, dan relevansi modul dalam kehidupan masyarakat desa.
Tujuan Modul	Pernyataan yang menggambarkan arah pembelajaran dan apa yang ingin dicapai oleh peserta setelah mengikuti modul.
Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcomes</i>)	Rumusan kemampuan spesifik yang harus dimiliki peserta setelah menyelesaikan modul.
Kompetensi Utama dan Sub-Kompetensi	Daftar keterampilan atau pengetahuan yang harus dikuasai, dirumuskan secara operasional.
Materi Pokok	Uraian mengenai pokok bahasan yang harus disampaikan dalam modul.
Metode Pembelajaran	Rekomendasi metode seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus lapangan, permainan edukatif, demonstrasi, atau penjelasan visual.
Media dan Sumber Belajar	Termasuk video edukasi, contoh hoaks lokal, poster, infografis, lembar kerja, atau aplikasi <i>fact-checking</i> .
Kegiatan Pembelajaran	Langkah-langkah pembelajaran terstruktur yang mencakup kegiatan awal, inti, dan akhir.
Studi Kasus Kontekstual	Contoh kasus dari lingkungan desa yang dapat digunakan untuk latihan analitis.
Evaluasi dan Penilaian	Instrumen evaluasi berupa soal, tugas praktik verifikasi, refleksi kritis, atau rubrik kinerja.

Penggunaan struktur modul yang konsisten memungkinkan pelatihan dijalankan secara sistematis oleh berbagai jenis fasilitator dengan latar belakang yang berbeda.

7.3 Kompetensi Inti Kurikulum

Kompetensi inti merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Kompetensi inti kurikulum ini mencakup empat ranah:

7.3.1 Ranah Kognitif (Pengetahuan)

Dalam ranah kognitif, pelatihan literasi media bertujuan mengembangkan pemahaman konseptual dan analitis peserta terhadap berbagai aspek yang membentuk dunia informasi digital. Ranah ini mencakup kemampuan berpikir, memahami, dan menilai informasi secara rasional agar peserta tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga pengamat kritis terhadap cara kerja media di sekitarnya. Pengetahuan yang diperoleh dalam ranah kognitif menjadi fondasi bagi penguasaan keterampilan dan pembentukan sikap yang lebih reflektif dan bertanggung jawab dalam bermedia.

Pertama, peserta diharapkan memahami konsep dasar literasi media dan literasi digital. Pemahaman ini meliputi kesadaran bahwa literasi media bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis pesan di media digital, tetapi mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara kritis. Literasi digital, di sisi lain, menekankan kemampuan menggunakan teknologi informasi dengan aman, efektif, dan etis. Melalui pemahaman ini, peserta dapat melihat bahwa literasi media dan literasi digital merupakan dua hal yang saling melengkapi: literasi media membentuk kesadaran kritis terhadap isi informasi, sementara literasi digital memperkuat keterampilan teknis dalam mengelola teknologi yang digunakan untuk mengakses informasi tersebut.

Kedua, peserta perlu memahami cara kerja media sosial dan algoritma yang mengatur aliran informasi di dunia digital. Hal ini penting karena platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan TikTok tidak hanya menyalurkan pesan, tetapi juga secara aktif membentuk pengalaman pengguna melalui sistem algoritmik. Dengan mempelajari bagaimana algoritma bekerja—misalnya, dalam menentukan konten apa yang muncul di beranda atau video apa yang direkomendasikan—peserta dapat menyadari bahwa arus informasi di media digital tidak netral. Informasi yang mereka lihat merupakan hasil seleksi otomatis yang dipengaruhi oleh preferensi, interaksi, dan pola klik pengguna. Kesadaran ini menjadi dasar bagi kemampuan kritis untuk tidak menerima begitu saja apa yang tampil di layar sebagai representasi kebenaran, melainkan memahami adanya kepentingan ekonomi dan sosial di balik sistem rekomendasi tersebut.

Ketiga, pelatihan ini mendorong peserta untuk memahami struktur produksi informasi. Informasi yang beredar di media tidak lahir secara alamiah, tetapi melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan banyak pihak: pembuat konten, editor, pemilik media, algoritma, dan audiens. Peserta perlu mengenali bahwa setiap informasi membawa sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, maupun ideologis. Pemahaman terhadap struktur produksi ini membantu peserta untuk menilai kredibilitas sumber dan melihat bahwa “kebenaran media” sering kali merupakan hasil negosiasi antara berbagai kekuatan yang bekerja di belakang layar. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga pengamat aktif terhadap proses produksi makna di ruang digital.

Keempat, peserta juga harus memahami kategori dan bentuk disinformasi yang marak di lingkungan digital. Disinformasi bukan sekadar berita palsu (*fake news*), tetapi

mencakup berbagai bentuk manipulasi informasi seperti misinformasi (kesalahan tanpa niat jahat), malinformasi (informasi benar yang disebarkan untuk merugikan pihak tertentu), serta propaganda dan *clickbait* yang dibuat untuk menarik perhatian tanpa memperhatikan kebenaran. Dengan mempelajari perbedaan ini, peserta dapat mengidentifikasi pola-pola penyesatan informasi yang sering muncul di grup WhatsApp, media sosial, maupun situs berita tidak kredibel. Pemahaman ini menjadi bekal untuk menumbuhkan kewaspadaan dan kemampuan membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang menyesatkan.

Kelima, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang kuat mengenai prinsip keamanan digital dan etika digital. Di era di mana data pribadi mudah disebarluaskan dan privasi semakin rentan, keamanan digital menjadi kebutuhan dasar setiap masyarakat. Peserta perlu memahami cara melindungi identitas digital, mengelola kata sandi, menghindari tautan berbahaya, serta mengaktifkan fitur keamanan seperti verifikasi dua langkah. Selain aspek teknis, pelatihan ini juga menanamkan kesadaran etis dalam bermedia—seperti menghormati hak cipta, menjaga privasi orang lain, serta menahan diri dari menyebarkan konten yang berpotensi menimbulkan kebencian, fitnah, atau keresahan sosial.

Dengan menguasai kelima komponen pengetahuan ini, peserta diharapkan memiliki landasan kognitif yang kokoh untuk menghadapi dunia digital secara kritis dan beretika. Pemahaman yang utuh terhadap konsep, mekanisme, dan struktur media akan membantu mereka berpikir reflektif, menghindari manipulasi, serta memanfaatkan media sebagai sarana pemberdayaan, bukan sebagai alat penyesatan. Ranah kognitif dengan demikian menjadi langkah awal menuju pembentukan masyarakat desa

yang melek media—bukan hanya dalam arti teknologis, tetapi juga dalam arti sosial dan moral.

7.3.2 Ranah Keterampilan (Psikomotorik)

Ranah keterampilan atau psikomotorik dalam pelatihan literasi media berfokus pada kemampuan peserta untuk menerapkan pengetahuan dan kesadaran kritis dalam tindakan nyata. Jika ranah kognitif berorientasi pada pemahaman konseptual dan analitis, maka ranah psikomotorik menekankan penerjemahan pengetahuan tersebut ke dalam praktik yang konkret dan aplikatif. Dalam konteks masyarakat desa, kemampuan ini sangat penting agar literasi media tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar menjadi keterampilan hidup (*life skill*) yang mendukung ketahanan sosial dan kemandirian masyarakat di tengah arus informasi digital.

Pertama, peserta diharapkan mampu melakukan verifikasi sederhana terhadap informasi digital melalui pencarian sumber, pemeriksaan gambar, dan analisis konten. Keterampilan ini merupakan fondasi utama dalam praktik literasi media di lapangan. Peserta dilatih untuk menggunakan berbagai teknik dasar verifikasi seperti melakukan pencarian balik gambar (*reverse image search*), menelusuri asal sumber berita, memeriksa tanggal publikasi, dan membandingkan isi informasi dengan sumber resmi yang kredibel. Melalui proses ini, peserta belajar bahwa kebenaran informasi harus diuji, bukan diterima begitu saja. Verifikasi sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi benteng pertama masyarakat desa dalam melawan penyebaran hoaks dan disinformasi yang kerap beredar di grup pesan instan atau media sosial.

Kedua, peserta dilatih untuk menggunakan fitur keamanan digital dasar guna melindungi data pribadi dan aktivitas daring mereka. Keterampilan ini meliputi

kemampuan mengatur kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah (*two-factor authentication*), mengenali tautan atau situs berbahaya (*phishing*), serta mengelola privasi akun media sosial. Pelatihan juga menekankan pentingnya kebiasaan digital yang aman, seperti tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, tidak menyimpan data sensitif di perangkat umum, dan memahami kebijakan privasi aplikasi yang digunakan. Dalam konteks masyarakat desa, penguasaan keamanan digital tidak hanya melindungi individu, tetapi juga melindungi komunitas dari ancaman penipuan, peretasan, dan penyalahgunaan data.

Ketiga, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hoaks dan konten manipulatif dengan menggunakan pengetahuan dan nalarnya secara kritis. Dalam pelatihan, peserta diajak untuk menganalisis berbagai bentuk konten menyesatkan, baik yang berbentuk teks, gambar, maupun video, serta memahami teknik manipulasi yang sering digunakan—seperti penggunaan judul provokatif (*clickbait*), pengambilan konteks sebagian (*out of context*), atau penyebaran narasi berbasis emosi. Keterampilan ini dikembangkan melalui latihan-latihan berbasis kasus nyata yang diambil dari pengalaman masyarakat desa, seperti hoaks tentang bantuan pemerintah, isu politik lokal, atau fitnah antar masyarakat. Dengan menguasai kemampuan ini, peserta dapat berperan sebagai “penjaga informasi” di lingkungan sosialnya, membantu orang lain untuk memilah mana informasi yang layak dipercaya dan mana yang perlu diwaspadai.

Keempat, pelatihan ini mendorong peserta untuk membuat konten positif berbasis komunitas desa sebagai wujud penerapan literasi media yang produktif. Peserta tidak hanya diajarkan untuk menolak atau mengoreksi informasi salah, tetapi juga diajak untuk menjadi produsen informasi yang mencerdaskan dan memperkuat kohesi sosial di tingkat

lokal. Kegiatan ini dapat berupa pembuatan poster digital tentang keamanan informasi, video singkat yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks, atau publikasi cerita inspiratif tentang kegiatan gotong royong dan inovasi desa. Melalui proses ini, peserta belajar bahwa literasi media sejati bukan hanya kemampuan bertahan di tengah banjir informasi, tetapi juga kemampuan berkontribusi aktif dalam membangun ekosistem media yang sehat dan berdaya.

Lebih jauh, keterampilan ini memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Ketika masyarakat desa mampu mempraktikkan verifikasi informasi, menjaga keamanan digital, mengidentifikasi manipulasi, dan memproduksi konten positif, mereka tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memperkuat ketahanan informasi komunitasnya. Desa menjadi ruang yang lebih sadar, lebih reflektif, dan lebih mandiri dalam menghadapi dinamika komunikasi global. Dengan demikian, ranah keterampilan dalam pelatihan ini tidak hanya membentuk kompetensi teknis, tetapi juga membangun etos kolektif untuk bermedia secara kritis, aman, dan bermartabat.

7.3.3 Ranah Afektif (Sikap)

Ranah afektif dalam pelatihan literasi media mencakup dimensi nilai, kesadaran, dan disposisi moral yang membentuk cara peserta bersikap terhadap informasi dan media digital. Jika ranah kognitif mengajarkan “apa yang harus diketahui” dan ranah psikomotorik mengasah “apa yang harus dilakukan”, maka ranah afektif menekankan “bagaimana seharusnya bersikap.” Dalam konteks masyarakat desa yang memiliki tradisi komunikasi berbasis kepercayaan dan kedekatan sosial, pembentukan sikap kritis dan etis menjadi sangat penting agar kemampuan literasi media yang diperoleh tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

Pertama, peserta diharapkan menunjukkan sikap kritis tetapi tetap terbuka dalam menerima informasi. Sikap kritis berarti kemampuan untuk menilai kebenaran, relevansi, dan tujuan dari setiap informasi yang diterima. Namun, kekritisannya ini tidak boleh berubah menjadi kecurigaan yang berlebihan atau sikap menolak segala hal baru. Keterbukaan tetap diperlukan agar peserta dapat mempelajari perspektif lain dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam pelatihan, sikap ini ditumbuhkan melalui dialog dan refleksi, di mana peserta diajak untuk mempertanyakan tanpa menghakimi, serta mendiskusikan perbedaan pandangan dengan cara yang santun dan rasional. Dengan demikian, peserta tidak hanya belajar mengenali manipulasi informasi, tetapi juga belajar mengelola emosi dan prasangka pribadi dalam berinteraksi di ruang digital.

Kedua, pelatihan ini menumbuhkan kesadaran etis dalam berbagi konten. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi sosial. Mengunggah, mengomentari, atau meneruskan pesan bukanlah tindakan netral, karena dapat memengaruhi persepsi, emosi, bahkan reputasi orang lain. Oleh karena itu, peserta didorong untuk menimbang aspek moral sebelum menyebarkan suatu konten: apakah informasi tersebut benar, apakah ia bermanfaat, dan apakah penyebarannya tidak akan melukai pihak lain. Kesadaran etis ini juga berarti menghormati privasi individu, menghindari ujaran kebencian, serta tidak memanfaatkan media untuk tujuan yang merugikan komunitas. Dalam konteks desa, etika digital dapat dihubungkan dengan nilai-nilai lokal seperti sopan santun, rasa malu, dan tanggung jawab sosial, yang sejak lama menjadi bagian dari budaya komunikasi masyarakat.

Ketiga, peserta perlu mengembangkan kemampuan menahan diri dari meneruskan informasi yang belum diverifikasi. Dalam era digital yang ditandai dengan

kecepatan dan keterhubungan, kemampuan untuk menunda tindakan menjadi bentuk kebijaksanaan baru. Banyak kasus penyebaran hoaks di masyarakat bermula bukan dari niat jahat, tetapi dari kebiasaan terburu-buru membagikan informasi tanpa berpikir panjang. Oleh karena itu, pelatihan literasi media harus membangun kebiasaan reflektif—yaitu berhenti sejenak untuk memeriksa kebenaran sebelum bertindak. Sikap menahan diri ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan digital, tetapi juga kepedulian terhadap harmoni sosial di lingkungan komunitas. Seorang masyarakat digital yang beretika tidak sekadar berhati-hati demi diri sendiri, tetapi juga karena ia menyadari dampak sosial dari setiap pesan yang disebarkan.

Keempat, peserta diharapkan menumbuhkan tanggung jawab sebagai masyarakat digital dalam komunitas. Dunia digital adalah perpanjangan dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, setiap individu memiliki peran sebagai bagian dari komunitas digital yang saling terhubung. Tanggung jawab ini mencakup kepedulian terhadap keamanan dan kenyamanan bersama di ruang daring, serta kesediaan untuk menjadi contoh dalam praktik bermedia yang bijak. Dalam konteks pelatihan literasi media di desa, masyarakat yang memiliki tanggung jawab digital akan berperan sebagai *agent of change*—mereka yang aktif meluruskan informasi keliru, membantu orang lain memahami cara bermedia yang aman, dan mendorong terciptanya lingkungan digital yang sehat serta produktif.

Lebih jauh, ranah afektif ini berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan dan tindakan. Ia memastikan bahwa kemampuan teknis yang dimiliki peserta tidak digunakan secara serampangan, tetapi dikendalikan oleh kesadaran moral dan empati sosial. Pembentukan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab menjadi fondasi bagi pembangunan budaya digital yang humanis dan

berkeadaban, di mana media tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan sarana memperkuat solidaritas dan kemanusiaan.

Dengan demikian, pengembangan ranah afektif dalam pelatihan literasi media bukan hanya soal menanamkan nilai, tetapi juga membangun karakter masyarakat digital yang sadar dan beretika. Masyarakat desa yang kritis dan terbuka, etis dalam berbagi, mampu menahan diri, dan bertanggung jawab terhadap komunitasnya akan menjadi contoh nyata bagaimana literasi media dapat mentransformasikan perilaku dan memperkuat ketahanan sosial di era informasi.

7.3.4 Ranah Sosial-Komunal

Ranah sosial-komunal dalam pelatihan literasi media menekankan dimensi kolektif dan partisipatif dari hasil belajar. Jika tiga ranah sebelumnya — kognitif, psikomotorik, dan afektif — berfokus pada perkembangan individu, maka ranah ini menegaskan bahwa keberhasilan literasi media sejati terletak pada kemampuannya untuk membangun kesadaran dan tindakan sosial yang berdampak pada komunitas. Pelatihan literasi media tidak berhenti pada peningkatan kapasitas personal, melainkan harus menghasilkan masyarakat yang mampu berkontribusi aktif bagi lingkungannya, membangun solidaritas digital, dan memperkuat ketahanan informasi di tingkat lokal.

Pertama, peserta diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi digital di tingkat desa. Partisipasi ini tidak sekadar berarti keikutsertaan dalam forum daring seperti grup WhatsApp masyarakat, laman media sosial desa, atau forum komunitas digital, tetapi juga kemampuan untuk berperan secara konstruktif di dalamnya. Peserta dilatih untuk menyampaikan pendapat secara sopan, berbasis data, dan menghormati pandangan orang lain, sekaligus membantu menjaga suasana komunikasi yang sehat dan produktif.

Dalam konteks pelatihan literasi media, hal ini juga mencakup kemampuan untuk menengahi perdebatan digital yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, serta mengarahkan percakapan menuju dialog yang lebih edukatif. Dengan kata lain, peserta tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga penjaga ruang publik digital di tingkat desa — memastikan bahwa media digital digunakan untuk memperkuat keterbukaan, partisipasi, dan kolaborasi masyarakat.

Kedua, peserta diharapkan mampu menjadi agen edukasi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Literasi media yang efektif adalah yang menular — ketika seseorang yang telah sadar dan terlatih kemudian menularkan pengetahuannya kepada orang lain. Dalam masyarakat desa yang memiliki jaringan sosial kuat berbasis kekerabatan dan kedekatan emosional, peran ini sangat penting. Peserta pelatihan dapat menjadi sumber rujukan bagi keluarga, tetangga, atau rekan kerja dalam hal verifikasi informasi, penggunaan media sosial yang bijak, serta keamanan digital. Misalnya, mereka dapat membantu orang tua memahami cara melindungi anak dari konten negatif, membantu kelompok tani mengenali penipuan daring, atau membantu masyarakat lansia menggunakan ponsel secara aman. Dengan demikian, literasi media tidak berhenti sebagai pengetahuan individu, tetapi menjadi gerakan sosial yang tumbuh dari bawah — *grassroots literacy movement* — yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap arus disinformasi.

Ketiga, peserta didorong untuk terlibat dalam program literasi media berbasis komunitas di desanya. Keterlibatan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti mengorganisasi kelas belajar masyarakat, menjadi relawan pelatihan literasi digital, mengelola papan informasi desa, atau membuat media komunitas seperti buletin, radio lokal, dan kanal media sosial desa. Partisipasi

dalam program komunitas memungkinkan peserta untuk mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari secara langsung di lingkungan sosialnya, sambil membangun kapasitas kolektif masyarakat desa. Dalam hal ini, pelatihan literasi media berfungsi sebagai pemicu pembelajaran sosial berkelanjutan, di mana masyarakat saling mendukung dalam memecahkan masalah informasi dan komunikasi yang mereka hadapi bersama.

Lebih jauh, pengembangan ranah sosial-komunal juga mencerminkan prinsip dasar pendidikan nonformal — bahwa pembelajaran sejati tidak terjadi dalam isolasi individu, melainkan dalam interaksi sosial yang dinamis. Ketika peserta aktif berdiskusi, berbagi, dan bekerja sama dalam proyek literasi media di tingkat lokal, mereka sedang membangun *learning society* di desa: sebuah masyarakat pembelajar yang terbuka terhadap pengetahuan baru, saling mempercayai, dan memiliki semangat gotong royong dalam menjaga keberlanjutan informasi yang sehat.

Dengan demikian, capaian ranah sosial-komunal menjadi indikator penting keberhasilan pelatihan ini. Keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari sejauh mana peserta memahami konsep atau mampu melakukan verifikasi informasi, tetapi juga dari seberapa jauh mereka mampu mentransformasikan kesadaran individual menjadi tindakan sosial. Ketika masyarakat desa yang telah terlatih menjadi penggerak literasi di lingkungannya, membantu orang lain berpikir kritis, dan ikut menciptakan ruang digital yang aman dan beretika, maka tujuan literasi media yang sesungguhnya telah tercapai: membangun masyarakat yang sadar, tangguh, dan berdaya di era informasi.

7.4 Kompetensi Dasar Kurikulum

Kompetensi dasar berfungsi sebagai turunan dari kompetensi inti dan menjadi sasaran per modul. Kompetensi dasar pelatihan ini meliputi:

- Memahami apa itu informasi, jenis-jenis informasi, dan bagaimana informasi disebarkan.
- Mengidentifikasi ciri-ciri hoaks dan konten manipulatif.
- Melakukan verifikasi informasi sederhana.
- Melindungi data pribadi dan perangkat digital.
- Mengidentifikasi risiko media digital (hoaks, penipuan, judi *online*, radikalisme).
- Memahami prinsip etika digital dan konsekuensi hukumnya.
- Menggunakan alat bantu verifikasi seperti Reverse Image Search, cek fakta, dan pencarian cepat.
- Mengelola emosi saat menerima konten sensasional.
- Memproduksi konten positif berbasis komunitas yang aman dan etis.
- Berpartisipasi dalam edukasi dan gerakan literasi media berbasis desa.

Kompetensi dasar ini menjadi acuan spesifik untuk menyusun capaian pembelajaran, materi pokok, dan indikator per modul.

7.5 Peta Capaian Pembelajaran

Peta capaian pembelajaran (*learning outcomes map*) menunjukkan hubungan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan modul pelatihan. Peta ini membantu fasilitator memahami bagaimana setiap modul berkontribusi terhadap keseluruhan kompetensi peserta.

Struktur peta capaian pembelajaran:

Modul 1–2	Memperkuat pemahaman dasar tentang media, informasi, dan ekosistem digital.
Modul 3–5	Membangun keterampilan teknis dalam identifikasi hoaks, verifikasi, dan keamanan digital.
Modul 3–5	Membangun keterampilan teknis dalam identifikasi hoaks, verifikasi, dan keamanan digital.
Modul 6–8	Memperkuat kompetensi reflektif, etika digital, dan kemampuan produksi konten positif.
Modul 9–10	Mengembangkan partisipasi sosial, kolaborasi komunitas, dan rencana aksi desa.

Peta ini memastikan bahwa seluruh modul saling berhubungan dan membentuk kerangka pembelajaran yang sistematis.

7.6 Alur Pembelajaran Berbasis Model Spiral

Model spiral digunakan untuk mengatur alur pembelajaran dari konsep sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Dalam kurikulum ini, model spiral diterapkan melalui tiga lapisan pembelajaran:

Lapisan 1: Pemahaman Dasar

Diperoleh dari Modul 1 dan Modul 2 yang berfokus pada konsep informasi, media, dan pola konsumsi media.

Lapisan 2: Keterampilan Teknis

Diperkuat melalui Modul 3, Modul 4, dan Modul 5 yang mengajarkan keterampilan verifikasi, keamanan digital, dan identifikasi konten manipulatif.

Lapisan 3: Transformasi Perilaku dan Partisipasi Sosial

Dicapai melalui Modul 6 hingga Modul 10 yang mendorong peserta untuk berpikir kritis, beretika dalam ruang digital, memproduksi konten positif, dan berkolaborasi dalam program literasi digital di tingkat desa.

Model spiral memastikan bahwa setiap materi dipelajari secara bertahap, diperkuat melalui aktivitas praktis, dan diulang dalam konteks yang semakin kompleks.



Bagian 8

Silabus Pelatihan Literasi Media

Silabus pelatihan merupakan dokumen utama yang menjadi panduan fasilitator dalam menyelenggarakan pembelajaran secara sistematis, terarah, dan terukur. Dalam konteks pelatihan literasi media bagi masyarakat desa, silabus tidak hanya berisi daftar materi, tetapi juga mencakup rumusan capaian pembelajaran, kompetensi spesifik, metode pelatihan, media pembelajaran, indikator keberhasilan, serta strategi evaluasi. Silabus ini dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap situasi lapangan, namun tetap memegang prinsip pedagogis, andragogi, dan pembelajaran transformatif yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Silabus lengkap berikut mencakup sepuluh modul inti, masing-masing dengan struktur yang sama agar memudahkan fasilitator dalam implementasinya.

Modul 1

Pengenalan Literasi Media

Deskripsi Modul	Modul ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep literasi media, peran media dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana informasi dikonstruksi dan disebarkan. Peserta diajak menyadari bahwa media bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga medium pembentuk opini, perilaku, dan keputusan sosial.
Tujuan Modul	Peserta memahami konsep literasi media, peran media dalam kehidupan sosial, serta pentingnya kemampuan kritis dalam mengonsumsi informasi digital.
Capaian Pembelajaran	Setelah mengikuti modul ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan konsep literasi media secara sederhana. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis media yang digunakan di kehidupan sehari-hari. 3. Menganalisis bagaimana media memengaruhi perilaku, emosi, dan keputusan individu. 4. Menghubungkan pengalaman pribadi dengan fenomena media digital.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Memahami definisi dan ruang lingkup literasi media. • Menjelaskan perbedaan antara media tradisional dan media digital.

	• Mengenal karakteristik informasi digital (cepat, masif, tidak terverifikasi).
Materi Pokok	1. Pengertian literasi media. 2. Peran media dalam masyarakat. 3. Perubahan pola akses informasi di desa. 4. Media digital dan ekosistem informasi.
Metode Pembelajaran	• Diskusi kelompok kecil. • Refleksi pengalaman pribadi. • Tanya jawab terbuka. • Penggunaan gambar/video pemantik.
Media dan Sumber Belajar	Infografis, video singkat, contoh berita, smartphone peserta.
Kegiatan Pembelajaran	1. <i>Pembukaan</i>: fasilitator memancing peserta dengan pertanyaan tentang media yang mereka gunakan setiap hari. 2. <i>Kegiatan Inti</i>: peserta mengidentifikasi perubahan yang mereka alami sejak menggunakan smartphone. 3. <i>Penutup</i>: rangkuman tentang pentingnya literasi media di desa.
Studi Kasus Kontekstual	Hoaks pupuk subsidi yang menimbulkan kepanikan petani.
Evaluasi dan Penilaian	• Tes lisan: peserta menjelaskan definisi literasi media. • Penilaian sikap: kemampuan merefleksikan pengalaman digital secara kritis.

Modul 2

Jenis Informasi dan Cara Kerja Media

Deskripsi Modul	Modul ini membahas jenis-jenis informasi, struktur teks media, serta cara kerja platform digital dalam menyebarkan konten. Peserta diajak memahami bahwa tidak semua informasi memiliki tujuan yang sama dan bahwa media memiliki logika produksi tertentu.
Tujuan Modul	Peserta mampu mengenali berbagai jenis informasi dan memahami cara kerja media dalam membentuk pesan.
Capaian Pembelajaran	Peserta dapat: 1. Mengelompokkan informasi berdasarkan fungsi dan jenisnya. 2. Mengidentifikasi elemen-elemen dalam teks media. 3. Memahami konsep framing, clickbait, dan bias media.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Mengidentifikasi jenis informasi (faktual, opini, persuasi). • Menganalisis bentuk konstruksi pesan media. • Memahami pola kerja algoritma media sosial.
Materi Pokok	1. Struktur teks berita. 2. Fakta vs opini. 3. Cara kerja algoritma (WhatsApp, TikTok, YouTube).

	4. Teknik framing dan clickbait.
Metode Pembelajaran	• Studi kasus konten viral. • Analisis teks berita. • Diskusi kelompok.
Media dan Sumber Belajar	Contoh postingan viral, potongan berita, video TikTok edukatif.
Kegiatan Pembelajaran	1. Mengelompokkan konten menjadi fakta, opini, atau iklan. 2. Diskusi tentang contoh framing di media lokal.
Studi Kasus Kontekstual	Clickbait tentang isu penculikan anak yang sering beredar di grup WhatsApp desa.
Evaluasi dan Penilaian	Analisis singkat: peserta diminta memilah konten berdasarkan jenis informasi.

Modul 3

Mengidentifikasi Hoaks dan Disinformasi

Deskripsi Modul	Modul ini fokus pada ciri-ciri hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Peserta belajar mengenali tanda-tanda konten palsu serta cara mengidentifikasi narasi manipulatif yang sering menyasar komunitas desa.
Tujuan Modul	Peserta mampu mengidentifikasi hoaks secara cepat dan memahami motif penyebarannya.

Capaian Pembelajaran	1. Menyebutkan tanda-tanda umum hoaks. 2. Mengidentifikasi konten hoaks dari contoh nyata. 3. Menjelaskan bagaimana hoaks memengaruhi sikap dan perilaku.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Mengidentifikasi ciri visual dan teks hoaks. • Mengenali motif pembuat hoaks. • Memahami jalur penyebaran disinformasi di desa.
Materi Pokok	1. Definisi misinformasi, disinformasi, malinformasi. 2. Ciri umum hoaks. 3. Penyebaran hoaks via WhatsApp. 4. Dampak hoaks bagi komunitas desa.
Metode Pembelajaran	• Simulasi identifikasi hoaks. • Analisis gambar/editan. • Diskusi kasus nyata.
Media dan Sumber Belajar	Screenshot hoaks lokal, pesan WhatsApp, infografis cek fakta.
Kegiatan Pembelajaran	Peserta memeriksa contoh hoaks dan menjelaskan alasannya.
Studi Kasus Kontekstual	Hoaks pembagian BLT palsu yang sempat memicu antrean masyarakat.
Evaluasi dan Penilaian	Tes praktik: peserta mengidentifikasi tiga contoh hoaks.

Modul 4

Etika Digital dan Perilaku Bertanggungjawab

Deskripsi Modul	Modul ini menekankan pentingnya etika digital, konsekuensi hukum berbagi informasi, dan dampak sosial dari penyebaran konten negatif.
Tujuan Modul	Peserta memahami prinsip etika digital dan konsekuensi hukum UU ITE.
Capaian Pembelajaran	1. Menjelaskan prinsip dasar etika digital. 2. Menyebutkan perilaku digital yang aman dan sopan. 3. Menjelaskan risiko hukum penyebaran hoaks.
Materi Pokok	• Prinsip etika digital. • Privasi dan keamanan. • UU ITE dalam bahasa sederhana.
Metode	Diskusi, permainan peran, studi kasus sengketa digital di desa.

Modul 5

Verifikasi Informasi Praktis (Alat & Teknik)

Deskripsi Modul	Modul ini memberikan pelatihan praktis mengenai cara memverifikasi informasi digital menggunakan teknik sederhana dan alat bantu yang tersedia di smartphone. Peserta diperkenalkan pada langkah-langkah verifikasi dasar untuk memeriksa teks, gambar, video, serta tautan yang mencurigakan. Fokus modul ini adalah keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan Modul	Peserta mampu melakukan verifikasi informasi secara mandiri menggunakan alat bantu digital sederhana.
Capaian Pembelajaran	Peserta dapat: 1. Melakukan pencarian silang (<i>cross-check</i>) terhadap suatu berita. 2. Memeriksa keaslian gambar menggunakan <i>reverse image search</i>. 3. Mengidentifikasi tautan berbahaya atau mencurigakan. 4. Menggunakan platform cek fakta nasional.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Melakukan verifikasi teks: judul, sumber, tanggal, konteks. • Menggunakan tools verifikasi: Google Search, Google Lens, TinEye.

	• Mengidentifikasi manipulasi konten visual. • Membedakan situs kredibel dan tidak kredibel.
Materi Pokok	1. Prinsip verifikasi informasi. 2. Teknik cek cepat (lima langkah): baca tuntas, cek sumber, cek tanggal, cari sumber pembandingan, cek penulis. 3. Tools: Google Search, Google Lens, Reverse Image Search, situs cek fakta (Kominfo, Mafindo, Tempo, Liputan6 Cek Fakta). 4. Studi kasus hoaks berbasis gambar.
Metode Pembelajaran	• Simulasi verifikasi konten. • Demonstrasi teknis menggunakan smartphone. • Latihan berpasangan.
Media dan Sumber Belajar	Smartphone peserta, koneksi internet (opsional), contoh gambar hoaks, tautan palsu, poster cek fakta.
Kegiatan Pembelajaran	1. Pembukaan: fasilitator menjelaskan pentingnya verifikasi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Inti: peserta mempraktikkan verifikasi gambar menggunakan Google Lens. 3. Penutup: refleksi tentang hambatan verifikasi yang sering dihadapi.
Studi Kasus Kontekstual	Gambar editan bencana alam palsu yang sering beredar di grup desa.

Evaluasi dan Penilaian	Tes praktik: peserta memeriksa dua gambar dan satu teks berita menggunakan tools verifikasi.
-------------------------------	--

Modul 6

Keamanan Digital untuk Masyarakat Desa

Deskripsi Modul	Modul ini melatih masyarakat desa untuk melindungi data pribadi, mengenali ancaman digital, dan memahami praktik keamanan dasar dalam menggunakan smartphone dan internet. Fokus utamanya adalah menciptakan perilaku aman dalam aktivitas digital sehari-hari.
Tujuan Modul	Peserta memahami konsep dasar keamanan digital dan mampu menerapkan praktik perlindungan diri yang sederhana tetapi efektif.
Capaian Pembelajaran	1. Mengubah dan mengelola kata sandi dengan aman. 2. Mengaktifkan autentikasi dua faktor (A2F). 3. Mengenali phishing, penipuan tautan, dan aplikasi berbahaya. 4. Menjaga kerahasiaan data pribadi.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Mengatur keamanan akun. • Mengidentifikasi tanda phishing dan penipuan digital. • Mengelola izin aplikasi. • Melindungi perangkat fisik (smartphone).

Materi Pokok	1. Konsep dasar keamanan digital. 2. Jenis ancaman digital: phishing, malware, spyware, penipuan OTP. 3. Praktik keamanan: kata sandi kuat, A2F, backup. 4. Risiko aplikasi ilegal atau modifikasi.
Metode Pembelajaran	• Demonstrasi langsung. • Simulasi phishing. • Diskusi pengalaman peserta sebagai korban atau saksi penipuan.
Media dan Sumber Belajar	Smartphone, contoh tautan palsu, template phishing, poster keamanan digital.
Kegiatan Pembelajaran	1. Peserta mempraktikkan mengaktifkan A2F. 2. Identifikasi bersama contoh pesan phishing. 3. Diskusi langkah proteksi data pribadi.
Studi Kasus Kontekstual	Kasus penipuan undian hadiah palsu yang menyeret data masyarakat desa.
Evaluasi dan Penilaian	Tes praktik: peserta diminta mengenali pesan palsu dalam tiga contoh kasus.

Modul 7

Produksi Konten Positif Berbasis Komunitas

Deskripsi Modul	Modul ini bertujuan mengembangkan kemampuan peserta dalam membuat konten positif yang relevan dengan kebutuhan komunitas desa. Konten tersebut dapat berupa informasi pertanian, UMKM, kegiatan masyarakat, atau informasi layanan publik.
Tujuan Modul	Peserta mampu membuat konten digital sederhana yang informatif, akurat, dan bermanfaat bagi desa.
Capaian Pembelajaran	1. Membuat konten sederhana (gambar, video pendek, poster). 2. Menulis narasi informatif yang jelas dan mudah dipahami. 3. Menggunakan aplikasi pengeditan sederhana. 4. Mengelola penyebaran konten secara etis.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Menyusun naskah konten. • Mengambil gambar/video dasar. • Menggunakan alat editing sederhana seperti Canva, CapCut. • Memahami etika produksi konten.
Materi Pokok	1. Prinsip dasar produksi konten. 2. Struktur pesan yang efektif. 3. Etika representasi dan penggunaan foto. 4. Teknik editing sederhana.

Metode Pembelajaran	• Workshop kreatif. • Praktik membuat konten. • Review hasil konten peserta.
Media dan Sumber Belajar	Smartphone, Canva, CapCut, template poster, gambar desa.
Kegiatan Pembelajaran	1. Peserta membuat konten informatif 30 detik tentang kegiatan desa. 2. Diskusi kelompok tentang etika penggunaan foto orang lain. 3. Penyempurnaan konten melalui feedback.
Studi Kasus Kontekstual	Pembuatan poster digital untuk sosialisasi jadwal posyandu atau pencegahan hoaks di desa.
Evaluasi dan Penilaian	Penilaian proyek: satu konten video atau poster informatif.

Modul 8

Strategi Komunikasi Publik untuk Desa

Deskripsi Modul	Modul ini membantu perangkat desa, kader, dan masyarakat memahami cara menyampaikan informasi publik secara efektif melalui media digital. Tujuannya mengurangi ruang hoaks dengan memperkuat kanal informasi resmi desa.
Tujuan Modul	Peserta mampu merancang strategi komunikasi publik yang jelas, akurat, dan sesuai konteks budaya lokal.
Capaian Pembelajaran	1. Menyusun pesan publik sederhana.

	2. Mengelola kanal resmi desa (WhatsApp, Facebook Page, papan informasi digital). 3. Menerapkan prinsip komunikasi yang transparan dan responsif. 4. Menganalisis risiko miskomunikasi.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Menyusun strategi komunikasi desa. • Menyebarkan informasi resmi secara aman dan cepat. • Mengelola interaksi masyarakatnet secara positif.
Materi Pokok	1. Prinsip komunikasi publik. 2. Struktur pesan yang informatif dan tidak ambigu. 3. Manajemen akun media sosial desa. 4. Transparansi dan akuntabilitas informasi.
Metode Pembelajaran	• Simulasi penyusunan pesan. • Diskusi kasus miskomunikasi publik. • Roleplay antara perangkat desa dan masyarakat.
Media dan Sumber Belajar	Contoh publikasi desa, template pesan, poster informasi.
Kegiatan Pembelajaran	1. Peserta menyusun satu pesan layanan publik yang jelas. 2. Analisis kesalahan umum dalam penyampaian informasi resmi. 3. Strategi merespons komentar negatif secara konstruktif.

Studi Kasus Kontekstual	Kesalahpahaman publik akibat pesan desa yang tidak lengkap atau tidak jelas.
Evaluasi dan Penilaian	Penilaian dokumen: satu pesan publik yang telah direvisi.

Modul 9

Pencegahan Dampak Negatif Media Digital

Deskripsi Modul	Modul ini menyoroti konten dan aktivitas digital berisiko tinggi: judi online, radikalisme digital, pornografi, dan polarisasi sosial. Fokusnya pada pencegahan dan edukasi keluarga serta komunitas.
Tujuan Modul	Peserta mengenali bentuk-bentuk risiko digital dan mampu mengambil tindakan preventif.
Capaian Pembelajaran	1. Mengidentifikasi jenis risiko digital. 2. Memahami mekanisme penyebaran risiko tersebut. 3. Menerapkan strategi pencegahan berbasis komunitas. 4. Mengambil langkah responsif ketika menemukan kasus.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Mengenali tanda kecanduan judi online. • Memahami pola radikalisasi digital. • Melindungi anak dari paparan pornografi.

	• Memfasilitasi dialog sehat dalam komunitas.
Materi Pokok	1. Judi online dan dampaknya. 2. Radikalisme digital dan echo chamber. 3. Pornografi dan risiko bagi anak. 4. Polarisasi sosial akibat algoritma.
Metode Pembelajaran	• Diskusi sensitif namun terarah. • Analisis mekanisme algoritma. • Simulasi kasus risiko digital.
Media dan Sumber Belajar	Grafik pola radikalisasi, contoh iklan judi, skenario kasus anak.
Kegiatan Pembelajaran	1. Identifikasi tanda kecanduan judi digital. 2. Pemetaan risiko dalam lingkungan desa. 3. Merancang pesan pencegahan komunitas.
Studi Kasus Kontekstual	Kasus meningkatnya judi online setelah tersebarnya tautan melalui grup WhatsApp pemuda.
Evaluasi dan Penilaian	Penilaian reflektif: peserta menulis langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungannya.

Modul 10

Aksi Komunitas: Program Literasi Media Berkelanjutan

Deskripsi Modul	Modul terakhir ini dirancang untuk memfasilitasi peserta dalam membangun rencana aksi (action plan) literasi media tingkat desa yang bersifat berkelanjutan.
Tujuan Modul	Peserta mampu merancang program literasi media berbasis komunitas yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh desa.
Capaian Pembelajaran	1. Menyusun rencana aksi literasi media desa. 2. Membentuk tim atau kader literasi media. 3. Merancang kampanye literasi digital lokal. 4. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi program.
Kompetensi Utama & Sub-Kompetensi	• Perencanaan program berbasis komunitas. • Kolaborasi antar masyarakat. • Advokasi informasi sehat. • Pengorganisasian kegiatan edukatif.
Materi Pokok	1. Prinsip pengorganisasian komunitas. 2. Langkah-langkah perencanaan program. 3. Model kampanye literasi desa. 4. Monitoring dan evaluasi sederhana.

Metode Pembelajaran	• Workshop perencanaan. • Diskusi tim. • Presentasi rencana aksi.
Media dan Sumber Belajar	Template rencana aksi, papan tulis, infografis kampanye digital.
Kegiatan Pembelajaran	1. Peserta membuat rencana aksi desa. 2. Presentasi antar kelompok. 3. Revisi dan finalisasi.
Studi Kasus Kontekstual	Desa yang membuat Gerakan “Stop Hoaks Nagari Kita”.
Evaluasi dan Penilaian	Penilaian proyek: satu rencana aksi literasi media desa.

Bagian 9

Peran Fasilitator Desa

Pelaksanaan pelatihan literasi media bagi masyarakat desa sangat bergantung pada kualitas proses fasilitasi yang dijalankan oleh pendamping atau fasilitator. Dalam konteks pendidikan nonformal, fasilitator bukan hanya pengajar, tetapi juga pemantik dialog, penengah dinamika kelompok, mediator konflik, dan pendamping proses refleksi kritis. Peran fasilitator menjadi sangat sentral karena materi literasi media menyentuh isu-isu sensitif yang berkaitan dengan cara pikir, kebiasaan, dan pengalaman digital masyarakat. Selain itu, pelatihan literasi media membutuhkan suasana belajar yang aman, terbuka, dan saling percaya, sehingga kompetensi fasilitator dalam mengelola proses pembelajaran menentukan keberhasilan pelatihan secara keseluruhan. Bab ini menguraikan peran fasilitator secara mendalam, termasuk keterampilan yang dibutuhkan, sensitivitas terhadap konteks desa, serta prinsip etika yang harus dipegang dalam menyelenggarakan pelatihan.

9.1 Fasilitator sebagai Penggerak Pembelajaran

Dalam pelatihan literasi media, fasilitator menempati posisi yang sangat strategis sebagai penggerak utama proses

pembelajaran. Peran ini jauh melampaui fungsi sebagai penyampai materi atau instruktur teknis. Fasilitator berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pengetahuan konseptual dengan pengalaman konkret peserta, sehingga pembelajaran tidak berlangsung secara satu arah, tetapi tumbuh dari interaksi dialektis antara pengetahuan baru dan pengalaman hidup masyarakat desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan nonformal dan teori andragogi yang menempatkan pengalaman peserta sebagai sumber belajar yang berharga. Dalam konteks ini, fasilitator bertugas menciptakan ruang belajar yang aman, terbuka, dan egaliter, di mana peserta merasa dihargai dan terdorong untuk berbagi pengalaman mereka secara sukarela.

Oleh karena itu, fasilitator perlu mampu mengawali setiap sesi dengan pertanyaan pemantik yang menstimulasi rasa ingin tahu, mendorong refleksi, dan membuka percakapan kritis. Pertanyaan semacam “siapa yang pernah menerima pesan mencurigakan?” atau “apa pengalaman Anda dengan berita viral belakangan ini?” bukan sekadar pembuka percakapan, tetapi strategi pedagogis untuk mengundang peserta masuk ke proses pembelajaran melalui pengalaman mereka sendiri. Dengan memberi ruang bagi peserta untuk menceritakan kisah nyata terkait hoaks, penipuan digital, peretasan akun, atau konten berbahaya lainnya, fasilitator sedang mengaktifkan mekanisme *experiential learning*—sebuah dasar penting dalam pendidikan orang dewasa yang memungkinkan pengalaman berubah menjadi pemahaman.

Namun, ruang belajar dalam masyarakat desa tidak pernah steril dari dinamika sosial dan relasi kekuasaan. Kehadiran tokoh masyarakat, pemuka agama, perangkat desa, atau figur otoritatif lainnya sering memengaruhi suasana pelatihan dan pola partisipasi peserta. Dalam kondisi demikian, fasilitator harus memiliki kepekaan sosial yang

tinggi. Ia perlu menjaga keseimbangan antara memberikan penghormatan kepada tokoh yang hadir dan memastikan seluruh peserta, tanpa memandang status sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Keahlian ini membutuhkan kemampuan membaca situasi, menggunakan bahasa yang inklusif, serta melibatkan peserta secara aktif tanpa menciptakan persaingan atau rasa sungkan yang dapat menghambat dinamika dialogis.

Selain mengelola interaksi, fasilitator juga bertanggung jawab untuk menghubungkan cerita pribadi peserta dengan pemahaman struktural yang lebih luas. Ketika seorang masyarakat menceritakan pengalaman tertipu melalui pesan WhatsApp, misalnya, fasilitator tidak hanya merespons pengalaman tersebut secara moral (“benar” atau “salah”), tetapi mengarahkan peserta untuk memahami mekanisme teknis dan sosial di balik penipuan digital. Ia membantu mengurai motif pelaku, pola manipulasi, ciri pesan menyesatkan, hingga cara melindungi diri dan keluarga dari insiden serupa. Dengan pendekatan ini, kisah pribadi tidak berhenti sebagai anekdot, tetapi berkembang menjadi proses pembelajaran kolektif yang membuka kesadaran kritis terhadap struktur dan logika operasi dunia digital.

Dengan demikian, fasilitator dalam pelatihan literasi media berperan bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pendengar, mediator, pengarah dialog, dan pengolah pengalaman sosial menjadi pengetahuan kritis. Keberhasilan pelatihan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun suasana belajar yang partisipatif dan reflektif, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman baru, tetapi juga merasa terlibat dalam proses pembentukan kesadaran kolektif terhadap tantangan media digital di desa.

9.2 Keterampilan Fasilitator dalam Konteks Pelatihan

Fasilitator yang efektif dalam pelatihan literasi media bukan hanya individu yang menguasai materi, tetapi juga sosok yang mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam dialog yang hidup, bermakna, dan relevan bagi peserta. Dalam konteks masyarakat desa, di mana pola komunikasi interpersonal memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk suasana belajar, keterampilan fasilitator dalam berkomunikasi secara empatik, hangat, dan menghargai pengalaman peserta menjadi faktor penentu keberhasilan pelatihan. Fasilitator harus mampu mengembangkan gaya komunikasi yang tidak menggurui, melainkan membuka ruang dialog yang setara. Bahasa yang digunakan hendaknya sederhana, jelas, dan bebas dari jargon teknis yang berpotensi membingungkan peserta. Ketika diperlukan, penggunaan bahasa lokal atau ungkapan-ungkapan familiar menjadi strategi penting untuk membangun kedekatan emosional dan menciptakan rasa nyaman bagi peserta yang mungkin merasa asing dengan istilah literasi media.

Selain keterampilan komunikasi interpersonal, fasilitator juga harus memiliki kemampuan teknis dasar dalam verifikasi informasi dan keamanan digital. Penguasaan ini bukan hanya untuk keperluan demonstrasi, tetapi juga untuk memberikan dukungan praktis ketika peserta membawa kasus nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitator perlu mampu menunjukkan secara langsung penggunaan alat-alat verifikasi seperti pencarian gambar terbalik (*reverse image search*), Google Lens, pengecekan tautan mencurigakan, atau langkah-langkah sederhana untuk memeriksa kredibilitas sumber berita. Demonstrasi teknis semacam ini membantu peserta memahami bahwa literasi media bukan konsep abstrak, tetapi keterampilan nyata yang dapat diterapkan secara langsung melalui perangkat yang mereka miliki.

Selain keterampilan teknis, fasilitator juga dituntut memiliki kemampuan analisis kontekstual yang kuat. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, nilai budaya, serta dinamika komunikasi yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, fasilitator harus mampu membaca konteks lokal dengan cermat, memahami struktur kekuasaan informal, memetakan isu-isu sensitif yang berpotensi memicu ketegangan, serta mengenali figur-figur yang memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas. Pengetahuan ini memungkinkan fasilitator menyesuaikan strategi penyampaian materi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau menimbulkan resistensi dari peserta. Misalnya, dalam komunitas desa yang sangat menghormati otoritas tokoh agama, fasilitator perlu berhati-hati ketika membahas isu hoaks keagamaan. Pendekatan yang terlalu konfrontatif atau sikap yang terkesan meremehkan dapat menimbulkan penolakan, baik secara terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu, fasilitator harus mampu membangun dialog yang menghormati keyakinan peserta sambil tetap mengarahkan mereka pada pemikiran kritis.

Keterampilan lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan mengelola konflik. Diskusi mengenai literasi media sering kali memunculkan ketegangan karena peserta memiliki pandangan politik, agama, atau identitas tertentu yang berbeda. Ketika perdebatan mengarah pada polarisasi atau munculnya ketegangan emosional, fasilitator harus segera mengambil peran untuk menata ulang alur diskusi agar tetap kondusif. Fasilitator perlu mengarahkan fokus percakapan dari perbedaan opini menuju analisis proses — bagaimana informasi diproduksi, bagaimana hoaks bekerja, dan bagaimana langkah-langkah kritis dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru. Dengan cara ini, konflik yang berpotensi merusak suasana belajar dapat dialihkan menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap mekanisme informasi.

Dengan menguasai keterampilan komunikasi, teknis, analitis, dan manajemen konflik, fasilitator dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pendamping pembelajaran. Ia tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga penjaga dinamika kelompok, pemandu proses refleksi, dan penghubung antara pengalaman peserta dengan konsep literasi media yang lebih luas. Peran fasilitator yang profesional dan sensitif terhadap konteks inilah yang akan memastikan bahwa proses pelatihan berjalan dengan efektif, inklusif, dan berdampak berkelanjutan bagi masyarakat desa.

9.3 Fasilitator sebagai Mediator Sosial

Dalam konteks pelatihan literasi media di masyarakat desa, fasilitator tidak hanya berperan sebagai penyampai materi atau pengelola proses belajar, tetapi juga berfungsi sebagai mediator sosial yang membantu menavigasi kompleksitas pengalaman emosional peserta. Banyak peserta datang ke ruang pelatihan membawa beban psikologis yang lahir dari interaksi tidak sehat dengan media digital. Pengalaman tersebut bisa berupa kehilangan uang akibat penipuan daring, retaknya hubungan keluarga karena perbedaan pandangan politik, pertengkaran di grup WhatsApp desa, hingga rasa malu karena pernah menyebarkan hoaks tanpa disadari. Situasi-situasi ini meninggalkan luka emosional yang tidak terlihat, namun sangat memengaruhi cara peserta memandang diri sendiri dan dunia digital.

Peran fasilitator sebagai mediator sosial menjadi sangat penting dalam menghadapi kondisi tersebut. Ia harus mampu menata dinamika emosi yang muncul, memberikan ruang aman bagi peserta untuk menceritakan pengalaman tanpa rasa takut dipermalukan, dan membantu mereka mengurai persoalan yang dihadapi secara pelan-pelan. Kepekaan emosional menjadi modal utama dalam peran ini. Fasilitator harus tanggap terhadap isyarat nonverbal peserta

— seperti kegugupan, rasa bersalah, atau kecenderungan menghindar — dan meresponsnya dengan sikap empatik yang menenangkan. Pendekatan ini memastikan bahwa pelatihan tidak berubah menjadi ruang penghakiman, tetapi menjadi ruang pemulihan (*healing space*) yang memungkinkan peserta mengolah perasaannya dengan aman.

Di sisi lain, fasilitator tetap harus menjaga keseimbangan antara empati dan arah pembelajaran. Kisah-kisah pribadi yang muncul dalam sesi tidak boleh berhenti sebagai curahan emosi semata. Fasilitator perlu mengarahkan cerita tersebut kepada pemahaman yang lebih luas dengan cara membantu peserta melihat keterhubungan antara pengalaman individu dan pola struktural dalam ekosistem media digital. Sebagai contoh, ketika seorang peserta menceritakan pengalaman ditipu melalui pesan WhatsApp, fasilitator dapat menghubungkannya dengan mekanisme penipuan digital secara umum, teknik manipulasi psikologi yang sering digunakan pelaku, serta strategi pencegahannya. Dengan demikian, pengalaman personal menjadi titik berangkat bagi pembelajaran kritis, bukan sekadar bahan nostalgia atau penyesalan.

Sebagai mediator sosial, fasilitator juga memegang tanggung jawab penting untuk menumbuhkan solidaritas dan rasa saling memahami di antara peserta. Ketika suatu kasus memicu saling menyalahkan, meremehkan, atau bahkan memunculkan prasangka, fasilitator harus sigap meredam suasana dengan mengembalikan fokus pada kompleksitas sistem digital, bukan kesalahan individu. Dalam situasi seperti ini, fasilitator dapat menjelaskan bahwa tertipu oleh hoaks atau penipuan bukan semata hasil kurangnya pengetahuan, tetapi juga karena media digital dirancang secara algoritmik untuk memanfaatkan aspek emosional manusia. Penjelasan ini membantu peserta memahami bahwa kerentanan mereka adalah fenomena umum, bukan kegagalan pribadi.

Pendekatan semacam ini membangun iklim pembelajaran yang inklusif, di mana setiap peserta merasa dihargai dan diterima apa adanya. Ketika peserta tidak lagi merasa malu atau takut dihakimi, mereka lebih terbuka untuk belajar, lebih berani bertanya, dan lebih siap menerima perspektif baru. Pada titik ini, pelatihan literasi media berubah menjadi ruang pemberdayaan — tempat masyarakat desa dapat membaca ulang pengalaman digital mereka, menemukan kekuatan dalam kebersamaan, dan membangun ketahanan informasi secara kolektif.

Dengan menjalankan peran sebagai mediator sosial, fasilitator membantu memastikan bahwa literasi media tidak hanya berkembang sebagai pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai proses pemulihan sosial dan penguatan komunitas. Pelatihan tidak sekadar melahirkan individu yang lebih cerdas bermedia, tetapi juga komunitas yang lebih peka, lebih solid, dan lebih siap menghadapi tantangan digital secara bersama-sama.

9.4 Peran Fasilitator dalam Ruang Digital Desa

Perubahan pola komunikasi masyarakat desa dalam era digital menuntut fasilitator tidak hanya hadir dalam ruang pelatihan tatap muka, tetapi juga berperan aktif di ruang digital yang menjadi perpanjangan kehidupan sosial masyarakat. Transformasi digital telah menggeser titik temu masyarakat dari balai desa, warung kopi, atau pertemuan RT ke platform-platform seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Dalam konteks ini, fasilitator harus memahami bahwa proses pembelajaran tidak berhenti saat sesi pelatihan selesai; ia berlanjut secara organik dalam ruang-ruang digital tempat masyarakat berinteraksi setiap hari.

Pasca pelatihan, fasilitator sering kali menjadi figur rujukan yang dipercaya masyarakat ketika mereka berhadapan dengan informasi baru yang meragukan. Tidak

jarang peserta mengirimkan tangkapan layar berita mencurigakan, pesan berantai, atau tautan yang berpotensi berbahaya kepada fasilitator melalui percakapan pribadi atau grup WhatsApp pelatihan. Dalam situasi seperti ini, fasilitator tidak hanya berperan menjawab pertanyaan, tetapi juga memberikan contoh praktik verifikasi yang benar secara konsisten. Fasilitator menuntun peserta untuk menelusuri sumber informasi, memeriksa kredibilitasnya, dan menjelaskan logika mengapa suatu konten layak dipercaya atau perlu diragukan. Sikap responsif dan sabar sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat bahwa literasi media adalah proses pendampingan jangka panjang, bukan kegiatan sesaat.

Selain menjadi rujukan personal, fasilitator dapat mengambil peran strategis dalam membantu perangkat desa mengelola kanal informasi resmi. Di banyak desa, keberadaan akun media sosial pemerintah desa sering kali belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, saluran resmi ini dapat menjadi sarana efektif untuk melawan penyebaran hoaks dan memastikan informasi penting tersampaikan secara cepat dan akurat. Fasilitator dapat membantu perangkat desa merumuskan pedoman komunikasi digital, menyusun pesan publik yang ringkas dan mudah dipahami, serta mengajarkan teknik dasar pengelolaan konten yang kredibel dan menarik. Dengan demikian, fasilitator tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada individu, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi tantangan informasi digital.

Namun, peran fasilitator di ruang digital tidak berhenti pada aspek teknis. Ia juga memainkan fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga kualitas interaksi daring di tengah masyarakat. Grup WhatsApp atau forum digital desa sering menjadi tempat munculnya perdebatan tajam yang dipengaruhi emosi, politik, dan dinamika sosial lokal. Dalam konteks seperti ini, fasilitator berperan sebagai figur

penyeimbang yang mampu meredam ketegangan dan mendorong dialog yang lebih sehat. Kehadiran fasilitator yang netral, sopan, dan bijak dapat membantu mengarahkan percakapan ke arah yang konstruktif, menghindari polarisasi, serta memastikan bahwa komunikasi digital tetap menjadi ruang yang aman bagi semua masyarakat.

Lebih dari itu, fasilitator perlu memahami bahwa ruang digital desa memiliki struktur kekuasaan dan norma tersendiri. Kehadiran tokoh masyarakat, generasi muda, atau figur yang disegani dalam grup digital dapat memengaruhi dinamika diskusi. Fasilitator harus cermat membaca situasi tersebut dan menempatkan diri sebagai mediator yang tidak memihak, tetapi tetap tegas ketika prinsip literasi media dan etika digital dipertaruhkan. Ia harus mampu mencontohkan bagaimana cara mengoreksi hoaks tanpa mempermalukan pengirim, bagaimana mengingatkan etika diskusi tanpa membuat konflik baru, serta bagaimana menjaga martabat semua pihak dalam ruang digital yang terbuka.

Dengan demikian, peran fasilitator dalam ruang digital desa bukan sekadar memperpanjang layanan pelatihan, melainkan menjadi jembatan antara kompetensi literasi media dan kehidupan sosial masyarakat. Ia hadir sebagai penopang ekosistem informasi desa, figur yang dipercaya untuk menjaga kesehatan ruang digital, sekaligus penggerak terbentuknya budaya bermedia yang kritis, santun, dan bertanggung jawab. Kehadiran fasilitator di ruang digital memastikan bahwa literasi media benar-benar menjadi praktik sosial yang hidup dan berkelanjutan dalam komunitas, bukan sekadar materi pelatihan yang berhenti di ruang kelas.

9.5 Etika Fasilitator dalam Pelatihan Literasi Media

Dalam konteks pelatihan literasi media bagi masyarakat desa, etika fasilitator memegang peranan yang

sangat penting karena fasilitator bukan hanya penyampai materi, tetapi juga figur moral yang memengaruhi dinamika pembelajaran dan kualitas interaksi peserta. Etika ini menjadi fondasi bagi terciptanya suasana belajar yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Tanpa kepekaan etis, pelatihan mudah berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan, saling menghakimi, atau bahkan mempermalukan peserta yang secara digital masih rentan. Oleh karena itu, fasilitator harus menjalankan perannya dengan integritas, tanggung jawab, dan kesadaran moral terhadap posisi sosialnya di tengah komunitas.

Etika pertama yang harus dijunjung fasilitator adalah menjaga kerahasiaan dan kepercayaan peserta. Banyak kisah atau kasus yang muncul dalam pelatihan menyangkut pengalaman pribadi seperti tertipu pinjaman *online*, konflik keluarga akibat hoaks, atau pertengkaran di grup WhatsApp RT. Pengalaman-pengalaman ini bersifat sensitif dan kerap membawa beban emosional. Fasilitator wajib menjaga agar cerita tersebut tidak disebarluaskan ke luar ruang pelatihan atau dijadikan bahan lelucon. Kerahasiaan adalah dasar dari rasa aman psikologis, dan rasa aman psikologis merupakan prasyarat utama bagi proses belajar orang dewasa.

Etika berikutnya menyangkut sikap netral, tidak menghakimi, dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Pelatihan literasi media sering bersinggungan dengan isu politik, agama, atau perbedaan ideologi yang sangat sensitif di pedesaan. Fasilitator tidak boleh menggunakan posisinya untuk mendukung opini pribadi atau memengaruhi pilihan politik peserta. Ia harus menjaga dirinya agar tetap berada pada posisi analitis—mengajak peserta memahami bagaimana informasi bekerja, bukan apa yang harus mereka percayai. Dalam hal ini, netralitas bukan berarti tidak memiliki pendapat, tetapi kemampuan menempatkan diri agar proses pembelajaran tetap fokus pada analisis media, bukan pada perdebatan ideologis yang mengarah pada perpecahan.

Selain netralitas, fasilitator juga harus mempraktikkan bahasa yang inklusif, sopan, dan menghargai martabat peserta. Penggunaan istilah teknis yang berlebihan, nada merendahkan, atau sikap seolah-olah peserta “kurang mengerti” dapat merusak motivasi belajar. Etika komunikasi ini mencerminkan penghormatan terhadap pengalaman hidup peserta sebagai modal utama pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Fasilitator harus mampu menyesuaikan bahasa dengan konteks lokal, termasuk menggunakan dialek atau istilah budaya yang sudah akrab, tanpa kehilangan ketepatan konsep yang ingin disampaikan.

Etika fasilitator juga mencakup keadilan dalam memberikan kesempatan bicara kepada semua peserta. Dalam banyak komunitas desa, terdapat figur-figur tertentu yang memiliki pengaruh sosial lebih besar—seperti tokoh agama, pemuka adat, atau perangkat desa—yang cenderung mendominasi pembicaraan. Fasilitator harus cermat memastikan sesi pelatihan tidak menjadi ruang eksklusif bagi kelompok tertentu saja. Ia perlu memberi kesempatan bagi perempuan, anak muda, dan kelompok rentan lainnya untuk bersuara, terutama dalam pengalaman mereka menghadapi konten digital. Sikap ini merupakan bagian dari nilai kesetaraan yang menjadi inti pendidikan pemberdayaan.

Etika berikutnya yang tidak kalah penting adalah keteladanan digital. Fasilitator tidak dapat mengajarkan literasi media jika pada saat yang sama ia sendiri tidak menerapkan prinsip yang diajarkannya. Keteladanan ini meliputi cara fasilitator memverifikasi informasi sebelum berbagi, cara ia bersikap sopan di grup digital desa, serta bagaimana ia menghindari penyebaran konten sensasional atau provokatif. Keteladanan adalah metode pedagogis yang paling efektif; peserta cenderung lebih terpengaruh oleh apa yang fasilitator lakukan daripada apa yang ia katakan.

Selain itu, fasilitator perlu menjaga batas profesional dalam interaksi digital dengan peserta. Pelatihan literasi media sering berlanjut ke pendampingan melalui *chat* pribadi atau grup WhatsApp. Dalam situasi ini, fasilitator harus menghindari percakapan yang terlalu personal, candaan yang ambigu, atau interaksi yang berpotensi menimbulkan salah paham. Hubungan profesional harus tetap dijaga agar pendampingan tetap berada dalam kerangka edukatif, bukan relasi sosial yang tidak sehat.

Terakhir, fasilitator harus memiliki komitmen etis untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan. Dunia digital berubah sangat cepat: pola penipuan baru, algoritma baru, hingga bentuk hoaks baru terus muncul setiap hari. Fasilitator tidak boleh merasa “paling tahu”, tetapi harus rendah hati untuk menerima masukan, mengakui keterbatasan, dan secara berkala memperbarui pengetahuan serta keterampilannya. Etika ini penting untuk menjaga kredibilitasnya sebagai pendamping literasi media di desa.

Dengan demikian, etika fasilitator bukan hanya seperangkat aturan perilaku, tetapi menjadi kerangka moral yang menjamin pelatihan berjalan secara manusiawi, inklusif, dan bermakna. Etika inilah yang menjaga agar pelatihan literasi media tidak berubah menjadi ruang penghakiman, dominasi, atau manipulasi pengetahuan, melainkan tetap menjadi ruang pemberdayaan di mana setiap peserta dihargai sebagai manusia yang setara dan berharga. Melalui etika yang kokoh dan konsisten, fasilitator tidak hanya berhasil membangun pembelajaran yang efektif, tetapi juga turut memperkuat kohesi sosial dan budaya kritis di tingkat komunitas desa.



Bagian 10

Metodologi Pelatihan

Metodologi pelatihan merupakan elemen penting yang menentukan sejauh mana kurikulum literasi media dapat diterapkan secara efektif dalam konteks masyarakat desa. Pelatihan literasi media berbeda dari pelatihan teknis biasa. Ia menuntut sensitivitas terhadap dinamika sosial, mempertimbangkan keberagaman pengalaman peserta, sekaligus mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku digital. Oleh karena itu, pemilihan metodologi harus didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, pendekatan dialogis Freirean, dan praktik pembelajaran transformatif yang memungkinkan peserta meninjau ulang kebiasaan, asumsi, serta keyakinan mereka terhadap informasi digital. Bab ini menguraikan pendekatan metodologis yang menjadi landasan pelatihan, strategi pembelajaran yang digunakan, serta penerapannya dalam ruang belajar komunitas desa.

10.1 Prinsip-Prinsip Dasar Metodologi Pelatihan

Pelatihan literasi media bagi masyarakat desa dirancang dengan mengutamakan partisipasi aktif peserta. Proses pembelajaran tidak diposisikan sebagai aliran satu arah

dari fasilitator ke peserta, melainkan sebagai proses dialogis yang membangun pemahaman melalui pengalaman. Prinsip pertama yang menjadi fondasi metodologi ini adalah bahwa orang dewasa belajar secara berbeda dibandingkan anak-anak. Mereka memiliki pengalaman hidup yang kaya, sering kali kompleks, dan sangat berharga sebagai sumber pembelajaran. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan pembelajaran harus memberikan ruang bagi peserta untuk menceritakan pengalaman digital mereka, baik yang menyenangkan maupun yang merugikan. Dengan saling berbagi cerita, peserta dapat melihat bahwa masalah literasi media bukan persoalan individu, tetapi persoalan komunal yang berkaitan dengan struktur informasi digital.

Prinsip kedua adalah relevansi. Orang dewasa termotivasi untuk belajar ketika mengetahui bahwa materi yang dia pelajari berkaitan langsung dengan kebutuhan hidupnya. Ketika peserta memahami bahwa kemampuan memeriksa informasi dapat melindungi keluarga mereka dari penipuan atau mampu mencegah penyebaran kabar palsu di grup WhatsApp desa, keterlibatan mereka menjadi lebih kuat. Karena itu, seluruh materi pelatihan harus dikemas dengan contoh-contoh lokal yang dekat dengan pengalaman peserta: hoaks pertanian, undian palsu, pesan berantai dengan nuansa keagamaan, atau konten sensasional yang *viral* di desa.

Prinsip ketiga adalah dialog. Pendidikan literasi media tidak bisa disampaikan melalui ceramah panjang yang menempatkan fasilitator sebagai sumber kebenaran tunggal. Peserta harus menjadi subjek pembelajaran, bukan objek. Pendekatan dialogis membantu peserta merumuskan pemahaman baru melalui pertukaran pengalaman dan gagasan. Dialog memungkinkan munculnya perspektif kritis tanpa menciptakan suasana debat yang tegang. Melalui dialog, peserta belajar memahami konteks sosial di balik penyebaran hoaks dan penipuan digital, serta melihat

bagaimana kebiasaan berbagi informasi dapat menguatkan maupun melemahkan solidaritas komunitas.

Prinsip keempat adalah praktik langsung. Pelatihan literasi media harus memberikan kesempatan bagi peserta untuk mencoba teknik verifikasi, memeriksa gambar, mengidentifikasi tautan mencurigakan, atau membuat konten positif. Orang dewasa belajar paling efektif ketika mereka dapat mempraktikkan sesuatu secara langsung, bukan hanya mendengarkan konsep abstrak. Oleh karena itu, setiap sesi pembelajaran perlu mengintegrasikan latihan praktis yang relevan dengan materi.

10.2 Pendekatan Andragogi dalam Pelatihan

Pendekatan andragogi yang dikembangkan oleh Malcolm Knowles menjadi fondasi metodologis utama dalam pelatihan literasi media ini. Andragogi memandang bahwa orang dewasa belajar melalui cara yang berbeda dibandingkan anak-anak, terutama karena mereka membawa pengalaman hidup yang panjang, memiliki otonomi dalam mengambil keputusan, serta memerlukan relevansi langsung antara materi pembelajaran dan persoalan nyata yang mereka hadapi. Dalam konteks pelatihan literasi media di desa, pendekatan ini sangat penting karena peserta bukan hanya mencari informasi baru, tetapi juga ingin memecahkan masalah konkret yang muncul dalam kehidupan sehari-hari akibat arus informasi digital.

Salah satu prinsip inti andragogi adalah bahwa orang dewasa belajar ketika pembelajaran berorientasi pada pemecahan masalah. Hal ini terlihat jelas dalam sesi pelatihan di mana peserta datang membawa tangkapan layar hoaks, pesan mencurigakan, atau pengalaman pribadi menjadi korban penipuan digital. Ketika peserta menceritakan pengalaman mereka, fasilitator tidak sekadar memberikan jawaban benar-salah terhadap informasi tersebut, melainkan

menjadikannya sebagai pintu masuk untuk memahami konsep dasar literasi media: bagaimana informasi diproduksi, bagaimana manipulasi bekerja, dan bagaimana pola algoritma memengaruhi persepsi. Pada titik ini, pembelajaran bergerak dari sekadar transfer informasi menuju proses investigatif, reflektif, dan solutif. Peserta tidak hanya memperoleh jawaban, tetapi juga memahami cara berpikir kritis yang dapat mereka gunakan dalam situasi serupa di kemudian hari.

Knowles juga menekankan prinsip bahwa kesiapan belajar orang dewasa sangat terkait dengan peran sosial yang mereka emban. Peserta dalam pelatihan ini hadir sebagai orang tua, petani, pedagang, perangkat desa, tokoh adat, dan anggota komunitas lainnya. Setiap peran membawa kebutuhan literasi media yang berbeda: orang tua ingin melindungi anak dari konten berbahaya, perangkat desa ingin menyebarkan informasi publik dengan benar, petani ingin terhindar dari hoaks harga pupuk, sementara pedagang ingin aman bertransaksi digital. Oleh karena itu, desain pelatihan harus fleksibel dan mampu mengakomodasi keragaman kebutuhan sosial tersebut. Ketika peserta merasa materi pelatihan membantu mereka menjalankan peran sosialnya dengan lebih baik, motivasi belajar meningkat dan proses internalisasi pengetahuan berlangsung lebih kuat dan mendalam.

Selain berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman peserta, pendekatan andragogi juga menuntut suasana pembelajaran yang saling menghargai. Orang dewasa membawa martabat, harga diri, dan pengalaman yang layak dihormati. Fasilitator harus menghindari nada menggurui, merendahkan, atau mempermalukan peserta. Hal ini sangat penting dalam konteks pelatihan literasi media, karena banyak peserta memiliki pengalaman yang memalukan—misalnya pernah menyebarkan informasi palsu atau menjadi korban penipuan digital. Ketika insiden seperti itu muncul dalam diskusi, fasilitator tidak boleh menertawakan atau

menghakimi peserta, sebab hal itu dapat menutup ruang dialog dan membuat peserta enggan terbuka. Sebaliknya, fasilitator perlu mengelola situasi tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran reflektif. Kesalahan bukan dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan sebagai titik awal pemahaman baru: mengapa hal itu bisa terjadi, apa pola yang membuat orang mudah tertipu, dan bagaimana mencegahnya agar tidak terulang.

Pendekatan andragogi juga menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa bersifat kolaboratif, bukan hierarkis. Peserta bukan objek yang menerima pengetahuan, melainkan subjek yang ikut membangun makna melalui pengalaman mereka. Diskusi kelompok, studi kasus berbasis pengalaman lokal, dan dialog reflektif menjadi metode penting yang mendorong peserta merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan. Dalam suasana seperti ini, peserta tidak hanya belajar dari fasilitator, tetapi juga dari satu sama lain, sehingga proses pembelajaran menjadi proses sosial yang memperkaya secara kolektif.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip andragogi memberikan arah yang jelas bahwa pelatihan literasi media bagi masyarakat desa harus memusatkan pembelajaran pada kebutuhan, pengalaman, peran sosial, dan martabat peserta, serta membangun ruang belajar yang terbuka, dialogis, dan menguatkan. Pendekatan ini memastikan bahwa literasi media tidak hanya dipahami pada tataran konsep, tetapi benar-benar diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan andragogi, pelatihan berubah dari sekadar penyampaian informasi menjadi proses pemberdayaan yang bermakna, relevan, dan berkelanjutan bagi komunitas desa.

10.3 Metode Dialogis dalam Perspektif Freire

Paulo Freire menawarkan landasan filosofis yang sangat kuat bagi pendidikan orang dewasa melalui gagasan tentang pendidikan dialogis—sebuah pendekatan yang berpijak pada hubungan setara antara pendidik dan peserta, serta keyakinan bahwa pengetahuan tidak diberikan dari atas ke bawah, tetapi dibangun secara bersama melalui proses pemaknaan ulang terhadap realitas. Menurut Freire, dialog bukan sekadar percakapan atau tanya jawab, melainkan proses kritis di mana manusia berusaha memahami dunia, menyadari posisinya di dalam struktur sosial, serta menetapkan tindakan untuk mengubah keadaan yang menindas. Dalam kerangka literasi media, metode dialogis menjadi sangat relevan karena tantangan informasi digital bukan hanya persoalan fakta dan data, tetapi juga persoalan ideologi, representasi, dan kuasa yang bekerja di balik produksi dan penyebaran informasi.

Freire memandang bahwa pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang mengakui pengalaman hidup sebagai sumber utama pengetahuan. Fasilitator dalam pelatihan literasi media tidak boleh menganggap peserta sebagai “wadah kosong” yang harus diisi dengan teori atau teknik verifikasi. Sebaliknya, peserta dilihat sebagai subjek pembelajar yang memiliki pengalaman bermedia, yang meskipun sering kali keliru atau rentan manipulasi, tetap mengandung pengetahuan yang layak dihargai dan dijadikan titik awal dialog. Dengan pendekatan ini, pelatihan tidak didominasi oleh ceramah satu arah, melainkan dibangun melalui interaksi dua arah yang penuh rasa hormat. Fasilitator mendengarkan pengalaman peserta tentang hoaks keluarga, konflik antar masyarakat akibat pesan palsu, atau rasa malu karena pernah tertipu secara digital. Pengalaman tersebut bukan sekadar anekdot, tetapi

merupakan “kode” sosial yang perlu diurai agar peserta dapat melihat pola dan struktur yang lebih besar.

Dalam praktik pelatihan, pendekatan dialogis menempatkan fasilitator dan peserta sebagai mitra dalam penyelidikan kritis (*co-investigators*). Fasilitator tidak menyediakan jawaban final, tetapi membantu peserta menemukan sendiri akar persoalan dari fenomena digital yang mereka hadapi. Misalnya, ketika muncul diskusi tentang sebuah berita *viral*, fasilitator tidak langsung menyatakan “ini hoaks” atau “ini benar”, tetapi menuntun peserta untuk menganalisis: bagaimana berita tersebut dikonstruksi, siapa pembuatnya, kepentingan apa yang mungkin tersembunyi, dan bagaimana emosi pembaca dimobilisasi. Melalui dialog, peserta mulai memahami bahwa informasi digital selalu melalui proses seleksi, *framing*, dan amplifikasi, dan bahwa posisi mereka sebagai penerima informasi sering kali ditentukan oleh kekuatan algoritmik dan ekonomi perhatian.

Metode dialogis Freire juga memungkinkan peserta untuk menyadari bahwa hoaks tidak menyebar semata karena ketidaktahuan individu, tetapi karena adanya struktur sosial dan politik yang mendukung penyebarannya. Dialog membuka ruang untuk mempertanyakan relasi kekuasaan: mengapa pesan tertentu lebih cepat viral? Mengapa konten yang memecah belah sering kali lebih dominan daripada konten yang mendidik? Siapa yang mendapatkan keuntungan dari polarisasi opini publik? Pertanyaan-pertanyaan reflektif semacam ini penting agar peserta tidak hanya belajar “memeriksa kebenaran informasi”, tetapi juga memahami logika yang mengatur ruang digital dan posisi mereka dalam sistem tersebut. Dengan cara ini, dialog berfungsi sebagai alat pembongkar kesadaran, bukan sekadar strategi pembelajaran.

Lebih jauh, dialog Freirean mengajak peserta untuk “memeriksa diri sendiri” (*self-inquiry*) sebagai bagian dari proses pembebasan. Ketika peserta bertanya, “Mengapa saya

percaya informasi ini?“, mereka sedang memasuki wilayah refleksi yang dalam tentang bias pribadi, pengalaman hidup, dan keyakinan yang membentuk cara mereka menerima dan memaknai informasi. Ketika peserta bertanya, “Mengapa saya merasa perlu segera membagikan pesan ini?“, mereka sedang mengurai dinamika emosional yang sering kali dieksploitasi oleh pembuat hoaks. Refleksi diri semacam ini membuat peserta lebih sadar akan kerentanan digital mereka, sekaligus membuka jalan bagi perubahan perilaku yang lebih bijak.

Dengan menggunakan pendekatan dialogis, pelatihan literasi media menjadi lebih dari sekadar proses transfer pengetahuan; ia menjadi ruang transformatif di mana peserta belajar memahami informasi digital sebagai fenomena sosial, politik, dan emosional. Dialog memungkinkan pembentukan kesadaran kritis (*critical consciousness*), yaitu kemampuan untuk melihat dunia secara mendalam, memahami struktur yang mengungkung, serta mengambil tindakan untuk mengubahnya. Ketika peserta memahami bahwa literasi media bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga tindakan sosial yang memiliki konsekuensi etis, mereka akan lebih siap mengambil peran sebagai masyarakat digital yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, metode dialogis dalam perspektif Freire memberikan landasan filosofis dan pedagogis yang kuat bagi pelatihan literasi media di masyarakat desa. Pendekatan ini bukan hanya membekali peserta dengan kemampuan kritis, tetapi juga meneguhkan martabat mereka sebagai subjek pembelajar yang mampu membaca, menafsirkan, dan mengubah realitas digital yang mereka hadapi. Pada akhirnya, literasi media berbasis dialog tidak hanya menciptakan peserta yang lebih cerdas dalam memverifikasi informasi, tetapi juga membangun komunitas yang lebih reflektif, solid, dan berdaya dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.

10.4 Pembelajaran Transformatif dalam Konteks Literasi Media

Pembelajaran transformatif, sebagaimana dikemukakan oleh Jack Mezirow, berpijak pada gagasan bahwa proses belajar orang dewasa yang benar-benar bermakna tidak sekadar memperluas pengetahuan, tetapi mengubah cara seseorang memandang dirinya, lingkungannya, dan realitas sosial yang ia hidupi. Dalam konteks literasi media bagi masyarakat desa, pendekatan ini menjadi sangat penting karena perilaku digital masyarakat sering kali dibentuk oleh asumsi-asumsi yang tidak disadari, pola kebiasaan informasi yang berulang, serta struktur kepercayaan tradisional yang tidak selalu sesuai dengan dinamika dunia digital.

Di banyak desa, misalnya, terdapat keyakinan kuat bahwa konten yang dikirim oleh ustaz, tokoh adat, atau figur dihormati otomatis dianggap benar tanpa perlu diperiksa. Ada pula anggapan bahwa berita *viral* sudah pasti valid, atau bahwa pesan berantai yang “banyak dibagikan” pasti memiliki dasar kebenaran. Pola pikir ini tidak muncul dari ketidaktahuan, tetapi dari budaya komunikasi berbasis kepercayaan yang telah lama menjadi fondasi interaksi sosial di desa. Tantangannya adalah bahwa budaya ini sering kali berbenturan dengan sifat ruang digital yang tidak mengenal otoritas moral, tidak memiliki filter sosial, dan sangat rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak berkepentingan.

Dalam kerangka ini, pembelajaran transformatif diperlukan untuk membantu peserta meninjau ulang asumsi-asumsi dasar yang mereka gunakan dalam membaca informasi digital. Proses ini tidak bisa dicapai dengan ceramah atau instruksi satu arah, melainkan melalui pengalaman yang mendorong peserta melakukan refleksi mendalam. Oleh karena itu, metodologi pelatihan harus dirancang sedemikian rupa agar peserta mengalami *disorienting dilemma*—sebuah

situasi yang memantik ketidaknyamanan kognitif dan mendorong pertanyaan kritis terhadap pola pikir yang sebelumnya dianggap wajar.

Salah satu cara yang efektif adalah dengan menampilkan contoh hoaks, misinformasi, atau penipuan digital yang pernah beredar di desa. Fasilitator kemudian mengajak peserta mengenang kembali bagaimana mereka merespons informasi tersebut pada saat pertama kali menerimanya. Pertanyaan seperti “Apa yang membuat saya percaya?” atau “Mengapa saya langsung membagikannya?” membuka ruang diskusi tentang peran emosi, rasa takut, harapan, dan otoritas sosial dalam membentuk perilaku digital mereka. Ketika peserta menyadari bahwa banyak keputusan bermedia didasarkan pada impuls emosional, bukan analisis kritis, maka sebuah perubahan internal mulai terjadi—mereka belajar mengenali kelemahannya sendiri sebagai pengguna media.

Namun, pembelajaran transformatif tidak berhenti pada proses refleksi. Mezirow menegaskan bahwa perubahan perspektif harus diikuti oleh tindakan baru yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Dalam pelatihan literasi media, tindakan transformatif ini dapat berupa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten: memeriksa sumber sebelum membagikan berita, menahan diri ketika menerima pesan provokatif, mengaktifkan keamanan dua langkah, atau berdiskusi dengan anggota keluarga sebelum mengambil keputusan terkait informasi digital. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi indikator bahwa perubahan perspektif telah benar-benar mengakar dan memengaruhi perilaku.

Di tingkat komunitas, pembelajaran transformatif membuka jalan bagi terbentuknya kebiasaan sosial baru di desa. Masyarakat yang telah mengalami proses transformasi cenderung menjadi rujukan bagi orang lain—menjadi tempat bertanya ketika ada informasi meragukan, menjadi pengingat

ketika ada kecenderungan menyebarkan hoaks, atau bahkan menjadi penggerak lahirnya inisiatif kolektif seperti grup klarifikasi hoaks desa. Dengan demikian, perubahan yang berawal dari individu dapat menjelma menjadi perubahan sosial yang lebih luas.

Pembelajaran transformatif dalam literasi media juga berperan penting dalam memperbaiki relasi sosial yang sempat rusak akibat disinformasi. Ketika masyarakat memahami bahwa mereka pernah tertipu bukan karena bodoh, melainkan karena sistem informasi digital memang sangat kompleks dan manipulatif, tumbuhlah rasa empati dan solidaritas baru. Mereka tidak lagi saling menyalahkan, tetapi bersama-sama membangun ketahanan informasi komunitas. Inilah bentuk pembebasan yang dituju oleh Mezirow: pembebasan dari asumsi yang membelenggu, dari pola pikir yang membatasi, dan dari struktur media yang mengeksploitasi.

Pada akhirnya, pembelajaran transformatif dalam literasi media tidak hanya mengubah cara masyarakat desa memahami informasi, tetapi juga mengubah cara mereka memahami diri sendiri sebagai masyarakat digital yang memiliki kekuatan untuk menentukan tindakan. Ketika kesadaran baru ini menyatu dengan praktik sehari-hari, maka literasi media tidak lagi sekadar pelatihan, tetapi menjadi proses pemberdayaan yang mengubah perilaku, pola pikir, dan budaya komunikasi masyarakat desa di era digital.

10.5 Strategi dan Teknik Pembelajaran di Lapangan

Penerapan metodologi pelatihan literasi media di tingkat desa memerlukan strategi yang tidak hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial, budaya, dan kondisi nyata masyarakat setempat. Karena peserta pelatihan adalah orang dewasa dengan pengalaman hidup yang beragam, suasana pembelajaran harus dirancang

sedemikian rupa sehingga mendorong partisipasi, menciptakan rasa aman, dan memungkinkan peserta mengaitkan materi pelatihan dengan realitas keseharian mereka. Dalam konteks ini, teknik-teknik pembelajaran yang digunakan di lapangan tidak hanya menjadi alat penyampai materi, tetapi juga sarana pemberdayaan yang membantu peserta memaknai kembali pengalaman digital mereka.

Salah satu strategi yang sangat efektif adalah penggunaan diskusi kelompok kecil. Teknik ini dipilih karena banyak masyarakat desa memiliki kecenderungan untuk merasa sungkan berbicara di forum besar, terutama ketika topik pembelajaran bersinggungan dengan pengalaman pribadi atau kesalahan yang pernah mereka lakukan, seperti menyebarkan hoaks atau menjadi korban penipuan digital. Diskusi kelompok kecil menciptakan ruang belajar yang lebih intim dan santai, sehingga peserta merasa lebih nyaman untuk berpendapat. Suasana ini memungkinkan peserta berbagi pengalaman secara jujur, yang kemudian menjadi sumber refleksi kolektif mengenai pola-pola konsumsi informasi dan kerentanan digital yang dialami bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip andragogi bahwa pengalaman peserta adalah aset berharga yang perlu diberdayakan dalam proses pembelajaran.

Selain diskusi kelompok, teknik studi kasus menjadi salah satu metode yang paling relevan untuk pelatihan literasi media di desa. Studi kasus memberikan kesempatan bagi peserta untuk menganalisis peristiwa konkret yang mereka pahami dan alami, seperti hoaks mengenai program bantuan sosial, penipuan *online* berkedok undian, atau konflik antar masyarakat yang dipicu oleh misinformasi di grup WhatsApp. Melalui analisis ini, peserta tidak hanya memahami pola penyebaran hoaks, tetapi juga dapat mengidentifikasi motif pelaku, dampak sosial yang ditimbulkan, serta titik-titik kerentanan dalam komunitas yang memungkinkan hoaks berkembang. Studi kasus menghadirkan pembelajaran yang

kontekstual, relevan, dan mudah diinternalisasi karena mengaitkan teori literasi media dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Komponen lain yang menjadi inti pelatihan adalah latihan praktis. Literasi media tidak dapat dikuasai hanya melalui penjelasan teoritis; peserta perlu terlibat langsung dalam proses verifikasi informasi menggunakan perangkat mereka sendiri. Pada sesi ini, fasilitator mengajak peserta untuk memeriksa kebenaran gambar, menelusuri sumber asli sebuah berita, atau mengidentifikasi akun palsu melalui langkah-langkah teknis seperti pencarian gambar terbalik, pemeriksaan *metadata*, atau analisis pola tulisan. Biasanya, peserta merasakan kepuasan tersendiri ketika berhasil membuktikan bahwa sebuah gambar yang pernah mereka percayai ternyata hasil rekayasa, atau ketika menemukan bahwa suatu informasi yang beredar luas berasal dari sumber tidak kredibel. Pengalaman langsung semacam ini memperkuat kepercayaan diri peserta dan menegaskan bahwa kemampuan verifikasi bukan monopoli kalangan terdidik, tetapi dapat dipelajari oleh siapa saja.

Selain teknik-teknik tersebut, simulasi peran (*roleplay*) juga dapat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran yang kuat, terutama untuk konteks komunikasi publik desa. Simulasi memungkinkan peserta memainkan peran-peran tertentu, seperti perangkat desa yang menyampaikan informasi publik, sementara peserta lainnya berperan sebagai masyarakat yang mengajukan pertanyaan kritis. Dalam proses ini, peserta belajar bagaimana menyampaikan informasi dengan jelas, menjawab pertanyaan dengan tenang, dan mengelola perbedaan pendapat tanpa memperuncing konflik. Simulasi peran juga membantu peserta memahami bahwa keterampilan komunikasi publik tidak hanya dibutuhkan oleh pejabat formal, tetapi juga oleh masyarakat biasa yang terlibat dalam percakapan sehari-hari di ruang digital desa. Dengan demikian, teknik ini tidak hanya mengembangkan

kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial peserta dalam menciptakan ruang dialog yang sehat dan transparan.

Secara keseluruhan, strategi dan teknik pembelajaran di lapangan harus dirancang untuk mengaktifkan peserta sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar penerima materi. Pelatihan literasi media yang efektif menempatkan peserta sebagai aktor utama yang merefleksikan, mempraktikkan, dan menyebarkan kembali pengetahuan yang diperoleh. Melalui diskusi kelompok, studi kasus, latihan praktis, dan simulasi peran, pelatihan ini tidak hanya membangun kemampuan teknis dan kognitif, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri, solidaritas sosial, dan tanggung jawab komunal dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.

10.6 Suasana Pembelajaran dan Pengelolaan Dinamika Kelompok

Suasana pembelajaran merupakan elemen fundamental yang menentukan keberhasilan setiap proses pelatihan, terutama dalam konteks literasi media di masyarakat desa. Karena pelatihan ini menyentuh isu-isu sensitif seperti pengalaman tertipu, salah membagikan informasi, atau ketegangan sosial akibat hoaks, maka fasilitator perlu membangun lingkungan belajar yang hangat, inklusif, dan *non-judgmental*. Lingkungan yang demikian memungkinkan peserta merasa aman untuk mengungkapkan pengalaman pribadi, termasuk pengalaman yang memalukan atau menyakitkan. Rasa aman psikologis (*psychological safety*) menjadi prasyarat bagi terjadinya refleksi diri dan pembelajaran yang mendalam. Jika peserta merasa khawatir akan diejek atau dipermalukan, mereka cenderung menutup diri, sehingga proses transformasi pengetahuan dan sikap tidak dapat berlangsung optimal.

Fasilitator perlu secara sadar menyiapkan suasana pembelajaran yang mencerminkan penghargaan terhadap martabat setiap individu. Sikap fasilitator yang ramah, bahasa yang santun, serta kesediaan mendengarkan tanpa menghakimi akan mendorong peserta merasa dihargai sebagai subjek pembelajaran. Dari sisi desain ruang, pengaturan tempat duduk melingkar atau setengah lingkaran dapat membantu mengurangi kesan hierarkis dan memperkuat suasana setara. Fasilitator juga dapat memulai sesi dengan aktivitas ringan seperti *ice breaking* atau refleksi singkat untuk mencairkan suasana, sehingga peserta siap memasuki materi pelatihan yang lebih berat.

Dalam proses pembelajaran, pengelolaan dinamika kelompok menjadi tantangan tersendiri. Dalam masyarakat desa, relasi kuasa informal—misalnya pengaruh tokoh adat, tokoh agama, atau peserta yang secara sosial dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi—sering kali mempengaruhi proses diskusi. Peserta dengan status sosial tinggi atau karakter dominan dapat tanpa sadar mendominasi ruang dialog, sementara peserta lain, terutama perempuan, anak muda, atau masyarakat yang merasa “kurang berpendidikan”, memilih diam atau hanya mengikuti alur pembicaraan tanpa berani menyampaikan pandangan.

Dalam situasi seperti ini, fasilitator perlu memiliki kepekaan interpersonal yang tinggi. Pendekatan yang digunakan harus tetap menghormati tatanan sosial desa, namun tidak membiarkan satu atau dua suara mendominasi seluruh sesi. Fasilitator dapat menyeimbangkan dinamika dengan cara mengarahkan pertanyaan secara bergiliran kepada peserta lain, mengundang pandangan dari kelompok yang lebih pendiam, atau memberikan waktu bicara yang setara bagi setiap peserta. Fasilitator juga dapat menggunakan teknik “lingkar berbicara” (*talking circle*), di mana setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara tanpa interupsi.

Ketika terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan yang memanas—hal yang wajar dalam pembahasan isu literasi media—fasilitator harus mampu mengelola suasana secara profesional. Ia perlu memastikan bahwa diskusi tetap berfokus pada isi persoalan, bukan menyerang pribadi peserta. Fasilitator dapat mengalihkan arah diskusi dengan merangkum pokok masalah, mengajukan pertanyaan penjelas, atau mengembalikan pembahasan pada analisis proses informasi: bagaimana hoaks bekerja, bagaimana emosi mempengaruhi keputusan berbagi, atau bagaimana algoritma memengaruhi persepsi peserta. Dengan cara ini, diskusi bergerak dari perdebatan subjektif menuju analisis yang lebih objektif dan reflektif.

Selain itu, fasilitator juga perlu menjaga agar suasana kelompok tetap produktif dan tidak terjebak pada cerita-cerita negatif yang melelahkan atau memicu trauma emosional. Ketika peserta terlalu larut dalam kisah personal, fasilitator dapat memberi penguatan emosional singkat lalu mengajak kelompok untuk menarik pelajaran dari pengalaman tersebut. Dengan demikian, pengalaman individu tidak hanya menjadi curahan hati, tetapi berubah menjadi sumber pembelajaran kolektif.

Pada akhirnya, suasana pembelajaran yang aman dan dinamika kelompok yang terkelola dengan baik akan memperkuat proses internalisasi konsep literasi media. Ketika peserta merasa dihargai, didengar, dan tidak dihakimi, mereka lebih mudah melakukan refleksi diri, mengakui kekeliruan, serta membangun kebiasaan baru dalam bermedia. Fasilitator memegang peran kunci dalam memastikan bahwa ruang pelatihan menjadi ruang dialog yang setara, reflektif, dan membebaskan—ruang di mana literasi media tidak sekadar diajarkan, tetapi dihayati sebagai proses perubahan sosial yang bertumpu pada penghargaan terhadap martabat setiap masyarakat desa.

Bagian 11

Evaluasi dan Monitoring Pelatihan

Evaluasi dan monitoring merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan pelatihan literasi media bagi masyarakat desa. Tanpa proses evaluasi yang terstruktur, pelatihan berisiko menjadi kegiatan yang berhenti sebagai seremonial, tanpa memberikan dampak nyata terhadap perilaku digital peserta maupun ekosistem informasi di tingkat desa. Evaluasi bukan sekadar menilai apakah peserta memahami materi, tetapi lebih jauh memeriksa sejauh mana pelatihan mampu mengubah cara berpikir, kebiasaan, dan sensitivitas mereka terhadap informasi digital. Sementara itu, monitoring berfungsi memastikan bahwa pelatihan tidak hanya efektif dalam pelaksanaannya, tetapi juga berkelanjutan dalam pengaruhnya. Bab ini menguraikan prinsip-prinsip, pendekatan, dan praktik evaluasi serta monitoring yang relevan bagi pelatihan literasi media berbasis komunitas desa.

11.1 Pentingnya Evaluasi dalam Pelatihan Literasi Media

Evaluasi dalam pelatihan literasi media memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya mengukur capaian peserta, tetapi juga menilai efektivitas pendekatan pedagogis dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat desa. Tidak seperti pelatihan teknis yang lebih mudah dinilai melalui penguasaan prosedur atau kemampuan operasional tertentu, literasi media menyentuh dimensi yang jauh lebih luas: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah sosial-komunal. Karena itu, evaluasi harus dirancang untuk menangkap perubahan di ketiga ranah tersebut secara holistik. Pelatihan literasi media tidak cukup dievaluasi hanya melalui tes pengetahuan tentang konsep hoaks atau algoritma, tetapi harus mampu menilai apakah peserta telah mengembangkan cara berpikir kritis, sikap etis, serta kebiasaan bermedia yang bertanggung jawab.

Evaluasi diperlukan untuk memahami sejauh mana peserta mampu mengenali hoaks yang beredar di lingkungan mereka, memahami struktur kerja media digital, atau menerapkan teknik verifikasi informasi secara mandiri. Namun, lebih dari itu, evaluasi juga harus mampu mengamati transformasi perilaku digital peserta, misalnya apakah mereka kini lebih hati-hati sebelum meneruskan pesan, lebih cermat memeriksa sumber informasi, atau lebih kritis ketika menghadapi konten yang bersifat provokatif. Transformasi perilaku inilah yang menjadi indikator utama keberhasilan pelatihan literasi media, karena tujuan akhirnya bukan hanya pemahaman konsep, tetapi perubahan cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Selain berfungsi menilai capaian peserta, evaluasi juga menjadi alat refleksi bagi fasilitator dan penyelenggara pelatihan. Ketika peserta menyatakan bahwa materi terlalu cepat, terlalu teknis, atau kurang relevan dengan konteks desa mereka, temuan tersebut harus dipandang sebagai masukan

yang berharga untuk memperbaiki desain pelatihan pada pertemuan selanjutnya. Evaluasi yang baik membantu fasilitator menyesuaikan metode, memperkaya contoh kasus, atau memilih pendekatan yang lebih partisipatif agar pembelajaran berjalan lebih efektif. Dengan demikian, evaluasi tidak sekadar menjadi mekanisme pengukuran, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses peningkatan kualitas pelatihan itu sendiri.

Secara keseluruhan, evaluasi dalam pelatihan literasi media berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pelatihan benar-benar memberi dampak transformatif bagi peserta dan komunitas desa. Evaluasi yang komprehensif memastikan bahwa pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi proses pembelajaran yang hidup, reflektif, dan terus berkembang sesuai dinamika sosial-informasional yang dihadapi masyarakat desa di era digital.

11.2 Evaluasi Formatif dan Sumatif

Evaluasi dalam pelatihan literasi media harus dirancang secara komprehensif dan berlapis, karena proses belajar yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan teknis, tetapi juga melibatkan perubahan sikap, kebiasaan, serta pola interaksi sosial peserta. Dalam kerangka ini, evaluasi pelatihan memerlukan dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara efektif, responsif, dan menghasilkan dampak nyata bagi peserta maupun komunitas desa.

Evaluasi formatif dilakukan secara berkelanjutan selama pelatihan berlangsung. Pendekatan ini menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari proses belajar, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Fungsinya adalah memberikan umpan balik langsung kepada fasilitator

mengenai sejauh mana peserta memahami materi, sejauh mana penjelasan dapat diterima dengan baik, serta bagian mana yang perlu diperjelas atau diperdalam. Dalam konteks pendidikan nonformal di desa, evaluasi formatif dapat muncul melalui berbagai bentuk: pertanyaan terbuka yang diajukan fasilitator kepada peserta; respons spontan peserta ketika mendiskusikan contoh hoaks atau penipuan digital; dinamika kelompok kecil; atau munculnya cerita-cerita reflektif yang mengungkapkan pemahaman maupun kebingungan mereka.

Ketika fasilitator menemukan indikasi bahwa peserta mengalami kesulitan—misalnya karena penggunaan istilah teknis, kecepatan penyampaian materi terlalu tinggi, atau contoh yang diberikan kurang relevan dengan pengalaman mereka—maka fasilitator dapat segera melakukan penyesuaian. Ia dapat memperlambat tempo, menjelaskan kembali dengan bahasa lokal, memberikan ilustrasi tambahan yang lebih dekat dengan kehidupan peserta, atau merancang latihan praktis tambahan agar pemahaman peserta semakin kuat. Evaluasi formatif dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang menjaga agar proses belajar tidak meninggalkan peserta, tetapi menuntun mereka secara bertahap menuju pemahaman yang lebih baik.

Berbeda dengan pendekatan formatif, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pelatihan untuk mengukur sejauh mana capaian pembelajaran telah tercapai secara keseluruhan. Evaluasi ini tidak bermaksud memberikan penilaian yang bersifat menghakimi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk melihat perkembangan peserta secara objektif setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Dalam pelatihan literasi media, evaluasi sumatif harus dirancang dengan memperhatikan karakteristik pembelajaran orang dewasa serta konteks digital yang bersifat dinamis. Karena itu, bentuk evaluasi tidak boleh hanya berupa tes tertulis atau pilihan ganda, melainkan perlu melibatkan aktivitas autentik yang

mencerminkan kemampuan peserta dalam menghadapi situasi nyata.

Evaluasi sumatif dapat berupa praktik langsung, seperti meminta peserta melakukan verifikasi gambar menggunakan fitur *reverse image search*, mengecek keaslian tautan mencurigakan, atau menganalisis struktur pesan hoaks yang pernah beredar di desa. Evaluasi juga dapat berupa analisis kasus, misalnya peserta diminta membaca satu contoh konten manipulatif, kemudian menjelaskan motif, teknik manipulasi, dan dampak potensialnya terhadap komunitas. Selain itu, peserta dapat diminta membuat konten positif berbasis komunitas, seperti poster edukasi, pesan publik untuk perangkat desa, atau video singkat tentang pentingnya memeriksa sumber informasi. Produk-produk tersebut menjadi bukti konkret bahwa peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam tindakan kreatif dan bermanfaat bagi komunitas.

Evaluasi sumatif yang dirancang dengan baik dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelatihan, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Ia menunjukkan sejauh mana pelatihan berhasil menumbuhkan kebiasaan baru, seperti menahan diri sebelum membagikan pesan, lebih berhati-hati terhadap tautan mencurigakan, atau mampu berkontribusi sebagai agen edukasi di lingkungannya. Dengan demikian, evaluasi sumatif bukan hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga mengidentifikasi potensi peserta sebagai penggerak literasi media di tingkat desa.

11.3 Mengukur Perubahan Perilaku dan Kesadaran Kritis

Mengukur perubahan perilaku dalam pelatihan literasi media merupakan salah satu tantangan metodologis yang paling kompleks, karena perilaku digital tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh kebiasaan,

nilai, emosi, dan dinamika sosial yang melingkupinya. Berbeda dengan keterampilan teknis yang dapat diuji melalui demonstrasi atau praktik langsung, perubahan perilaku membutuhkan pengamatan yang lebih mendalam dan proses refleksi yang terus-menerus. Oleh karena itu, evaluasi pada aspek ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus mengikuti perkembangan peserta selama dan setelah pelatihan berlangsung.

Salah satu indikator awal perubahan perilaku dapat dilihat dari cara peserta berbicara tentang informasi digital. Ketika peserta mulai menggunakan istilah-istilah seperti “cek sumber dahulu”, “lihat tanggal unggahan”, “jangan langsung sebarkan”, atau “verifikasi sebelum percaya”, hal tersebut menjadi tanda bahwa pola pikir baru mulai terinternalisasi. Bahasa mencerminkan cara berpikir, dan perubahan dalam cara peserta membahas informasi adalah sinyal bahwa mereka telah mulai mengadopsi kebiasaan digital yang lebih sehat. Demikian pula, ketika peserta mulai secara spontan mempertanyakan keaslian gambar, kejelasan sumber berita, atau motif di balik pesan *viral*, perubahan tersebut menunjukkan berkembangnya kewaspadaan dan kehati-hatian yang sebelumnya mungkin tidak ada.

Indikator perubahan perilaku juga dapat diamati dari respons peserta terhadap studi kasus yang disajikan dalam pelatihan. Peserta yang sebelumnya menerima informasi secara pasif kini mulai menganalisis konten dengan berbagai pertanyaan kritis, seperti: “Apakah foto ini mungkin hasil edit?”, “Mengapa informasinya tidak disertai sumber?”, atau “Apakah berita ini masuk akal?” Selain itu, peserta yang mampu merujuk kembali pada pengalaman personal — misalnya, pengalaman pernah menjadi korban penipuan atau pernah meneruskan hoaks — menunjukkan bahwa mereka telah mengaitkan pembelajaran baru dengan pengalaman hidupnya. Pemahaman yang terhubung dengan pengalaman

personal cenderung lebih bertahan dan memicu perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Lebih jauh, perubahan perilaku dapat terlihat dari tindakan peserta di luar ruang pelatihan, terutama dalam interaksi digital sehari-hari. Fasilitator dapat mengamati bagaimana peserta merespons pesan yang dikirimkan dalam grup pelatihan atau grup komunitas desa. Apabila peserta mulai memberikan klarifikasi, membagikan tautan verifikasi, atau mengingatkan anggota lain untuk berhati-hati terhadap informasi yang belum jelas, hal ini merupakan bukti konkret bahwa pelatihan telah menumbuhkan kapasitas kepemimpinan digital. Bahkan tindakan sederhana seperti menunda untuk meneruskan informasi, menghapus pesan yang menimbulkan keraguan, atau bertanya kepada fasilitator sebelum membagikan konten tertentu merupakan tanda bahwa proses transformasi perilaku sedang berlangsung.

Selain perilaku, evaluasi pelatihan literasi media juga harus menilai perkembangan kesadaran kritis peserta. Dalam kerangka Paulo Freire, kesadaran kritis tampak ketika seseorang mampu menghubungkan pengalaman personalnya dengan struktur sosial yang lebih luas. Peserta yang telah mencapai tahap ini tidak hanya sadar bahwa dirinya pernah tertipu, tetapi memahami bahwa penipuan digital merupakan bagian dari sistem ekonomi digital yang memanfaatkan kerentanan pengguna. Mereka menyadari bahwa hoaks tidak muncul begitu saja, tetapi diproduksi untuk mempertahankan kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis tertentu. Kesadaran ini mengubah cara peserta memandang media: bukan lagi sebagai ruang netral, melainkan sebagai arena yang penuh dengan relasi kuasa dan strategi manipulasi.

Indikator kesadaran kritis dapat muncul dari pertanyaan-pertanyaan reflektif yang disampaikan peserta selama diskusi. Ketika peserta bertanya, "Siapa yang diuntungkan dengan hoaks ini?", "Mengapa orang desa lebih

sering menjadi target penipuan?”, atau “Bagaimana algoritma membuat kita lebih mudah terjebak dalam informasi yang sama?”, maka pelatihan telah memasuki wilayah pendalaman kesadaran. Peserta tidak lagi hanya berfokus pada benar atau salahnya sebuah pesan, tetapi mulai memahami gambaran besar yang membentuk budaya digital mereka.

Kesadaran kritis juga dapat terlihat dari tindakan sosial peserta setelah pelatihan. Misalnya, ketika mereka mulai mengedukasi anggota keluarga, mengingatkan orang tua agar tidak mudah percaya pada pesan berantai, atau membantu perangkat desa meluruskan informasi yang beredar, hal ini menunjukkan bahwa peserta telah melampaui pembelajaran individual dan masuk ke tahap pemberdayaan sosial. Mereka tidak hanya mengubah perilaku sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam memperbaiki ekosistem informasi di komunitasnya.

Dengan demikian, evaluasi perubahan perilaku dan kesadaran kritis bukan hanya mengukur apa yang peserta ketahui, tetapi apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka memahami dirinya dalam struktur komunikasi digital. Evaluasi seperti ini membutuhkan metode campuran: observasi, refleksi, studi kasus, percakapan informal, dan pemantauan jangka panjang melalui ruang digital desa. Ketika peserta menunjukkan perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan secara simultan, maka pelatihan literasi media dapat dikatakan telah mencapai tujuan transformatifnya — yaitu membentuk masyarakat desa yang kritis, berdaya, dan mampu menjaga komunitasnya dari ancaman disinformasi di era digital.

11.4 Instrumen dan Teknik Evaluasi Pelatihan

Pemilihan instrumen dan teknik evaluasi dalam pelatihan literasi media perlu dilakukan secara cermat dan sensitif terhadap kondisi sosial, budaya, serta tingkat literasi

masyarakat desa. Evaluasi tidak boleh hanya mengandalkan bentuk-bentuk pengukuran tradisional seperti tes tertulis atau kuesioner kompleks yang berpotensi menimbulkan kecemasan bagi peserta, terutama mereka yang memiliki pengalaman terbatas dalam pendidikan formal. Sebaliknya, instrumen evaluasi harus dirancang untuk menangkap perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta secara lebih autentik melalui proses pembelajaran yang alami dan kontekstual.

Salah satu instrumen yang paling efektif adalah evaluasi berbasis praktik, di mana peserta diminta menunjukkan secara langsung kemampuan mereka dalam menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Misalnya, peserta dapat diminta melakukan verifikasi sederhana terhadap sebuah gambar, menelusuri asal suatu berita, atau menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menerima pesan mencurigakan di WhatsApp. Pendekatan ini tidak hanya mengukur kemampuan teknis peserta, tetapi juga memberikan pengalaman belajar tambahan yang memperkuat pemahaman mereka.

Selain evaluasi praktik, wawancara singkat merupakan teknik evaluasi yang sangat relevan dalam konteks desa. Fasilitator dapat mengadakan percakapan informal dengan peserta—baik secara individu maupun kelompok kecil—untuk menggali sejauh mana mereka memahami materi pelatihan, bagian mana yang paling membantu, serta aspek apa yang masih mereka anggap sulit. Wawancara memungkinkan peserta mengekspresikan pemikiran, kebingungan, dan refleksinya tanpa tekanan, serta membuka ruang bagi fasilitator untuk menilai kedalaman pemahaman peserta secara lebih personal dan holistik. Teknik ini juga mendukung terciptanya relasi yang akrab antara fasilitator dan peserta, yang merupakan salah satu ciri khas pembelajaran nonformal di desa.

Selain itu, observasi langsung menjadi instrumen evaluasi yang tidak kalah penting. Melalui observasi, fasilitator dapat mencermati dinamika interaksi peserta selama proses pelatihan, termasuk kemampuan mereka dalam berdiskusi, kesediaan bertanya, keberanian mengungkapkan pengalaman pribadi, serta kemampuan mereka membantu sesama peserta yang mengalami kesulitan. Observasi juga memberikan gambaran tentang bagaimana peserta mempraktikkan sikap-sikap kritis, etis, dan kolaboratif yang menjadi bagian penting dari literasi media. Misalnya, fasilitator dapat mencatat bagaimana peserta merespons contoh hoaks yang ditampilkan, apakah mereka langsung percaya, mempertanyakan, atau mencoba menganalisis sumbernya.

Teknik evaluasi lainnya dapat berupa refleksi tertulis sederhana, lembar penilaian praktis, atau pemetaan pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Seluruh instrumen ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian yang bersifat menghakimi, tetapi lebih sebagai upaya memahami proses perkembangan peserta secara komprehensif. Dengan instrumen dan teknik evaluasi yang tepat, fasilitator dapat memastikan bahwa pelatihan tidak hanya menghasilkan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga perubahan cara berpikir dan perilaku yang lebih kritis dan bertanggung jawab di ruang digital.

11.5 Monitoring Pelaksanaan Pelatihan

Monitoring pelaksanaan pelatihan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan, standar kualitas, dan prinsip-prinsip pendidikan nonformal yang telah dirancang dalam kurikulum. Monitoring tidak sekadar menjadi aktivitas administratif untuk memeriksa apakah pelatihan “telah dilakukan”, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan berkelanjutan yang menilai

kesesuaian antara desain kurikulum dan praktik di lapangan. Melalui monitoring, penyelenggara dapat memastikan bahwa setiap elemen pelatihan—mulai dari penyampaian materi, dinamika peserta, hingga penggunaan metode pembelajaran—dilaksanakan secara konsisten dengan nilai-nilai partisipatif, dialogis, dan kontekstual yang menjadi dasar program literasi media ini.

Monitoring biasanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara, perangkat desa, atau tim internal fasilitator yang telah diberi kewenangan dan kapasitas untuk menilai jalannya pelatihan. Proses ini meliputi peninjauan terhadap kelengkapan dan ketepatan materi, kualitas penyampaian fasilitator, efektivitas teknik pembelajaran, serta tingkat keterlibatan dan respons peserta. Aspek-aspek tersebut diamati untuk memastikan bahwa pelatihan tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga memenuhi standar pedagogis: relevan, partisipatif, adaptif, dan memberdayakan.

Dalam konteks masyarakat desa, monitoring harus mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi dan budaya lokal yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Misalnya, pelatihan yang dijadwalkan pada musim panen atau musim tanam sering kali menghadapi masalah tingkat kehadiran karena sebagian besar peserta lebih fokus pada pekerjaan di ladang. Demikian pula, cuaca yang tidak menentu atau adanya kegiatan adat dapat menyebabkan penurunan partisipasi atau gangguan terhadap pelaksanaan sesi. Monitoring yang sensitif terhadap kondisi lokal memungkinkan penyelenggara melakukan penyesuaian, seperti mengubah jadwal, menggunakan lokasi alternatif yang lebih mudah dijangkau, atau membagi pelatihan menjadi beberapa sesi yang lebih singkat.

Selain faktor sosial, monitoring juga mencakup identifikasi kendala teknis yang kerap muncul dalam pelatihan berbasis digital. Banyak desa menghadapi

keterbatasan fasilitas seperti listrik yang tidak stabil, jaringan internet yang lemah, atau kurangnya perangkat pendukung seperti proyektor, *speaker*, atau papan tulis. Monitoring yang efektif memungkinkan penyelenggara mengambil langkah korektif, misalnya mempersiapkan perangkat cadangan, menyiapkan materi *offline*, atau mengganti metode pembelajaran agar tidak terlalu bergantung pada teknologi. Pendekatan adaptif ini memastikan bahwa pelatihan tetap dapat berlangsung dengan baik meskipun dalam kondisi yang serba terbatas.

Monitoring juga memberikan ruang bagi fasilitator untuk mengidentifikasi dinamika sosial di antara peserta yang dapat mempengaruhi jalannya pembelajaran. Dalam beberapa kasus, ketegangan antar peserta dapat muncul akibat perbedaan pandangan politik, keagamaan, atau pengalaman pribadi yang sensitif terkait hoaks dan penipuan digital. Dengan melakukan monitoring, penyelenggara dapat merespons dinamika ini dengan bijaksana, misalnya melalui pendampingan tambahan, penyusunan ulang kelompok diskusi, atau penguatan peran fasilitator sebagai mediator pembelajaran.

Secara keseluruhan, monitoring pelaksanaan pelatihan berfungsi sebagai alat penjaga kualitas yang memastikan program berjalan dengan efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Monitoring tidak hanya melihat apakah pelatihan “telah dilakukan”, tetapi apakah ia benar-benar bermakna, memberikan dampak, dan menciptakan proses pembelajaran yang aman, reflektif, dan transformatif bagi masyarakat desa. Dengan monitoring yang terstruktur dan peka terhadap konteks, pelatihan literasi media dapat berkembang menjadi program yang berkelanjutan dan semakin relevan bagi kehidupan masyarakat.

11.6 Monitoring Dampak Jangka Panjang

Monitoring dampak jangka panjang merupakan komponen esensial dalam siklus pelatihan literasi media, karena perubahan perilaku digital tidak selalu muncul secara langsung setelah pelatihan selesai dilakukan. Literasi media bukan sekadar pengetahuan atau keterampilan teknis yang dapat diukur secara instan, melainkan serangkaian kebiasaan baru yang terbentuk melalui proses internalisasi, refleksi, dan pengalaman berulang. Oleh karena itu, pemantauan pasca pelatihan perlu dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang untuk menangkap dinamika perubahan yang tidak selalu tampak pada evaluasi segera.

Dalam konteks masyarakat desa, monitoring dampak jangka panjang dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola komunikasi digital masyarakat setelah pelatihan. Salah satu indikator sederhana namun signifikan adalah perubahan perilaku dalam grup WhatsApp desa atau ruang komunikasi digital lainnya. Fasilitator atau pihak penyelenggara dapat melihat apakah peserta mulai menerapkan prinsip-prinsip verifikasi informasi, misalnya dengan menanyakan sumber berita, mencocokkan tanggal unggahan, atau meminta klarifikasi sebelum meneruskan pesan tertentu. Kehadiran pertanyaan-pertanyaan kritis seperti “Sudah dicek sumbernya?” atau “Ini dari media yang kredibel atau bukan?” merupakan tanda bahwa pelatihan telah berhasil menanamkan kebiasaan reflektif pada peserta.

Selain itu, monitoring juga berfokus pada identifikasi peran peserta sebagai agen perubahan di lingkungan sosial mereka. Salah satu dampak positif yang menunjukkan keberhasilan pelatihan adalah ketika peserta secara aktif mengedukasi keluarga, tetangga, atau rekan kerja mengenai cara memeriksa kebenaran informasi. Tindakan sederhana seperti mengingatkan orang tua untuk tidak langsung menyebarkan pesan berantai, membantu teman memeriksa

tautan mencurigakan, atau membagikan infografik edukatif di grup lokal merupakan bentuk kontribusi nyata yang memperkuat ekosistem literasi media di desa.

Dalam jangka panjang, monitoring juga dapat melihat bagaimana peserta terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas yang terkait dengan literasi informasi. Ketika masyarakat yang telah mengikuti pelatihan mulai mengambil peran sebagai narasumber informal dalam diskusi publik, membantu perangkat desa dalam menyusun informasi resmi, atau menginisiasi kegiatan edukatif seperti kelas kecil literasi digital, hal tersebut menjadi bukti bahwa pelatihan telah menghasilkan dampak sosial yang lebih luas. Pelatihan yang baik bukan hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memicu terbentuknya gerakan literasi media berbasis komunitas yang tumbuh secara organik.

Monitoring jangka panjang juga penting untuk menilai apakah desa telah mengalami perbaikan dalam tata kelola informasinya. Keberadaan kanal informasi resmi yang dikelola dengan baik—misalnya akun media sosial desa, grup WhatsApp resmi RT atau RW, atau papan informasi digital—sering kali menjadi salah satu hasil tak langsung dari pelatihan literasi media. Kanal resmi tersebut berfungsi sebagai sumber rujukan yang kredibel dan membantu menekan penyebaran hoaks yang sebelumnya beredar tanpa kontrol. Ketika masyarakat semakin mengandalkan kanal resmi dan mengurangi ketergantungan pada sumber informasi tidak jelas, hal itu menunjukkan perubahan sistemik yang positif dalam ekologi informasi desa.

Lebih jauh, monitoring dampak jangka panjang tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan belajar. Desa yang mampu mempertahankan praktik literasi media dalam kehidupan sehari-harinya cenderung memiliki budaya dialog yang lebih sehat, pola komunikasi publik yang lebih transparan, dan

solidaritas sosial yang lebih kuat. Dengan kata lain, monitoring jangka panjang bukan sekadar alat untuk melihat efek pelatihan, tetapi juga sarana untuk memahami sejauh mana pelatihan telah menjadi bagian dari transformasi sosial yang berkelanjutan.

11.7 Mengintegrasikan Hasil Evaluasi dalam Penyempurnaan Kurikulum

Integrasi hasil evaluasi dan monitoring ke dalam proses penyempurnaan kurikulum merupakan tahapan krusial dalam memastikan bahwa pelatihan literasi media tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab dinamika tantangan digital yang dihadapi masyarakat desa. Evaluasi tidak berhenti sebagai aktivitas administratif yang menghasilkan laporan tertulis, melainkan berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang hidup (*living knowledge*), yang memungkinkan penyelenggara dan fasilitator memahami bagaimana kurikulum bekerja di lapangan dan apa saja yang perlu disesuaikan. Dengan mengolah temuan evaluatif secara reflektif dan sistematis, kurikulum dapat terus berkembang mengikuti perubahan perilaku peserta, kebutuhan komunitas, serta lanskap informasi digital yang terus berubah.

Hasil evaluasi, baik yang bersifat formatif maupun sumatif, menjadi dasar untuk menilai efektivitas setiap komponen pelatihan: mulai dari materi, metode, pendekatan fasilitasi, hingga struktur alur pelatihan. Ketika evaluasi menunjukkan bahwa peserta kesulitan memahami konsep tertentu—misalnya mekanisme algoritma, kategori disinformasi, atau langkah-langkah verifikasi—maka kurikulum perlu disesuaikan dengan menambahkan ilustrasi praktis, contoh lokal yang relevan, atau memperlambat ritme penyampaian materi tersebut. Sebaliknya, jika peserta menunjukkan respons antusias terhadap metode tertentu seperti studi kasus atau latihan verifikasi langsung, maka

komponen tersebut dapat diperkuat atau diperluas dalam modul.

Penyempurnaan kurikulum juga perlu memperhatikan *feedback* peserta mengenai pengalaman belajar mereka. Ketika peserta menyatakan bahwa sebagian materi terasa terlalu abstrak, terlalu teknis, atau tidak sesuai dengan kebutuhan peran sosial mereka, semua masukan tersebut menjadi refleksi penting bagi penyusun kurikulum. Pelatihan literasi media hanya akan efektif apabila ia berakar pada realitas hidup peserta. Oleh karena itu, hasil evaluasi harus berfungsi sebagai jembatan antara dunia konseptual kurikulum dengan pengalaman konkret masyarakat desa.

Selain itu, perkembangan ekosistem digital menuntut kurikulum untuk terus diperbarui. Pola penyebaran hoaks dapat berubah, jenis penipuan digital selalu berkembang, dan algoritma platform media sosial pun mengalami pembaruan yang memengaruhi perilaku digital pengguna. Ketika monitoring menemukan bahwa peserta menghadapi bentuk-bentuk manipulasi informasi yang baru—misalnya penipuan melalui kecerdasan buatan, rekayasa gambar AI (*deepfake*), atau modus penipuan yang menyasar bantuan pemerintah—maka kurikulum harus segera merespons dengan menambahkan modul baru, memperbarui contoh kasus, atau mengubah strategi pembelajaran agar sesuai dengan tantangan tersebut.

Integrasi hasil evaluasi juga mencakup penyempurnaan pendekatan pedagogis. Jika evaluasi menunjukkan bahwa peserta lebih mudah memahami materi melalui bahasa lokal, metafora tradisional, atau cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan desa, maka pendekatan ini perlu menjadi bagian yang dirumuskan secara eksplisit dalam kurikulum. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya relevan secara tematik, tetapi juga sensitif terhadap budaya dan identitas masyarakat setempat.

Dalam skema yang lebih luas, kurikulum harus dipandang sebagai dokumen hidup (*living curriculum*) yang tumbuh bersama komunitas. Ketika peserta pelatihan mulai bergerak sebagai agen perubahan di lingkungannya, ketika perangkat desa menerapkan prinsip literasi media dalam komunikasi publik, atau ketika percakapan di grup WhatsApp desa mulai menunjukkan peningkatan kesadaran kritis, semua perubahan ini adalah indikator bahwa kurikulum bekerja. Tugas penyusun kurikulum adalah menangkap tanda-tanda tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam versi terbaru sehingga pelatihan tidak sekadar berulang, tetapi terus berkembang menuju kualitas yang lebih baik.

Dengan demikian, penyempurnaan kurikulum melalui evaluasi dan monitoring tidak hanya memperbaiki proses pelatihan, tetapi juga memperkuat ekosistem literasi media di desa secara berkelanjutan. Kurikulum menjadi fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika digital yang terus bergerak cepat. Pada akhirnya, proses integrasi ini menjadikan kurikulum sebagai instrumen pemberdayaan yang selalu relevan, kontekstual, dan berpihak pada pembangunan kapasitas kritis masyarakat desa.



Bagian 12

Penutup

Pelatihan literasi media bagi masyarakat desa bukan hanya sebuah intervensi pendidikan, tetapi sebuah upaya memperkuat fondasi sosial komunitas di tengah derasnya arus informasi digital. Desa hari ini tidak lagi berdiri dalam isolasi budaya sebagaimana masa lalu; ia terhubung secara langsung dengan dunia global melalui layar-layar kecil yang dibawa setiap masyarakat dalam genggamannya. Transformasi ini membawa peluang untuk memperkaya kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya desa, namun pada saat yang sama membuka kerentanan baru yang tidak pernah dihadapi generasi sebelumnya. Dalam konteks inilah pelatihan literasi media menemukan urgensinya.

Kurikulum yang dirancang dalam buku ini berangkat dari pemahaman bahwa literasi media bukan sekadar kemampuan teknis mengoperasikan perangkat digital, tetapi seperangkat kompetensi kritis yang memungkinkan masyarakat menghadapi informasi secara lebih sadar dan bertanggung jawab. Literasi media mengajak peserta melihat informasi bukan sebagai sesuatu yang netral atau polos, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan

tertentu, oleh narasi yang dipilih, oleh cara konten diproduksi, dan oleh algoritma yang menentukan apa yang muncul di layar mereka. Dengan demikian, literasi media berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang membantu masyarakat membaca dunia digital dengan lebih jernih, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk mengambil peran aktif dalam membentuk ekosistem informasi yang sehat.

Seluruh rangkaian bab yang telah diuraikan menggambarkan proses komprehensif penyusunan kurikulum pelatihan literasi media, mulai dari analisis kebutuhan, landasan konseptual, struktur modul, hingga strategi fasilitasi dan mekanisme evaluasi. Kurikulum ini didesain untuk menjawab tantangan spesifik masyarakat desa yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan teknologi yang unik. Pendekatan yang digunakan menekankan relevansi pengalaman peserta, dialog antar generasi, serta praktik langsung yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan desain ini, pelatihan bukan hanya mendorong pemahaman baru, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan kritis yang berkelanjutan.

Di dalam pelatihan literasi media, perubahan yang dicari bukanlah perubahan instan, melainkan perubahan bertahap yang terwujud dalam tindakan-tindakan kecil: kebiasaan memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya, keberanian untuk mengajukan pertanyaan kritis dalam percakapan grup WhatsApp, kemampuan mengenali tanda-tanda penipuan digital, atau kesediaan untuk melindungi data pribadi dengan lebih hati-hati. Tindakan-tindakan kecil ini, apabila dilakukan oleh banyak orang dalam komunitas, akan membentuk budaya informasi yang lebih sehat dan lebih tahan terhadap manipulasi.

Fasilitator memainkan peran kunci dalam proses ini. Mereka bukan hanya penyampai materi, tetapi penggerak kesadaran kritis yang membantu peserta menafsirkan ulang

pengalaman digital mereka. Melalui pendekatan dialogis, fasilitator menjadi jembatan antara peserta dan konsep-konsep literasi media yang mungkin terasa abstrak pada awalnya. Dengan keterampilan sosial yang kuat dan sensitivitas terhadap dinamika desa, fasilitator dapat memastikan bahwa pelatihan berjalan inklusif, berakar pada pengalaman peserta, serta bebas dari dominasi atau bias tertentu. Oleh karena itu, salah satu tugas penting lembaga penyelenggara adalah memastikan fasilitator mendapat dukungan yang memadai, baik dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan lanjutan.

Keberlanjutan program merupakan aspek vital yang menentukan apakah pelatihan menjadi gerakan jangka panjang atau hanya sekadar kegiatan sesaat. Untuk mencapai keberlanjutan, pelatihan harus diikuti oleh inisiatif komunitas seperti pembentukan kader literasi media, pengelolaan kanal resmi desa, penyusunan pedoman komunikasi publik, atau kegiatan kampanye yang dipimpin masyarakat. Evaluasi dan monitoring jangka panjang diperlukan untuk memantau dinamika perubahan perilaku masyarakat dan untuk menyesuaikan pelatihan dengan perkembangan risiko digital yang terus berubah. Dalam hal ini, desa perlu memosisikan literasi media sebagai bagian integral dari upaya pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pada akhirnya, pelatihan literasi media bagi masyarakat desa adalah investasi dalam ketahanan sosial. Di tengah pertumbuhan platform digital yang semakin kompleks, kemampuan masyarakat untuk mengelola informasi menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial paling penting. Literasi media membantu masyarakat menjaga diri, keluarga, dan komunitas dari ancaman digital, sekaligus membuka pintu bagi mereka untuk memanfaatkan teknologi secara produktif. Dengan kemampuan yang memadai, masyarakat desa tidak lagi sekadar menjadi

konsumen pasif, tetapi menjadi masyarakat digital yang aktif, kritis, dan berdaya.

Buku ini hadir sebagai pijakan awal bagi berbagai pihak—fasilitator, lembaga masyarakat, perangkat desa, sekolah komunitas, dan pemerintah daerah—untuk mengembangkan pelatihan literasi media yang kontekstual dan berdampak. Sebagaimana pengetahuan terus bergerak, kurikulum ini pun tidak bersifat final. Ia perlu diperbarui, direvisi, dan diperkaya sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan lokal. Namun satu prinsip tetap harus bertahan: literasi media harus dimaknai sebagai jalan pemberdayaan yang mengembalikan martabat masyarakat desa sebagai subjek yang mampu memahami dunia digital dan mengambil keputusan yang bijak.

Dengan demikian, pelatihan literasi media bukan hanya membentuk masyarakat yang terampil menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk masyarakat yang mampu berdialog, berpikir kritis, dan mengambil bagian dalam membangun masa depan informasi yang lebih sehat bagi komunitas mereka. Di titik inilah literasi media menjadi lebih dari sekadar kompetensi—ia menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat desa yang sadar, tahan, dan berdaya.

Daftar Pustaka

- Bandura, A. (2001). *Social cognitive theory of mass communication. Media Psychology.*
- boyd, d. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens.* Yale University Press.
- Buckingham, D. (2003). *Media education: Literacy, learning and contemporary culture.* Polity Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society.* Wiley.
- Council of Europe. (2017). Wardle, C., & Derakhshan, H. *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework.*
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Freire, P., & Macedo, D. (1987). *Literacy: Reading the word and the world.* Bergin & Garvey.
- Gee, J. P. (2015). *Literacy and education.* Routledge.
- Hobbs, R. (2011). *Digital and media literacy: Connecting culture and classroom.* Corwin Press.
- Hobbs, R. (2017). *Create to learn: Introduction to digital literacy.* Wiley.
- Hobbs, R., & Mihailidis, P. (Eds.). (2016). *The International Encyclopedia of Media Literacy.* Wiley-Blackwell.
- Illich, I. (1971). *Deschooling society.* Harper & Row.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide.* NYU Press.

- Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). Educating for democracy in a partisan age: Confronting the challenges of motivated reasoning and misinformation. *American Educational Research Journal*.
- Kellner, D., & Share, J. (2007). *Critical media literacy is not an option*. Peter Lang.
- Knowles, M. S. (1984). *The adult learner: A neglected species* (3rd ed.). Gulf Publishing.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner* (8th ed.). Routledge.
- Lewandowsky, S., Ecker, U., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*.
- Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *The Communication Review*, 7(1), 3–14.
- McLuhan, M. (1994). *Understanding media: The extensions of man*. MIT Press.
- Mezirow, J. (1991). *Transformative dimensions of adult learning*. Jossey-Bass.
- Mezirow, J. (2000). *Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress*. Jossey-Bass.
- Potter, W. J. (2013). *Media literacy* (7th ed.). SAGE Publications.
- Postman, N. (1985). *Amusing ourselves to death*. Penguin Books.
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to thrive online*. MIT Press.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- UNESCO. (2013). *Global Media and Information Literacy Assessment Framework*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Media and information literacy curriculum for teachers* (2nd ed.). UNESCO Publishing.

Glosarium

A

Agent of Change

Individu atau kelompok yang berperan mendorong perubahan sosial, budaya, atau perilaku dalam komunitas.

AI (Artificial Intelligence)

Teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya memerlukan kemampuan kognitif manusia.

Algoritma

Rangkaian aturan yang digunakan platform digital untuk menentukan konten apa yang ditampilkan kepada pengguna.

Algoritma Rekomendasi

Sistem otomatis yang menyajikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi dan riwayat aktivitas.

Aplikasi

Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu pada *smartphone* atau komputer.

Audiens

Kelompok pengguna atau masyarakat yang menjadi penerima suatu pesan atau konten.

Autentikasi

Proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan akses yang sah ke akun atau perangkat.

B

Bandwidth

Kapasitas maksimal jaringan internet dalam mentransmisikan data dalam periode waktu tertentu.

Big Data

Kumpulan data berukuran sangat besar dan kompleks yang dianalisis untuk menemukan pola dan informasi penting.

Bubble (Filter Bubble)

Kondisi ketika algoritma hanya menampilkan informasi serupa sehingga mempersempit pandangan pengguna.

C

Cek Fakta (*Fact-checking*)

Proses memverifikasi kebenaran informasi melalui pengecekan sumber, data, dan konteks.

Chat

Percakapan digital melalui aplikasi pesan instan atau platform daring.

Clickbait

Judul atau konten yang dibuat untuk memancing klik melalui emosi, sering kali tidak merepresentasikan isi sebenarnya.

Community Empowerment

Upaya penguatan kapasitas komunitas agar mampu memecahkan masalah dan mengelola perubahan secara mandiri.

Compulsive Digital Loop

Siklus perilaku digital berulang yang sulit dihentikan karena dipicu oleh desain platform dan respons emosional.

Confirmation Bias

Kecenderungan seseorang untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya dan mengabaikan informasi yang bertentangan.

D

Deepfake

Konten manipulasi digital menggunakan AI untuk mengubah wajah atau suara seseorang sehingga tampak autentik.

Disinformasi

Informasi salah yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu atau mempengaruhi opini publik.

Disorienting Dilemma

Situasi yang mengguncang cara pandang seseorang sehingga memicu refleksi mendalam (konsep Mezirow).

E

Echo Chamber

Kondisi ketika seseorang hanya terpapar informasi dari kelompok dengan pandangan yang sama sehingga memperkuat bias.

E-commerce

Aktivitas jual-beli produk atau layanan melalui platform daring.

F

Filter Bubble

Fenomena penyempitan perspektif akibat penyaringan informasi oleh algoritma.

Forwarding

Tindakan meneruskan pesan ke orang lain atau grup digital.

Framing

Cara penyajian informasi yang memengaruhi interpretasi atau persepsi audiens.

Frame of Reference

Kerangka acuan seseorang dalam menafsirkan pengalaman atau informasi.

G

Gatekeeper

Pihak yang mengontrol arus informasi dan menentukan konten apa yang layak diketahui publik.

Groupthink

Kecenderungan kelompok untuk menghindari konflik

sehingga mengabaikan penilaian kritis.

H

Heuristik

Proses berpikir cepat berbasis pengalaman atau intuisi yang sering digunakan dalam menilai informasi.

Hoaks

Informasi palsu yang disebarkan tanpa dasar fakta, sering kali dibuat untuk memicu emosi atau kepanikan.

I

Ice Breaking

Kegiatan untuk mencairkan suasana sebelum proses pembelajaran dimulai.

Ideologisasi

Proses penanaman nilai atau ideologi tertentu melalui media atau interaksi sosial.

Information

Data atau pesan yang memiliki makna ketika ditafsirkan oleh penerima.

Inoculatory Approach

Pendekatan pencegahan hoaks dengan memberikan “vaksin informasi” berupa contoh manipulasi beserta cara mendeteksinya.

Intersubjective Understanding

Pemahaman bersama yang dibangun melalui dialog antara dua atau lebih individu.

Interpersonal

Terkait hubungan komunikasi antarindividu secara langsung maupun digital.

Intensionalitas

Sifat atau tujuan tertentu yang melekat pada tindakan atau pesan.

J

Judi Online

Kegiatan perjudian melalui platform digital yang sering menimbulkan risiko finansial dan kecanduan.

K

Keamanan Siber (Keamanan Digital)

Langkah-langkah untuk melindungi perangkat, data pribadi, dan aktivitas daring dari ancaman seperti malware atau phishing.

L

Likes

Indikator respons di media sosial yang menunjukkan apresiasi pengguna terhadap sebuah konten.

Life Skill

Keterampilan hidup yang membantu individu beradaptasi dan menyelesaikan masalah sehari-hari.

Literasi

Kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif.

Literasi Digital

Kemampuan menggunakan teknologi informasi secara aman, kritis, dan produktif.

Literasi Media

Kemampuan mengakses, mengevaluasi, menganalisis, dan menciptakan konten media secara kritis dan etis.

M

Malinformasi

Informasi yang benar tetapi disebarkan untuk merugikan pihak tertentu.

Malware

Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak perangkat atau mencuri data.

Marketplace

Platform digital untuk jual beli produk atau jasa secara daring.

Metadata

Informasi tambahan yang menjelaskan data utama, seperti waktu, lokasi, atau perangkat yang digunakan.

Misinformasi

Informasi salah yang disebarkan tanpa niat menipu.

Mindset

Pola pikir atau cara pandang seseorang terhadap suatu hal.

Mitigasi

Upaya mengurangi risiko atau dampak negatif dari suatu situasi.

N

Non-judgmental

Sikap netral tanpa menghakimi dalam menanggapi pendapat atau pengalaman.

O

Offline

Kondisi tidak terhubung dengan jaringan internet.

Online

Kondisi terhubung ke jaringan internet.

Otoritatif

Memiliki kewenangan atau legitimasi dalam memberikan informasi atau keputusan.

P

Pembelajaran Transformatif

Proses pembelajaran yang menghasilkan perubahan mendalam pada cara seseorang memahami realitas.

Phishing

Upaya penipuan digital untuk mencuri data pribadi melalui tautan atau pesan palsu.

Platform Digital

Sistem daring tempat interaksi, komunikasi, atau transaksi terjadi.

Pornografi

Konten yang menampilkan aktivitas seksual eksplisit, sering kali berdampak negatif pada perkembangan generasi muda.

Postingan

Unggahan konten di media sosial atau platform digital.

Problem-Based Learning

Metode belajar yang berfokus pada pemecahan masalah nyata.

Problem-Posing

Pendekatan Freire yang menempatkan peserta sebagai subjek pembelajar melalui dialog kritis.

Prosumer

Pengguna yang sekaligus menjadi produsen konten digital.

R

Radikalisasi

Proses seseorang mengadopsi pandangan ekstrem yang dapat memicu tindakan berbahaya.

Replikasi

Tindakan menduplikasi atau menyebarkan ulang konten.

Reverse Image Search

Teknik verifikasi gambar untuk menemukan sumber asli atau konteks sebenarnya.

Reward

Hadiah atau umpan balik positif yang memengaruhi perilaku pengguna di platform digital.

Ruang Digital

Lingkungan virtual tempat interaksi dan aktivitas daring berlangsung.

S

Screenshot

Gambar tangkapan layar pada perangkat digital.

Slot Games

Permainan digital berbasis taruhan yang dapat menimbulkan kecanduan.

Social Engineering

Manipulasi psikologis untuk menipu seseorang agar memberikan informasi pribadi.

Social Trust

Kepercayaan sosial dalam komunitas yang memengaruhi penerimaan atau penolakan informasi.

Spiral Learning

Strategi belajar yang mengulang konsep pada tingkat kompleksitas lebih tinggi secara bertahap.

Speaker

Pembicara dalam kegiatan pelatihan atau diskusi.

Smartphone

Telepon pintar yang dapat menjalankan berbagai aplikasi dan fungsi digital.

T

Terminologis

Terkait istilah atau konsep dalam suatu bidang tertentu.

Tools

Alat digital yang digunakan untuk verifikasi, analisis, atau produksi konten.

Transformasi Digital

Perubahan sistem dan praktik sosial akibat perkembangan teknologi informasi.

Two-Factor Authentication

Metode keamanan akun dengan dua lapis verifikasi.

U

Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Konten yang menyerang kelompok tertentu berdasarkan identitas sosial.

V

Viral

Konten yang menyebar sangat cepat dalam waktu singkat melalui media digital.

Verifikasi Informasi

Proses memeriksa kebenaran informasi melalui sumber kredibel atau alat pendukung.

W

Well-being

Kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pengguna di era digital.

CATATAN

[illegible]

Indeks

A

Agent of Change, 205
AI (Artificial Intelligence), 150
Algoritma, 112–113, 147, 178
Algoritma Rekomendasi, 112–113
Akses Internet Desa, 88–92
Andragogi, 56–60, 128–130
Aplikasi, 45, 150
Audiens, 30, 75
Autentikasi, 155

B

Bandwidth, 87
Big Data, 160
Bubble (Filter Bubble), 83–85
Budaya Digital Desa, 40–42

C

Cek Fakta (Fact-checking), 144–147
Chat, 76
Clickbait, 102, 145
Community Empowerment, 210
Compulsive Digital Loop, 170–171
Confirmation Bias, 100–102
Cybercrime Desa, 105–110

D

Deepfake, 148–150
Disinformasi, 98–101
Disorienting Dilemma, 130–131
Deschooling (Illich), 34–35

E

Echo Chamber, 84, 110–115

E-commerce, 75, 165
Etika Digital, 150–155

F

Fact-checking Tools, 145–152
Feedback, 200
Filter Bubble, 83–85
Forwarding, 77
Framing, 96, 185
Frame of Reference, 131
Freire, Paulo, 62–70, 123–126

G

Gatekeeper, 98, 175
Groupthink, 110–112

H

Heuristik, 100–101
Hoaks (umum), 95–104
Hoaks Pertanian, 45, 95–96
Hoaks Kesehatan, 97

I

Intersubjective Understanding, 120–121
Internet Desa (lihat Akses Internet Desa)

K

Keamanan Digital, 150–158
Komunikasi Publik Desa, 175–182
Kurikulum Literasi Media, 135–142

L

Learning Society, 210
Life Skill, 130, 214

Literasi Media, 20–35, 65–70
Literasi Digital, 20–35
Likes, 76
Logika Informasi, 98–100

M

Malware, 152
Marketplace, 160–165
Misinformasi, 98–101
Mitigasi Risiko Digital, 155–158
Mindset, 130–132
Metadata, 149–150

N

Non-Judgmental Attitude, 201–202

O

Offline (Kegiatan), 45
Online Behavior, 75–80
Otoritatif (pesan/figur), 97

P

Pembelajaran Transformatif, 128–135
Pendekatan *Problem-Posing*, 62–70
Penipuan Digital, 105–110
Phishing, 152
Pornografi, 118–122
Postingan (Konten Digital), 75–76
Prosumer, 165–168
Problem-Based Learning, 128–130

R

Radikalisasi Digital, 110–118

Replikasi Konten, 96
Reverse Image Search, 145–146
Reward System, 170
Ruang Digital, 30–32

S

Screenshot, 143
Slot Games (Judi Online), 116–118
Social Engineering, 152–155
Social Trust, 40–42, 100–102
Speaker (Fasilitator/Pemateri), 200
Smartphone, 45
Spiral Learning, 135–140

T

Terminologis, 12
Tools (Alat Verifikasi), 145–152
Transformasi Digital, 30–35
Transformatif Learning (lihat Pembelajaran Transformatif)
Two-Factor Authentication, 155

U

Ujaran Kebencian, 115–118

V

Verifikasi Informasi, 144–150
Viral, 75–76
Visual Literacy, 147–149

W

Well-being Digital, 170–175
WhatsApp, 45–46, 75–77

Profil Penulis



Alim Harun Pamungkas

Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang pada 2001–2006, dilanjutkan program magister di jurusan dan perguruan tinggi yang sama pada 2008–2011. Pada 2022 mulai menempuh pendidikan doktor bidang Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Malang dan lulus pada 2025.

Karir profesional dosen dimulai pada April 2015 di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sertifikasi dosen diperoleh pada tahun 2017. Beberapa matakuliah yang dibina antara lain perencanaan program Pendidikan nonformal, analisis kebutuhan diklat, perencanaan pelatihan, pengelolaan pelatihan, seminar diklat, dan evaluasi program pelatihan.

Bidang kursus dan pelatihan menjadi fokus utama studinya. Sejumlah karya ilmiah di bidang ini telah dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN serta artikel di jurnal bereputasi, baik internasional maupun nasional terakreditasi.

Selain itu ia mendirikan dan aktif mengelola *Partnership on Action for Community Education* (PACE) sebuah lembaga yang didedikasikan untuk membantu lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh keterampilan tambahan yang berguna di dunia kerja.



Handriva Fauzi

Ia adalah seorang praktisi pendidikan nonformal yang memiliki minat mendalam pada pendidikan orang dewasa, pendidikan kritis, teknologi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Pendidikan Nonformal di Universitas Negeri Padang dan saat ini menempuh studi magister di bidang yang sama di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pengalaman akademik dan praktik lapangannya berpadu dalam fokus kajian tentang pendidikan sebagai proses pembebasan, khususnya melalui pendekatan andragogi, pedagogi kritis, dan teknologi pembelajaran.

Selain terlibat dalam dunia pendidikan, Handriva juga dikenal sebagai penulis dan perancang konten edukatif dengan gaya reflektif dan kontekstual, sering menghubungkan fenomena sehari-hari dengan isu-isu struktural yang lebih luas. Ia memiliki prinsip “semua orang adalah guru, Alam Raya sekolahku,” yang sejalan dengan falsafah Minangkabau yaitu “Alam Takambang Jadi Guru.”

Kurikulum Pelatihan Literasi Media

Bagi Masyarakat Desa

ALIM HARUN PAMUNGKAS
HANDRIVA FAUZI



Buku ini diharapkan menjadi inspirasi bagi berkembangnya gerakan literasi media yang tumbuh dari masyarakat desa sendiri. Literasi media harus dipahami sebagai jalan kemandirian: kemampuan untuk membaca informasi dengan kritis, mengambil keputusan dengan sadar, serta berpartisipasi aktif dalam membangun ruang digital yang lebih sehat dan beradab. Kurikulum ini tentunya tidak bersifat final. Perkembangan ekosistem digital yang cepat menuntut adanya pembaruan berkelanjutan. Namun, kami percaya fondasi yang disusun dalam buku ini dapat menjadi titik awal yang kuat bagi upaya membangun ketahanan informasi berbasis komunitas, dan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat desa untuk menjadi masyarakat digital yang berdaya, kritis, dan visioner.



*Partnership for Action
on Community Education*

**Komplek Pondok Pinang, Padang
Sumatera Barat**



Tahun 2026